Clean & Good Governance

Mencari arah-arah baru menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa

(Pelibatan aktif peran Eksekutif, Legislatif, Yudikatif ,Pers dan NGO)

Khofifah Indar Parawansa (Ketua DPP PKB)
Suwarno Adiwijoyo (Ketua DPP PAN)
Slamet Effendi Yusuf (Ketua Pemenangan GOLKAR)
Soedjana Sapi'ie (Direktur Forum Rektor)
Ismail Sunni (Guru Besar FH UI)
Erri Riyana Hardjapamekas (Sekjen MTI)
Farid Gaban (Redaktur Majalah TEMPO)
Barita Siregar (Anggota FKP MPR-RI)
Andre H. Pareira (Sekjen Balitbang PDIP JABAR)
Suryadi Radjab (Sekjen PBHI Bandung)
Tubagus Furqon (Pengamat NGO)

RARIA
3

for Information and Development Analysis (CIDA) dan Majalah PROGRESS ITB

N. 193
PERPUSTAKAAN

Clean & Good Governance

Mencari arah-arah baru menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa

(Pelibatan aktif peran Eksekutif, Legislatif, Yudikatif ,Pers dan NGO)

Khofifah Indar Parawansa (Ketua DPP PKB)
Suwarno Adiwijoyo (Ketua DPP PAN)
Slamet Effendi Yusuf (Ketua Pemenangan GOLKAR)
Soedjana Sapi'ie (Direktur Forum Rektor)
Ismail Sunni (Guru Besar FH UI)
Erri Riyana Hardjapamekas (Sekjen MTI)
Farid Gaban (Redaktur Majalah TEMPO)
Barita Siregar (Anggota FKP MPR-RI)
Andre H. Pareira (Sekjen Balitbang PDIP JABAR)
Suryadi Radjab (Sekjen PBHI Bandung)
Tubagus Furqon (Pengamat NGO)

Center for Information and Development Analysis (CIDA) dan Majalah PROGRESS ITB

Clean & Good Governance

Mencari Arah Baru Menuju Penyelenggaraan Negara yang bersi dan berwibawa

(Pelibatan Aktif Peran Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, Pers dan NGO)

Tim Editor :

Amiruddin, Dhani M.A., Moch Nunung Kurniawan, Moch Nur Ainul Yaqin,Shita Athiya

Cetakan I, November 1999

Desain Cover:

Gema Ari P

Tata Letak :

Gema, Ainul, Nung

- *Center for Information and Development Analysis*

Jl. Sekeloa Utara 59A Bandung, 40134 ph.2513803

Fax.022-2505442, email:Plato123@cyberlib.itb.ac.id

- *Majalah proGRESS ITB*

Student Center Timur, Sekretariat KOKESMA ITB

JL. Ganesha 10 Bandung, 40135, ph 022-2511394

DARI PENYUSUN/PENERBIT

Assalamualaikum,

Buku yang ada dihadapan anda ini berawal dari serentetan perjuangan sekian anak muda yang tengah haus akan air tawar pemikiran dan pencerahan. Bukan bermaksud sok atau sombong, namun kami sengaja hadir untuk turut menyumbangkan pemikiran bagi pembangunan negeri ini, apalagi dalam atmosfer kegalauan politik yang seakan-akan tidak berkesudahan pasca lengsernya Soeharto sebgai presiden tahun lalu.

Sesuatu yang baru atau sesuatu yang telah lama tidak anda jumpai tentu akan menjadi sesuatu yang unik. Ekspresi yang bisa kita tampilkan bisa jadi gembira, kagum, atau sekedar tersenyum, atau tertawa kecil, atau di sisi lain mungkin kita sedih, murung, bahkan meneteskan air mata. Atau mungkin biasa-biasa saja. Kalau sesuatu itu menjengkelkan atau menakutkan, anda pasti berharap dan berdoa mudah-mudahan tidak bertemu lagi.

Tapi kalau sesuatu itu adalah berkenaan dengan manusia, apalagi manusia atau orang itu adalah sahabat anda, anda tentu akan merasa kehilangan. Dan dalam doa anda, harapan untuk bertemu lagi akan menyala-nyala. Kami mengibaratkan diri kami seperti sahabat dekat atau sobat kental anda. Dan tentulah sebagai sobat kental, kami ingin disambut dengan tangan terbuka dan ekspresi penuh suka cita.

Sebagai 'anak sulung' , mudah-mudahan buku ini membuka ruang baru dalam jagad pemikiran struktural dan sanggup mengajak sikap kritis dari para pembaca atas substansi

yang kami tawarkan. Kami menyajikannya berdasarkan makalah pembicara, presentasi dan diskusi pada saat simposium, lengkap dengan tanya jawabnya, dan kami tambahkan lampiran-lampiran yang perlu, dengan sedikit mungkin proses *editing*. Jadi mohon dimaklumi jika terjadi pengulangan-pengulangan materi. Di samping itu ada juga pembicara yang hanya memberikan poin-poin makalah atau bahkan tidak memberikan makalahnya, sehingga tidak perlu heran misalnya pada bab tertentu langsung meloncat ke sub bab presentasi dan diskusi.

Sejujurnya, sikap percaya diri menjadi sesuatu yang mutlak sekaligus nyawa bagi kami saat ini. Dan kamipun sadar, 'produk intelektual' kami ini bukanlah apa-apa tanpa diiringi sikap komitmen.

Wassalam

Oktober 1999

CIDA-CENTER FOR INFORMATION AND DEVELOPMENT ANALYSIS

DAN

MAJALAH PROGRESS-ITB

KATA PENGANTAR

(Soedjana Sapiie, Dir. Forum Rektor)

Dengan segala senang hati saya memenuhi permintaan panitia untuk menyusun kata pengantar pada hasil seminar yang dilakukan dalam simposium nasional dengan topik yang sangat penting artinya bagi perkembangan kita ke depan sebagai negara bangsa yang besar.

Topik'clean and Good Governance' sangat relevan bagi kita. Diangkatnya topik tersebut dalam suatu simposium jelas-jelas menggambarkan bahwa dalam keduanya tersebut kita mempunyai permasalahan."Clean Government" lebih mudah dijabarkan walaupun sukar sekali pembuktiannyaakan tetapi "Good Governance" merupakan sesuatu yang tidak terlalu sederhana. Di sini mengukur kebaikan sesuatu permerintahan menjalankan fungsi-fungsinya. Disamping ini terdapat pula permasalahan waktu karena keduanya tersangkut secara kait mengkait melalui perjalanan waktu, dari permulaan tahun 50-an sampai sekarang.

Seperti yang saya sampaikan dalam ceramah saya bahwa "clean and good governance" akan sangat tergantung dari para pelakunya dalam konteks pemerintahan negara. Untuk kita, faktor pegawai negeri akan merupakan topik khusus yang perlu diangkat ke permukaan dalam pemerintahan ini. Secara singkat dapa dikatakan bahwa sejak permulaan tahun 50-an(secara statistik

tahun 1954) pegawai negeri kita adalah underpaid. Dalam suatu negara dimana ada kelompok underpaid yang berat tapi dengan kekuasaan besar dan kontrol yang kurang maka akan tercipta kemungkinan-kemungkinan untuk berbuat curang.

Lebih-lebih lagi bila kecurangan –kecurangan tersebut yang inheren bersumber kepada kenyataan objektif yang perlu sekali diperbaiki, akan tetapi kemudian seakan-akan ditolerir dan dibiarkan berkembang, maka kejadiannya akan lebih parah. Lagipula pada 20 tahun terkahir ini contoh-contoh dalam bentuk KKN(korupsi , kolusi, nepotisme) yang diperlihatkan mulai dari tingkat teratas di pemerintahan dan berkembang ke seluruh lapisan birokrasi. Dalam hal demikian ini maka korupsi dengan dalih menyambung hidup telah berubah menjadi dalam bentuk ketamakan yang meluas.

Disamping ini usaha-usaha untuk memperbaiki ekonomi pribumi telah pula dimulai pada permulaan tahun 50-an di kala pemerintahan di bawah PNI. Terdapat usaha untuk mendorong proibumi memainkan peranannya yang lebih nyata dalam ekonomi dengan diberikan fasilitas-fasilitas khusus. Yang terjadi adalah bukan kekuatan pribumi yan gberkembang akan tetapi fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada pribumi tersebut banyak yang akhirnya jatuh kembali ke tangan para pelaku ekonomi non-pribumi yang memang biasanya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan dialihkan tersebut.

Kalau yang pertama bersumber kepada kekurangan pendapatan yang nyata dan menghadapi kebutuhan hidup yang menaik yang kemudian memburuk karena adanya semacam toleransi, maka yang terakhir sumbernya terletak kepada sikap yang lemah. Sikap yang lemah tersebut yang tidak memperlihatkan adanya daya juang dan ingin mengejar kenikmatan tanpa berusaha, merupakan sesuatu yang jelas tidak terpuji.

Keduanya baik yang pertama maupun yang terakhir mempunyai dampak yang sangat kepada permasalahan "clean and good governance". Dengan demikian maka memperbaikinya tanpa memperhatikan kepada kedua unsur permasalahan tersebut akan sangat sulit.

Kalau segala sesuatu dikembalikan kepada sikap kehidupan kita, maka kesemuanya dapat dikatakan bersumber kepada moralitas yang lapuk. Memang dapat dikatakan bahwa moralitas yang lapuk harus ada sebab-sebabnya kalau kita berpegang bahwa manusia pada dasarnya adalah baik. Akan tetapi ada hal-hal yang menyebabkan kelapukan tersebut. Menemukan hal ini bukanlah sesuatu yang mudah.

Menyadari bahwa permasalahan"clean and good governance" pada dasarnya adalah permasalahan moral dan perbaikannya seharusnya melalui moralitas tersebut, maka penanganannya harus dilemparkan kepada penyelesaian jangka panjang. Perbaikan kaidah-kaidah kehidupan berdasarkan moralitas yang baik akan

dapat terlaksana melalui program-program pendidikan, insentif serta hukuman, disamping secara kontinyu memperbaiki kehidupan secara material.

Jelas-jelas hal tersebut merupakan usaha jangka panjang. Akan tetapi disamping in ada hal-hal yang bersifat jangka pendek. Untuk ini diperlukan kemauan politis masyarakat yang jelas. Hal ini memerluka keteladana dan konsistensi menerapkan kaidah-kaidah kehidupan yang bermoral melalui supremasi hukum. Jelasnya adalah menempatkan orang-orang dalam pimpinan dan birokrasi yang dapat menjadi teladan dan sebagai persyaratan utama agar unsur atau kriteria kejujuran menjadi sesuatu yang sangat menentukan.

Dengan mulai menampilkan wajah-wajah pemimpin yang diambil dari pemuka masyarakat yang dikenal kejujurannya dan membuat kejujuran sebagai unsur yang hidup dan yang secara sadar dikemukakan, maka keteladanan akan dapat ditemukan. Saya percaya bahwa masih terdapat pemuka-pemuka masyarakat dalam kehidupan swasta maupun birokrasi yang masih memenuhi kriteria kejujuran. Bila kesempatan diberikan pada tingkat pertama terutama pada orang-orang demikian ini untuk menjadi pemimpin dan dalam birokrasi, maka suatu langkah awal telah dilakukan.

Dengan demikian marilah kita bersama mulai membina dalam diri kita masing-masing suatu sikap JUJUR dan secara bersama membuat usaha kejujuran dalam masyarakat sebagai gerakan,

maka langkah permulaan yang sangat berarti telah dapat kita lakukan.

Langkah tersebut merupakan langkat perlu dan berlum memenuhi persyaratan cukup. Berbagai hal yang kemudian diajukan dalam tulisan-tulisan yang diberikan dalam makah-makalah berikut ini, akan memberi isi kepada persyaratan –persyaratan selanjutnya.

Panitia dalam menyelenggaraan simposium ini sepantasnya mendapat pujian kita bersama dalam mengangkat permasalahan yang sulit ini ke permukaan sehingga kita semunya menjadi sadar akan segala sesuatu yang harus kita perbaiki bersama untuk kelanjutan kehidupan kita ke masa depan.

Bandung, 13 Oktober 1999

S. Sapiie

PERSEMBAHAN

Kami ingin mempersembahkan buku ini kepada:

1. Ibunda dan Ayahanda kami masing-masing yang senantiasa memberikan doa kepada kami untuk maju dan senantiasa dalam rahmat-NYA
2. Rekan-rekan CIDA(Center for Information and Development Analysis), *Turino Yulianto, Setyo Hartanto, Jose Kharosta, Sudiarto, Lukman, Sidik Setiyadi, Herlina, Ilham, Gulvarendi, Riril M, Bainah Wati, Alex* yang telah mati-matian berusaha menggodok, menelorkan ide dan menghadirkan simposium *Clean and Good Governance* bagi masyarakat.
3. Rekan-rekan di majalah proGRESS-ITB, *Martha, , Adrie, Ivan, Dhani yang sampai pada hari kami menyelesaikan buku ini masih tergolek di rumah sakit di Semarang, Hery,dll.* yang telah turut men*support* dan menyambut baik sejak awal ide ini.
4. Rekan-rekan KOKESMA ITB atas perdebatan dan dukungan fasilitasnya.
5. Mbak Dhini Mentari, Salahuddin Ayub, Pak Jinny A Katuuk, yang telah banyak membantu kami dalam menghadirkan pembicara.
6. Ibu Sri Indah Lestari, Ibu Yasma, Pak Sofyan, yang banyak memberi masukan, dan kritik untuk penyelenggaraan acara ini.
7. Pihak Funding Foundation, sponsor yang telah turut menyukseskan simposium Clean and Good Governance ini.

DAFTAR ISI

Pengantar Penerbit ***iii***

Kata Pengantar (Soedjana Sapiie, Dir. Forum Rektor) ***v***

Persembahan ***x***

Daftar Isi ***xi***

Clean and Good Governance, sebuah harapan ***1***

BAB I

LANGKAH-LANGKAH KONKRET EKSEKUTIF MENUJU CLEAN AND GOOD GOVERNANCE DALAM INDONESIA BARU YANG DEMOKRATIS *7*

1. Menuju Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (Good Governance) ***9***

2. Langkah-langkah konkret menuju "Clean and Good Governance ***13***

3. Presentasi dan Diskusi ***19***

- Suwarno Adi Wijoyo, Ketua DPP PAN
- Khofifah Indaar Parawansa, Ketua DPP PKB

- Slamet Effendi Yusuf, Ketua Pemenangan Pemilu Golkar
- Sesi Tanya Jawab ***29***

BAB II

LEGISLATIF SEBAGAI CHECK AND BALANCE YANG ASPIRATIF *41*

1. Elit Politik, Ketidakpastian Politik dan Logika Gerakan ***42***

2. Presentasi dan diskusi ***50***

- Soedjana Sapi'ie, Direktur Forum Rektor
- Barita Siregar, Anggota FKP MPRRI
- Andre H Pareira, Sekjen Balitbang PDI-P Jawa Barat
- Sesi tanya jawab ***73***

BAB III

TERCIPTANYA SUATU SISTEM HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MAMPU MENDUKUNG JALANNYA KETATANEGARAAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA *94*

1. Terciptanya Suatu Sistem Hukum dan Perundang-undangan yang mampu mendukung

jalannya ketatanegaraan yang bersih dan berwibawa **96**

2. Sistem Hukum dan Pemerintahan yang bersih **99**

3. Presentasi dan Diskusi **111**

- Ismail Sunni, Guru Besar FH UI
- Suryadi Radjab, Sekjen PBHI Bandung
- Sesi Tanya Jawab

BAB IV

PERS DAN NGO SEBAGAI KEKUATAN KEEMPAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN **126**

Presentasi dan Diskusi **127**

- Farid Gaban, Redaktur majalah TEMPO **127**
- Erry Ryana Hardjapamekas, Sekjen Masyarakat Transaparansi Indonesia **131**
- Tubagus Furqon, Pengamat NGO **140**

LAMPIRAN

1. BIODATA **146**

2. Press Release Simposium Clean and Good Governance **153**

3. *GUIDELINE* Simposium Clean And Good Govenance **156**

4. CIDA – Center for Information and Development Analysis **159**

'CLEAN AND GOOD GOVERNANCE',

Sebuah harapan

(Oleh Tim Center for Information and Development Analysis)

Raja dan penguasa, bukankah mereka yang memegang tongkat kebesaran, lambang kedudukan tinggi yang sering dikatakan sebagai pemberian langsung dari Zeus (Socrates)

Kekuasaan absolut, oleh Socrates pada masanya telah ditentang habis-habisan. Secara tegas ia menyatakan bahwa hukum perlu ditegakkan sebagai kontrol terhadap penguasa. Mengutip dalil Lord Acton " Power tends to corrupt, but absolut power corrupts absolutely", menyiratkan betapa sifat kekuasaan yang korup dalam sejarah.

Socrates mampu melihat hal tersebut berabad-abad silam, dan sikapnya terhadap kekuasaan -absolut- masih relevan sampai akhir abad ke 20 ini. Cobalah kita tengok kondisi di banyak negara, termasuk negeri kita Indonesia, masih banyak terjadi hal yang ditentang Socrates. Kita bisa melihat bahwa tingkah laku penguasa jaman orde baru, dimana seorang presiden merasa dirinya adalah seorang Raja – mengambil mitos raja Jawa-, dan tentunya sebagai raja merasa memiliki hak-hak istimewa yang sah sesuai dengan kedudukannya.

Sikap yang berbau kerajaan ini bercampur dengan sistem politik modern, dimana ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Sikap

penguasa khas kerajaan ini berakibat kekuasaan eksekutif seolah menjadi segalanya. Dua kekuatan lainnya yakni Legislatif sebagai wakil - wakil rakyat dan Yudikatif sebagai simbol penegakan hukum, menjadi jauh dari fungsi sebenarnya dan melemah. Dua elemen triaspolitika ini secara sistematis dilemahkan oleh kekuasaan eksekutif. Sehingga yang terjadi adalah pemusatan kekuasaan yang tidak memiliki kontrol atau *check and balance* terhadapnya. Bahkan kontrol dari luar sistem kekuasaan, yakni kebebasan pers, pun dilemahkan. Dalil Lord Acton tidak bisa disangkal, terjadi di Indonesia.

Pemerintahan yang bersih

Saat ini reformasi telah menggelinding di Indonesia. Isu Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menjadi isu sentral, dengan tuntutan kebelakang mengusut tuntas korupsi penguasa orde baru, dan keinginan kedepan mewujudkan *good and clean governance*.

Harapan itu sedemikian besarnya, dan itu ditumpukan pada Pemilu 1999 ini. Sebab di sinilah secara demokratis dapat terpilih wakil-wakil rakyat yang 'benar-benar wakil rakyat', dan diharapkan terpilih presiden / pemerintahan yang ' legitimated'. Dari sana skenario tersebut melangkah lebih jauh untuk menegakkan hukum, menjamin kebebasan pers, sehingga dalam konteks kontrol terhadap penguasa bisa dilaksanakan secara benar.

Reformasi bulan mei 1998 barulah awal, yakni prakondisi yang telah terpenuhi untuk mewujudkan *good and clean*

governance. Dalam skenario pemilu sukses, maka tuntutan itu mesti dijawab oleh pemerintah baru.

Solusi gaya Indonesia barangkali akan muncul di sini. Namun setidaknya kita dapat berkaca dari gaya pemerintahan negara lain dalam mewujudkan *Good and Clean Governance* ini.

Singapore misalnya menerapkan gaji tinggi bagi pejabat tinggi negara dan wakil rakyat, mensyaratkan transparansi dalam kebijaksanaan pemerintah, sanksi hukum yang keras bagi pelaku korupsi, meskipun dalam sisi lain kebebasan pers dan menyuarakan pendapat sangat dibatasi.

Korea juga bisa menjadi contoh yang baik dengan gaya yang lain. Korea menempuh jalan transparansi dalam pemerintahan, dimana wakil rakyat berfungsi sepenuhnya, memberlakukan sanksi keras terhadap pelaku korupsi, dan melindungi hak-hak menyuarakan pendapat dalam demokrasi. Kasus yang paling terkenal adalah di adilinya (dan terbukti bersalah) Roh Tae Woo karena kasus korupsi semasa menjabat sebagai Presiden Korea.

Contoh lain adalah negara adidaya Amerika. Negara ini dikenal dengan penegakan hukumnya. Kontrol hukum yang ketat terhadap kekuasaan, kebebasan pers yang sangat luas, dan berfungsinya legislatif, cukup mengurangi praktik korupsi di Amerika. Secara internal pemerintah Amerika juga memberlakukan pelatihan, audit finansial dan manajemen, dan penyelidikan terhadap pegawai negeri sipil untuk memberantas korupsi di lingkungan pemerintahan. Walaupun tidak sampai *good and clean*, sebab skandal-skandal 'kotor' presiden dan pejabat pemerintahan

hampir selalu ada setiap periode, setidaknya transparansi menjadi prasyarat utama dalam pemerintahan Amerika.

Sedikit ilustrasi di atas tentu tidaklah cukup membuat kita menganalisis bagaimana sebaiknya kita menciptakan *clean and good governance*. Namun inti persoalan yang ingin kita kemukakan adalah *pertama*, korupsi, ketidaktransparanan, ataupun tidak balansnya kekuasaan itu akan selalu ada. *Kedua*, tiap negara mempunyai langkah-langkah strategis untuk menciptakan clean and good governance, berkaitan dengan korupsi, kolusi dan nepotisme yakni demokrasi dalam konteks berjalannya secara penuh kebebasan pers, juga jelasnya pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif , dan yudikatif; adanya transparansi, perangkat hukum yang kuat, UU, kode etik dan sanksi-sanksinya;gaji yang relatif tinggi untuk pejabat negara, atau secara umum standardisasi gaji pegawai negeri sipil; praktik pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan pembentukan badan anti korupsi misalnya, atau mengumumkan kepada publik harta kekayaan pejabat sebelum menjabat dan sesudahnya. Melihat kesemua itu, rasanya Indonesia ibarat kereta yang telah jauh melenceng dari jalur sebenarnya. Pembenahan tidak balansnya kekuasaan, masalah transparansi dan perangkat hukum yang kuat, masalah gaji, masalah praktik KKN internal pemerintahan adalah pekerjaan rumah besar yang menanti pemerintah baru.

Solusi Gaya Indonesia ?

Pada saat ini Indonesia menghadapi persoalan yang kurang lebih mirip dengan Korea dalam hal mengadili mantan Presidennya, dengan tuduhan korupsi, kolusi, nepotisme. Korea mampu

menuntaskan persoalan itu dengan tegas, dengan berpihak pada kebenaran dan keadilan yang ditunjukkan melalui penegakan hukum.Mantan presidennya dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang bisa dipercaya, meski Presiden Kim Young Sam yang berkuasa kemudian memberikan pengampunan. Lantas bagaimana dengan Indonesia ?

Keharusan menegakkan kebenaran dan keadilan, melalui hukum menjadi sangat penting. Dalam jangka panjangpun ketegasan menegakkan hukum akan bermanfaat besar, yakni menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap perlakuan hukum yang setara. Hal ini membuat proses untuk mengadili mantan Presiden Soeharto menjadi krusial.Barangkali yang menjadi kekuatiran adalah merebaknya kekerasan yang mengiringi proses pengadilan mantan presiden Soeharto, lantaran kekerasan -yang terselubung-menjadi salah satu tipikal penyelesaian masalah pada masanya. Kesulitan lain adalah kentalnya budaya 'mikul dhuwur mendhem njero', yang rasanya perlu didobrak.

Dimulai dari diprosesnya pengadilan terhadap mantan presiden Soeharto, pasti harapan besar untuk memulai *good and clean governance* sedikit demi sedikit akan menjadi nyata. Namun itupun belumlah cukup, perlu diupayakan banyak hal untuk mewujudkan *good and clean governance* yang tersebut di atas agar terus berjalan kontinu.

Persoalan menyangkut *clean and good executve, legislative, judicature* tidak hanya terpaku pada penyelesaian kasus korupsi, kolusi dan nepotisme mantan presiden Soeharto. Ada banyak masalah yang mesti kita inventarisir.Dengan demikian pekerjaan

menginvetarisir persoalan besar pada pilar triaspolitika di Indonesia menjadi penting. Kami sudah menguraikannya dalam pengantar tiap BAB dan dapat dilihat sekali lagi pada lampiran *guideline* simposium.

Penyelesaian menyeluruh pada persoalan di atas kiranya akan meletakkan pondasi yang kuat untuk mencapai *clean and good governance*.Kita akan melihat kekuatan riil politik berbicara di sini dan meminjam istilah Pak Soedjana Sapi'ie, pasti terjadi kompromi politik. Mengambil contoh adalah kompromi terhadap ABRI dengan memberi 38 kursi DPR, tidak jelasnya proses pengadilan Soeharto, Wakil-wakil rakyat lama yang tak legitimated masih menghasilkan produk undang-undang.Hal itu menunjukkan kentalnya kompromi politik dari masing-masing kekuatan riil politik. Mungkinkah hal demikian yang kita sebut solusi gaya Indonesia ? Entahlah. Persoalan selanjutnya yang mungkin timbul dari kentalnya gaya kompromi adalah apakah solusi itu mampu membawa kemaslahatan bagi bangsa? ataukah malah memberi contoh buruk bahkan berakibat buruk bagi masa depan bangsa Indonesia ? Di masa depanlah kita bisa tahu jawabnya.

BAB I

LANGKAH-LANGKAH KONKRET EKSEKUTIF MENUJU CLEAN AND GOOD GOVERNANCE DALAM INDONESIA BARU YANG DEMOKRATIS

" Clean and Good Governance " merupakan tuntutan masyarakat Indonesia di era reformasi ini. Bagaimana mewujudkannya, tentu saja harus ada pembenahan sistem pemerintahan Indonesia secara menyeluruh. Dalam negara demokrasi, ada 4 pilar yang dapat menyokong terwujudnya demokrasi di suatu negara, yakni eksekutif, legislatif, yudikatif , serta NGO dan Pers. Keempat kekuasaan itu harus terbagi secara jelas supaya tidak terjadi kewenangan yang satu terhadap yang lain. Permasalahan utama yang selama ini terjadi dan menjadi pemicu krisis yang berkepanjangan dan kehancuran bangsa Indonesia adalah kekuasaan eksekutif yang berlebihan.

CIDA(Center Information and Development Analysis) menginventaris 8 masalah di tingkat eksekutif, yang jika dibenahi akan dapat mewujudkan suatu ***clean and good executive****. Delapan masalah eksekutif tersebut adalah : langkah penyelesaian kasus Soeharto, tidak adanya transparansi harta bekas pejabat, tidak adanya transparansi kebijaksanaan-kebijaksanaan yang menyangkut kepentingan publik, lemahnya tim/badan pengawas korupsi yang dibentuk oleh pemerintah, standar gaji pegawai negeri yang rendah, peran militer dalam penyelenggaraan pemerintah yang sangat besar pengaruhnya, hubungan pemerintah pusat-daerah yang terkonsentrasi di pusat terutama pembagian keuangan, serta banyaknya pasal UUD'45 yang memberi kewenangan terlalu besar pada eksekuti/presiden. Namun demikian penyelesaian masalah di eksekutif tidak lepas dari 3 kekuatan*

negara lainnya. Artinya seluruh sistem pemerintahan negara harus dibenahi secara menyeluruh.

Nah, kembali kepada masalah eksekutif, seperti apakah eksekutif yang ideal itu ? Pun apakah partai partai politik terutama partai pemenang pemilu telah memiliki strategi untuk menciptakan ***clean and good executive*** *?*

MENUJU SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

Oleh : Khofifah Indar Parawansa, Ketua DPP PKB

1. Sistem penyelenggaraan pemerintahan selama Orde Baru telah mengakibatkan pemusatan kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab pada Presiden, baik akibat konstitusi (UUD 1945) maupun tidak berfungsinya dengan baik lembaga tertinggi dan tinggi negara lainnya, serta tersumbatnya saluran partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol sosial.

Akibat terjadinya disfungsi pada lernbaga-lembaga tertinggi dan tinggi negara, serta tersumbatnya kontrol oleh masyarakat, maka pemerintah (Presiden) menjadi sangat Powerfull, tidak terkontrol dan tidak terbatas kekuasaannya. Hal ini yang menjadi sumber otoritarianisme, ketidakadilan, ketimpangan (pusat - daerah, kota - desa, industri - agraris, kaya - miskin, dan sebagainya) maraknya KKN, monopoli tafsir politik, dan lain-lain.

2. Setelah Orde Baru tumbang, dilanjutkan dengan Orde Baru jilid II (masa pemerintahan Habibie). Pemerintahan Habibie yang seharusnya merupakan pemerintahan yang penuh koreksi dan reformatif, karena ia merupakan produk dari gerakan reformasi.

Presiden Habibie sebagai Kepala Pemerintahan tertinggi tidak bisa efektif akibat dalam banyak hal dianggap penerus rezim Soeharto sehingga kurang legitimate. Beban sejarah dan beban politik Orde Baru sangat sulit dilepaskan. Oleh karena itu, dapat dibayangkan bagaimana seorang Habibie dapat mengusut tuntas kasus KKN, khususnya kepada mantan Presiden Soeharto, yang secara eksplisit namanya tercantum pada Tap MPR No. XI/MPR/1998, begitu pula betapa sulitnya - Ia - memberikan ketidaksetujuan atas pemilihan Bupati, Wali Kota, Gubernur (jabatan politis) dan fungsi kekaryaan lainnya dari TNI (dwi fungsi), meskipun tuntutan atas penghapusan fungsi sosial politik TNI sangat kuat.

3. Menjelang Sidang Umum yang akan datang, cukup banyak agenda yang perlu disiapkan secara konstitusional untuk membangun Indonesia Baru melalui perwujudan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance).

Beberapa hal yang dapat digunakan sebagai parameter pemerintahan yang baik antara lain :

a. Penegakan Negara Hukum
b. Pemisahan Kekuasaan Negara
c. Mekanisme sistem kontrol
d. Pemerintahan yang bersih dan kredibel

Keempat hal tersebut antara lain dilakukan melalui :

a. Perubahan UUD 1945
b. Depolitisasi militer

c. Otonomi yang nyata dan luas
d. Pemberdayaan rakyat

4. Penegakan Negara Hukum merupakan faktor penting bagi pembentukan Good Governance. Beberapa hal yang terkait dengan penegakan supremasi hukum ini adalah penegakan HAM dalam kehidupan masyarakat dan negara, revitalisasi budaya hukum, terciptanya sistem judicial yang mandiri, dan peninjauan serta penataan produk hukum yang tidak demokratis.

5. Kekuasaan Negara harus terpisah secara jelas dan fungsional, misal DPA sebagai lembaga konsultatif, BPK sebagai lembaga verifikatif, MA sebagai lembaga yudikatif, Presiden sebagai lembaga eksekutif, dan DPR sebagai lembaga legislatif, masing-masing lembaga memiliki kemandirian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kelima Lembaga Tinggi Negara ini bertanggung jawab kepada MPR, sementara empat Lembaga Tinggi Negara lainnya (kecuali DPR) diangkat, disahkan, dan diberhentikan oleh MPR.

6. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan kredibel, ada beberapa hal yang harus dilakukan, antara lain :
a. Menerbitkan Undang-Undang Sistem Pengawasan Nasional.
b. Lembaga pengawasan internal seperti Irjen, Irjenbang, dan BPKP dibubarkan. Selanjutnya pemerintah dapat menyewa auditor independen untuk melakukan audit pada obyek-obyek yang perlu diperiksa.

c. Seluruh pejabat baik di pusat maupun di daerah sebelum dan sesudah melaksanakan tugasnya harus diaudit oleh akuntan publik independen yang ditunjuk oleh pemerintah dan hasilnya diumumkan secara transparan.

d. Fungsi pengawasan DPR perlu dioptimalkan, sementara hubungan antara DPR dan BPK perlu diintensifkan. BPK harus bersedia menindaklanjuti temuan DPR, dan temuan BPK terbuka untuk publik (transparan).

e. DPA harus transparan dalam memberikan nasihat kepada Presiden. Dengan demikian Undang-undang tentang DPA harus diubah.

f. Hak prerogatif Presiden atas pembentukan kabinet perlu dikurangi, dengan menambah kewenangan DPR untuk ikut memberikan pertimbangan tentang komposisi, pengangkatan dan pemberhentian anggota kabinet.

Jakarta, 17 September 1999

LANGKAH - LANGKAH KONGKRET MENUJU "CLEAN AND GOOD GOVERNANCE"

Oleh Suwarno Adiwijoyo. Ketua DPP PAN

Bertahun-tahun Indonesia merdeka, tetapi hanya melahirkan kekuasaan politik dan ekonomi yang terkonsenterasi pada segelintir orang yang membuat kebijakan-kebijakan yang menyimpang dari esensi cita-cita nasional. Orde Baru yang bertekad untuk memurnikan pelaksanaan konstitusi secara murni dan konsekuen, akhirnya juga menyeleweng jauh dan hanya memperburuk apa yang sudah buruk serta gagal memperbaiki apa yang semestinya diperbaiki. Hingga akhirnya mengalami nasib yang sama, dilengserkanlah Pak Harto oleh para mahasiswa yang hanya bermodal tekad dan keberanian, tanpa bedil dan bom, sebagaimana Bung Karno di tahun 1965.

Memang sebuah krisis seperti kata orang, adalah kombinasi antara bahaya dan kesempatan. Reformasi, selain juga terbiaskan oleh tindakan-tindakan destruktif dan anarkis sebagai akibat jebolnya katup demokratisasi yang tersumbat, akhirnya juga dimanfaatkan oleh banyak pihak. Baik yang tiarap sebelum Pak Harto lengser, maupun yang termasuk dalam rezim Orde Baru. Semua berteriak sebagai reformis, atau telah mereformasi diri. Lebih keras, lebih santun dan lebih manis daripada tokoh

reformasi yang berjuang bersama para mahasiswa, si pelopor gerakan moral reformasi itu sendiri. Hingga akhirnya kita sendiri bingung, apalagi rakyat banyak yang awam, kita masih juga mempercayakan rezim yang semula akan direformasi minus Pak Harto untuk berkuasa dimasa transisi, dan bahkan rakyat juga masih memilih partai Golkar sebagai pemenang Pemilu nomor dua.

Memang reformasi di berbagai sektor kehidupan pun saat ini terus dilakukan, tetapi terkesan lamban, kurang tangguh, hanya menonjolkan retorika politik atau sebagai program populis untuk dapat mempertahankan status quo kekuasaan belaka. Praktek ber-KKN-ria tidak kunjung berhenti, atau semakin menggila serta membuat bangsa Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan. Bahkan negara terancam oleh keruntuhan, sebagai akibat berkembangnya keinginan untuk disintegrasi, banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan dan hidup dengan rasa takut. Takut tidak aman, takut kelaparan dan sakit yang tidak bisa dirawat, takut tidak punya ongkos menyekolahkan anak, takut kehilangan tanah dan rumah. Dunia usaha pun tidak bisa bergerak.

Tetapi sebagai umat beragama, kita harus tetap optimis. Para wakil rakyat pada saat yang tepat, pastilah bukan hanya sebagai politikus tetapi juga negarawan. Sehingga akan mampu memilih Presiden dan Wakil Presiden yang benar-benar konsisten terhadap arah dan tujuan reformasi guna mewujudkan kehidupan Indonesia baru yang bebas KKN, lebih demokratis, lebih berkeadilan dan lebih maju.

Berbicara mengenai Indonesia baru yang demikian, siapapun yang memegang kekuasaan akan memerlukan berbagai upaya

penataan, guna mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih, melalui langkah-langkah yang kongkrit serta mampu menjawab istilah *"how to make clean and good governance,"* di antaranya sebagai berikut:

1. Mengamandemen UUD 1945, agar kekuasaan Presiden tidak absolut, agar masa jabatannya dibatasi maksimal dua periode dan agar kekuasaan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya (DPR, MA, BPK dan DPA) tidak berada di bawah pengaruh kemauan Presiden atau bahkan hanya menjadi tukang stempel dan juru bicaranya. Sebab "kekuasaan" memang cenderung korup dan absolut, yang menjadi salah satu sumber kehancuran suatu bangsa. Bahkan kalau mungkin, mengubah sistem pemilihan Presiden secara langsung, sehingga dapat terhindari dari berbagai upaya terselubung dan intrik-intrik di antara para elit politik.

2. Melaksanakan amanat rakyat sebagaimana telah ditetapkan dalam Tap MPR untuk mengadili Pak Harto serta kroni-kroninya. Hal ini merupakan agenda pertama yang sangat menentukan keberhasilan arah dan tujuan reformasi, untuk mengganti secara total sistem dan tatanan yang menyebabkan mengakamya KKN, si penyebab timbulnya berbagai krisis. Proses pengadilan tersebut bukan hanya untuk penegakan hukum yang tidak diskriminatif dan agar tidak melecehkan kedaulatan rakyat, tetapi juga untuk :

a. Menemukan sistem dan tatanan (peraturan, keputusan dan perundang-undangan) yang membuka peluang KKN, tanpa dapat diproses hukum, agar segera dicabut.

b. Menemukan keluarga dan kroni-kroni yang telah memanfaatkan kelemahan sistem dan tatanan tersebut, agar

segera dilakukan proses hukum dan dilakukan penyitaan terhadap harta kekayaan yang diperoleh secara tidak patut untuk dikembalikan kepada negara.

c. Menemukan pejabat penyelenggara negara yang mengeluarkan tatanan lanjutan dan mendapatkan keuntungan, untuk dapat diproses secara hukum dan dilakukan penyitaan atau paling tidak dapat dicegah keinginannya untuk tetap berkuasa dan mengaku telah berubah sebagai reformis sejati.

3. Mengakhiri berkembangnya proses "Mobutunisasi," yang membuat terjadinya proses pernbodohan rakyat sebagai berikut :

a. Bahwa praktek KKN adalah hal yang biasa dan wajar saja, karena gaji tidak cukup. Sehingga membedakan adanya jabatan basah dan kering di pemerintahan.

b. Memaksa adanya loyalitas semu kepada atasan, akibat ketakutan kehilangan jabatan, yang memberi peluang hidup lebih sejahtera.

c. Menganggap sebagai hak dan adil, bila seorang pejabat yang memperoleh berbagai peluang dan tunjangan yang berbeda-beda. Untuk mendapatkan pelayanan telepon, kendaraan, rumah jabatan, dan BBM, mungkin dengan alasan : "demi kepentingan tugas" masih dapat dimaklumi. Tetapi terhadap kebutuhan rumah tangga, semacam penyediaan air, listrik, pembantu, beras dan lauk-pauk, yang gajinya lebih besar justru dibebaskan.

4. Menciptakan mekanisme pemerintahan yang mampu mencegah timbulnya peluang praktek ber-KKN, di antaranya :

a. Membuat UU mengenai transparansi kekayaan pejabat, yang dapat diaudit oleh Akuntan publik dengan menerapkan sistem pembuktian terbalik.

b. Memperpendek, menyederhanakan, dan melangsingkan hierarchi birokrasi, agar tidak adanya rangkap jabatan fungsional serta menghilangkan dualisme instantsi departemen teknis tingkat pusat dan daerah (Kanwil dan Dinas).

c. Menyusun sistem dan prosedur untuk menciptakan fasilitas kontrol, serta mencegah adanya intervensi terhadap arus pekerjaan, informasi dan dana.

d. Mengembangkan mekanisme pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas aparat pemerintah, antara lain dengan mendirikan "Ombusd-man Office".

e. Menerapkan tender terbuka, dengan menggunakan standard internasional.

f. Mengembangkan dan meng-"up-grade" sistem pembukuan serta pelaporan keuangan, hingga memenuhi standard Internasional.

g. Menunjang kinerja birokrat yang professional dan efisien, antara lain :

Meningkatkan gaji hingga mendekati harga pasar.

Meningkatkan kemampuan teknis manajerial dan kewiraswastaan.

Penegakan disiplin kepegawaian.

Penerapan asas meritokrasi ("penghargaan-promosi berdasarkan prestasi).

5. Melakukan reformasi dan rekonstruksi mental, yang mengacu kepada nilai-nilai etika, semangat dan moral agama sebagai basis integritas pribadi.

a. Mendorong adanya transparansi proses kaderisasi kepemimpinan, yang bertumpu pada sistem dan bukan tersentralisasi pada seorang pemimpin.

b. Mendorong lahirnya kepemimpinan, yang senantiasa memihak kepada kepentingan rakyat banyak, demokratis, komunikatif dan terbuka bagi terciptanya komunikasi dua arah, antara pemimpin dan yang dipimpin.

Akhirnya marilah kita tundukkan kepala kita seraya memohon pertolongan Allah YME, agar sebagai bangsa yang besar kita tetap diberi petunjuk-Nya. Perjalanan dan perjuangan reformasi masih panjang. Namun, dengan kejujuran, kebersamaan, keterbukaan dan kerja keras, Insya Allah tidak ada rnasalah bangsa yang tidak dapat kita tanggulangi.

Jakarta, September 1999

Presentasi dan Diskusi:

1.Soewarno Adi Wijoyo, Ketua DPP PAN :

(LANGKAH-LANGKAH KONKRET MENUJU " CLEAN AND GOOD GOVERNANCE ")

Partai Amanat Nasional merumuskan kondisi-kondisi tentang Indonesia baru, yakni :

1. Bebas KKN
2. Lebih demokratis, artinya pemerintah beserta ABRI dikontrol oleh publik
3. Berkeadilan, akan melestarikan keadaan negara dengan berbagai pulau, etnis, agama, budaya. Keadilan ini meliputi keadilan antara pimpinan dengan bawahan, pusat dengan daerah, dan sebagainya
4. Maju

Upaya untuk membentuk suatu *clean and good governance* sangat strategis menyongsong era baru, terlepas dari siapa yang akan memegang tampuk kekuasaan. Sistem dan tatanan yang dapat menciptakan pemerintahan yang bersih harus dijadikan sebagai petunjuk , bukan *clean governance* yang bermula dari perseorangan ataupun pemimpin tunggal. Sebaliknya, haruslah ada pemimpin nasional dan daerah yang dapat membentuk sistem dan tatanan yang bagus.

Dalam mewujudkan suatu *clean and good executive*, Partai Amanat Nasional memiliki rancangan sebagai berikut :

1. Amandemen UUD'45

Tanpa amandemen UUD'45 semuanya menjadi sia-sia. Fakta-fakta yang selama ini ada adalah presiden berkuasa atas Lembaga Tinggi Negara, sehingga Lembaga Tinggi Negara hanyalah juru bicara kekuasaan yang cenderung absolut dan korup. Untuk itu pembagian lima kekuasaan negara sebagaimana diinginkan *the founding fathers* haruslah tegas, yakni Presiden, DPR, BPK, DPA dan MA.

Membatasi masa jabatan presiden selama dua periode adalah penting.Tanpa itu *non sense,* karena presiden akan memiliki intrik-intrik terselubung agar korupsi oleh elit politik terlindungi. Amandemen harus diajukan ke Sidang Umum MPR 1999, Jika hanya setuju diamandemen maka presiden yang diangkat akan membuat intrik politik dan kemudian mengatasinya dengan membuat TAP-TAP MPR. Hal ini merupakan pelanggaran konstitusi tepatnya pelanggaran Pasal 37 UUD'45 untuk kepentingan penguasa. Untuk itu Sidang Umum MPR 1999 bukan hanya menyetujui diamandemennya UUD'45, melainkan materi-materi seperti ketakterbatasan jabatan presiden, juga Lembaga Tinggi Negara yang harus diangkat MPR semestinya dibahas.

2. Melaksanakan amanat rakyat sebagaimana tercantum dalam TAP MPR, yakni Mengadili Soeharto beserta para kroni. Ini merupakan kunci reformasi, jika tidak maka arah dan tujuan reformasi tidak berguna. Reformasi berarti kita harus mengubah sistem dan tatanan penyebab KKN, tidak hanya bagaimana suatu hukum itu non diskriminasi, melainkan menemukan sistem dan

tatanan penyebab KKN yang merugikan rakyat. Termasuk dalam hal ini menyingkap kroni dan keluarganya. Pengadilan akan memilih atau menyebutkan kroni yang merusak tatanan yang selama ini tidak terjerat hukum. Sampai sekarang oleh Presiden Habibie agenda reformasi itu belum dilaksanakan, dan ditutup dengan isu insidentil yang bertumpuk-tumpuk, ditumpuk oleh masalah yang *diblow up* oleh pers. Bank-bank yang mendapatkan dana 800 trilyun dari BLBI, Andi Ghalib, Timor-Timur, dan terakhir Baligate. Kita semua tertipu, seharusnya sistem dan tatanan direformasi, tapi yang menang nomor 2.

3. Penghilangan mobutunisasi,

Seperti kasus oleh Presiden Zaire, gaji PNS dibuat kecil sehingga tidak dapat hidup. Akhirnya mereka mencari tambahan dan diberi tunjangan yang besar agar loyalitas semu tumbuh. Mobutunisasi merupakan penyebab suburnya KKN., sehingga korupsi menjadi budaya. Istilah mobutunisasi mula-mula adalah Soehartonisasi, yakni sistem dan tatanan yang menyebabkan rakyat menjadi korup. Namun istilah ini tidak populer karena rejim Orde Baru jelas akan memberangus ide seperti ini. Maka istilahnya diganti menjadi mobutunisasi.

4. Menciptakan mekanisme pemerintahan yang mencegah timbulnya KKN, antara lain :
   a) Transparansi kekayaan pejabat dengan pembuktian terbalik. Selama ini pengadilan dengan menggunakan asas praduga tak bersalah susah dilakukan pemeriksaan, karena dapat saja pejabat A membuka rekening di bank atas nama B tapi yang mengetahui nomor PINnya hanyalah pejabat A.

Sehingga pejabat A lah yang dapat mengambil uang tersebut dan pengadilan akan susah membuktikan bahwa pejabat A memiliki sejumlah kekayaan di bank tersebut.

b) Birokrasi yang mudah dan sederhana karena birokrasi banyak membuka peluang untuk memotong informasi dan dana.

c) Menciptakan sistem dan prosedur yang berfungsi sebagai fasilitas kontrol.

d) Adanya mekanisme pengaduan masyarakat terhadap perlakuan pemerintah. Tidak hanya dengan model seperti PO BOX 5000 melainkan lewat institusi atau lembaga penerima pengaduan.

e) Adanya tender terbuka yang memenuhi standar internasional.

f) *Upgrade* sistem pembukuan dan pelaporan keuangan sesuai standar internasional.

g) Gaji Pegawai Negeri Sipil dan ABRI disesuaikan dengan standar pasar, dan tentu saja tanpa adanya korupsi.

h) Melaksanakan reformasi dan rekronstruksi mental yang mengacu pada nilai-nilai etika, moral, semangat agama sebagai semangat pribadi. Untuk itu perlu adanya transparansi proses kaderisasi kepemimpinan. Yakni kepemimpinan yang memihak rakyat banyak, demokratis, serta aspiratif.

2.Khofifah Indar Parawansa,Ketua DPP PKB:

MENUJU SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

1. Untuk membersihkan executive tidak terlepas dari pembersihan di legislatif. Selama ini yang menjadi biang masalah dalam pemerintahan Indonesia adalah amandemen UUD'45. Tanpa itu tidak akan terjadi perubahan yang siginifikan. Untuk itu harus ada perombakan yang tidak hanya melibatkan eksekutif tapi juga lembaga-lembaga terkait. Bagaimana membentuk pemerintahan yang bersih jika BPK tidak bertaring, hanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Pengawasan internal secara obyektif susah dilakukan karena BPKP serta Irjen terikat oleh lembaga di departemennya. Anggota BPK yang berjumlah tujuh orang dan berfungsi sebagai pengawas eksternal, seharusnya memeriksa hasil audit dari pengawas internal secara transparan sebagai dokumen publik. BPK selayaknya ditugaskan oleh DPR berdasarkan hasil penemuan DPR. DPA seharusnya memberi nasehat secara transparan. BPK harus menjadi lembaga verifikasi Baligate, Lippogate, Aceh, Timor-Timur seharusnya mendapatkan nasehat dari DPA..DPA sudah saatnya direposisikan kembali sebagai lembaga konsultasi, dan bukan wadah akomodasi politik..Selama ini yang terjadi adalah DPA hanya memiliki politisi, bukan negarawan. Jika ada permasalahan tentang hukum maka DPA akan memanggil pakar hukum. Pembahasan mengenai masalah ekonomi akan

mengundang pakar ekonomi. Seharusya DPA dipenuhi oleh para *expertise* (pakar), dan bukan sebagai wadah akomodasi politik. Bukankah kalau begitu Presiden dapat mengangkat staff ahli presiden ? Mungkin akan lebih baik jika DPA dibubarkan supaya tidak banyak anggaran yang harus dikeluarkan oleh negara. Dalam UUD'45 DPA bukanlah juru bicara presiden. Jika memang sepakat ada DPA maka harus ada Undang-undang tentang DPA sehingga DPA tidak lagi memberikan nasehat ke presiden secara tertutup, DPA seharusnya diangkat MPR. DPA harus memberi nasehat secara transparan dan kinerja DPA akan terukur oleh masyarakat dan MPR. MPR memiliki kewenangan atas Lembaga Tinggi Negara, MPR mengangkat, mengesahkan serta memberhentikan para anggota Lembaga Tinggi Negara tersebut. Dalam pemilihan hanya DPRlah yang tidak dipilih oleh MPR karena dipilih melalui pemilu. BPK, DPA, MA dan DPR tidak bertanggung jawab karena tidak ada parameter untuk mengukur kinerja para anggota Lembaga Tinggi Negara. Yang ada hanyalah penilaian subyektif, maka supaya dapat terukur dalam pengangkatan anggota Lembaga Tinggi Negara haruslah ada tugas pokok sehingga ada teguran berdasarkan tugas pokok tersebut. Hal ini menjadi pintu masuk untuk menuju eksekutif yang bersih. Pasal 1 menyebutkan lain, Pasal 2 diangkat, Dengan bertanggungjawabnya Lembaga Tinggi Negara kepada MPR maka tidak akan tergantung kepada eksekutif. Pengesahan oleh presiden akan memberikan kendala psikologis

pada aparat Lembaga Tinggi Negara. Kalau dilepaskan mereka akan melakukan fungsi kontrol dan akan mandiri.

2. Penegakan supremasi hukum harus masuk dalam batang tubuh UUD'45. Indonesia adalah negara hukum sehingga harus menyandarkan semua permasalahan yang ada di negara ini pada tatanan perundang-undangan. Tidak berdasarkan subyektivitas penguasa, yang mana asas pembuktian terbalik tergantung *political will* pemerintah. Undang-undang tentang narkotika mengandung terobosan baru yakni jaksa tidak harus mengetahui semua tuntutannya.
3. Kekayaan pejabat pusat maupun daerah diaudit secara transparan. Contoh bagus adalah di negara Australia. Sewaktu Partai Buruh kampanye, ada model sumbangan diumumkan lewat koran. Apa kebijakan yang akan menguntungkan pihak pemberi sumbangan ? Ini dapat diterapkan di Indonesia. Ada LSM yang mendokumentasikan dan dipublikasikan. Ada *priviledge*. Ada bentuk kontrol masyarakat berdasar informasi.

Hak perogratif presiden dibatasi meskipun sistem kabinet yang ada adalah kabinet presidentil. Menurut PKB tidak begitu saja presiden berhak memutuskan kabinetnya, tapi atas pertimbangan DPR. Ada departemen baru maupun departemen yang dihilangkan haruslah atas pertimbangan DPR. Contoh : usulan adanya departemen maritim karena 2/3 wilayah Indonesia adalah laut tapi tidak tersentuh. Cukup banyak keinginan sehingga presiden tidak dapat memutuskannya sendiri. Begitu juga dengan personalianya, mereka harus memiliki tingkat akuntabilitas publik yang lebih

tinggi dari yang lalu sehingga kabinet tidak meninggalkan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama DPR. Selama ini rapat kerja DPR dengan menteri tidak memiliki daya ikat. Diharapkan nantinya komisi DPR dapat melakukan uji saring terhadap personalia kabinet, sehingga pertanggungjawaban juga terhadap DPR, tidak semata presiden(pemegang kekuasaan)

3.Slamet Efendi Yusuf, Ketua Pemenangan Pemilu GOLKAR:

LANGKAH-LANGKAH KONKRET EKSEKUTIF MENUJU CLEAN AND GOOD GOVERNANCE DALAM INDONESIA BARU YANG DEMOKRATIS

Istilah *Clean and Good Governance* pada awalnya berkembang pada tahun 90-an. Dahulu yang muncul adalah istilah *strong and clean governance.* Namun yang kemudian terbentuk hanyalah unsur *strong.* Adanya *strong governance* ini diakibatkan dari dua hal. **Pertama**,dari sisi-sisi praktis yakni Soeharto dan militer (ABRI) merupakan penguasa yang tidak dapat dikontrol oleh publik. **Kedua**, dasar konstitusi Indonesia yang memungkinkan presiden memiliki berbagai jabatan yakni Kepala Negara, Mandataris MPR, serta Panglima Tertinggi ABRI. Konstitusi ini didukung oleh partai yang ada pada saat itu. Hal itu merupakan kesalahan masa lalu, dosa yang dapat diatasi dengan berupaya memperbaikinya.

Good governance dapat terwujud melalui :

1. Aturan negara tidak tersentralisasi pada aturan baku/kaku , yakni tanpa ada prakarsa

2. Adanya unsur *entrepreneurship,* penciptaan upaya baru agar dapat membiayai dan tidak makan modal sehingga kegiatan korupsi dapat ditekan.

Sedangkan untuk dapat mencapai *clean governance* ada langkah-langkah yang dapat dilakukan, yakni :

1. *Membangun hal yang terpenting.* Pembangunan tidak hanya berdasar pada kebaikan sifat manusia, melainkan pada sistem yang kondusif. Ini karena kehendak untuk berkuasa pada manusia sangat kuat yang kemudian diatasi dengan upaya untuk membersihkan diri. Mendirikan rumah piatu, jalan-jalan ke Eropa kemudian Umroh, mengadakan pengajian d rumahnya, semuanya merupakan upaya yang banyak dipaka pejabat untuk membersihkan diri (*sin laundring*). PTI (Perguruan Tinggi Islam) dibiayai Ibnu Sutowo. Sebagai kompensasinya kita tidak boleh percaya pada sifat baik manusia, melainkan pembenahan pada sistem yang bertujuan mewujudkan struktur negara yang berkeseimbangan.
2. *Kekuasaan eksekutif (terutama presiden) dibatasi.* Pembatasan dilakukan dalam kerangka waktu dan kewenangan. Dalam hal waktu, puncak kekuasaan yang diduduki seorang eksekutif tidak boleh terlalu lama. UUD'45 diterjemahkan semau kita dengan istilah boleh dipilih kembali. Sidang Istimewa MPR kemarin telah menghasilkan TAP MPR yang menyatakan tentang pembatasan jabatan presiden sebanyak 1 periode plus satu kali. Ke depan nanti bukan hanya dalam TAP MPR tapi dalam konstitusi yang diamandemen.

3. *Distribusi otoritas pusat-daerah yang berimbang.* Kenapa bangsa kita terjebak pada masalah eksistensi Indonesia seperti masalah Aceh, Ambon, Kaltim, Riau, Timor-Timur. Yang terakhir mengandung kontroversi menurut hukum Internasional. Semua masalah tersebut timbul karena distribusi otoritas yang tersentralisasi pada satu orang. Adanya UU 22 tentang Pemerintahan Daerah, UU 25 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah, diharapkan kedua undang-undang tersebut akan menjamin demokratisasi karena ada distribusi otoritas berdasar aspirasi daerah Tidak ada sentralisasi perencanaan pembangunan oleh Bappenas. Bupati harus menyuap supaya proyek turun. Belum lagi dalam masalah pemilihan Gubernur dan Bupati. Pemilihan calon gubernur selama ini diajukan, ditentukan dan diseleksi oleh DPRD yang disebut bakal calon. Pusat kemudian memilih 3 calon. Jika DPRD nantinya memilih gubernur yang tidak berdasar skenario Pusat, maka gubernur itu tidak akan disetujui (dilantik). Sekarang, jika Undang-undang di atas diberlakukan maka DPRDlah yang mencalonkan. Presiden hanya sebatas dekonsentrasi atau hanya memberikan konsultasi, sedangkan kewenangan mutlak pada DPRD. Dengan demikian demokratisasi akan berjalan karena adanya distribusi kekuasaan dan kewenangan pusat – daerah. Harus ada persyaratan untuk melaksanakannya, dan selambat-lambatnya 2 tahun dapat berjalan.

Termasuk dalam masalah distribusi adalah distribusi hasil alam. Dalam hal pertambangan minyak, berapa persen pemasukan untuk daerah. Arun merupakan kompleks yang

gemerlap, namun di belakangnya banyak rakyat yang miskin sehingga (tidak salah) Lhokseumawe marah. Kalimantan Timur, apa yang tidak dimiliki oleh daerah itu ? Namun Kaltim sangat miskin karena semua hasil alam (kekayaannya) ditarik ke pusat. Dalam hal demokrasi politik pun, jika kita ingin berkarier di pusat tergantung dari opini daerah karena sistem pemilu yang akan digunakan untuk masa mendatang adalah sistem pemilu distrik.

4. *Pengawasan.* Tidak dipercayakan saja pada lembaga pengawasan seperti BPK, DPR melainkan pada lembaga sosial. Dengan demikian ketika kurang berfungsi pun, dengan adanya gejolak atau tekanan dari pengawasan lembaga sosial maka lembaga pengawasan dapat bersuara kembali. Untuk itu lembaga masyarakat yang ada harus diperkuat. Peran pers, LSM, partai politik harus dioptimalkan supaya *clean governance* tercipta. Organisasi kemahasiswaan harus diperkuat dan berperan secara jernih.

Sesi Tanya Jawab

1. Abdul Jalil (S2 UNPAD):

Menyangkut satu dilema dalam 8 masalah eksekutif , standar gaji PNS yang rendah ada beberapa fakta tentang PNS

1. Jumlah PNS lebih dari kebutuhan
2. Gaji tidak layak
3. Volume kerja PNS kurang dari jam kerja yang seharusnya

4. Status PNS tetap, resiko kecil sekali untuk diberhentikan

Saran saya adalah kita adakan penelitian dan penelusuran perampingan PNS supaya optimal kinerja PNS. Demikian pula Gaji PNS sewajarnya sesuai kinerja, sebab selama ini tingkat pendidikan berbeda namun gaji sama. Ini harus disesuaikan dengan biaya hidup yang wajar (umum) plus tabungan (sesuai kinerja). Kondisi PNS dievaluasi, diminta mengundurkan diri jika tidak mampu.Saya kira kalau gaji cukup maka kerja akan baik sehingga akan " clean and good "

2. Akram (S2 UNPAD) :

Saya pesimis akan masa depan bangsa,karena calon penguasa (presiden, red.)sepertinya kurang baik, PDIP punya kasus tentang DPRD DKI.

1. Apakah cara-cara politik hanya pada saat bakal jadi pemimpin,sesudahnya itu tidak. Ada tendensi partai moralis malah tidak mendapatkan suara, apakah hanya akan terus seperti itu ?
2. Saya menaruh kecurigaan bahwa partai yang berkuasa masih dipegang Soeharto, sebab mengapa partai berkuasa tidak mengadili Soeharto ?

3. **Arief (UNFREL Bandung) :**

" Clean and Good Governance " itu merupakan proses, bukan tujuan. Negara Singapura menempatkan " Clean and Good Governance " sebagai tujuan, sehingga proses demokrasi diam di

tempat. Pemerintahan yang bersih dan berwibawa itu harus memiliki proses yakni check and balance, bukan pembahasan pada manajerialnya. Secara substansial masyarakat Indonesia masyarakat tersumbat aspirasinya, mari disusun *bareng* dan berharap CIDA & proGRESS yang dapat menyelenggarakan acara di hotel semewah ini, kita mesti berada di extra parlemen akan terus melakukan *balancing* terhadap executive lewat jalan., Kita akan terus melakukan *pressure* dengan membentuk istilah *parliament watchdog*, akan kita lihat peran sospol ABRI. Buat Bapak Soewarno, jika TNI mau melakukan reformasi maka agendanya harus jelas, tuntutan menarik sospol ABRI di DPR dan dimanapun harus dilaksanakan.Untuk Bu Khofifah, contoh di Australia dapat diterapkan oleh PKB, bolehlah untuk mendukung Mega. Poros tengah silakan terus untuk melakukan proses demokratisasi. Substansi dari clean terletak pada proses, bukan hasil (final)nya. Jangan terjebak pada kondisi yang dinamakan pabelieut atau ruwet.

Tanggapan Soewarno Adiwijoyo :

Pada awal tadi saya tidak menyerang kelompok lain karena saya berbicara untuk membawa agar fokus tertuju pada clean and good governance. Golkar telah memukuli di depan sehingga tidak dapat dipukuli. Golkar sedang cuci dosa ke TNI dan birokrat, tapi ujung-ujungnya adalah tetap untuk mempertahankan kekuasaan. Ini terbukti dengan dukungannya terhadap Habibie dan ini merupakan suatu kebohongan. Ironisnya rakyat serta mahasiswa

terpengaruh. Ada *money politics* ataupun tidak Golkar tetap nomor 2. Saran saya adalah agar mahasiswa mengubah strategi perjuangan dari demonstrasi yang tidak disukai karena menimbulkan ketidaktentraman menjadi turun ke bawah(turba), turun ke desa untuk mengarahkan(membawa) pada arah dan tujuan reformasi. Tapi karena tidak, atau dengan cara-cara lama seperti demonstrasi, maka hasil pemilu seperti sekarang ini.

Agenda PAN adalah melipat Golkar dan ubah rejim tersebut. Golkar dapat diganti siapa saja supaya rejim berubah. Tapi mahasiswa terpengaruh oleh kebohongan sehingga PAN terhujat menjadi nomor 5. Sehingga kita tetap status quo meskipun dengan uang rampokan. Golkar dibentuk ABRI untuk mengatasi instabilitas politik. Untuk mengatasi(melawan) PKI beserta pengaruhnya. Tapi belakangan Sudharmono, Siswono Yudhohusodo, serta Sarwono Kusumaatmadja, tidak mau dikendalikan sehingga ABRI dan KORPRI dijadikan sebagai pendukung. Semula Golkar dimaksudkan untuk stabilitas politik, tapi Soeharto ingin berkuasa selama 5 periode. Saran CSIS TNI janganlah sampai mengancam kekuasaan. Maka dipilihlah minoritas dari TNI yakni Benny Moerdani sehingga KKN tumbuh subur karena secara proporsional dalam pengalamannya belum pernah menjadi Pangdam. ABRI menjadi semakin *memforce* dengan memakai intelijen dan tempur untuk mempertahankan kekuasaan. TNI menginginkan kekuasaan tidak secara terus-menerus. Lihat saja Haryoto, Kasospol ABRI yang dicopot gara-gara tidak mau Pak Harto menjabat untuk keenam kalinya. Saya juga digeser 2 tahun sebelum pensiun. Yang teriak-teriak pun ada sehingga direcall,

yakni Sembiring dan Samsudin. Tapi kalian tidak ada yang teriak-teriak. Ada yang tidak suka, kasus Bambang Warih, tapi tidak ada yang teriak-teriak dan membelanya. Amien Rais dan mahasiswa bersatu untuk dapat melengserkan Soeharto.

Tentang TNI, jangankan kemarin, sekarang saja kita lihat ketika pemilihan Ketua DPRD DKI. Katanya reformasi dengan TNI paradigma baru adalah mendorong demokratisasi, bukan wakil rakyat yang dipilih. Tapi kok masih ada yang menjadi ketua DPRD(DPRD I DKI), TNI mendapat 41 suara dengan 21 suara dari PDIP dan 20 suara dari Golkar. Ini bukanlah suatu perubahan, sehingga kita jangan mau ditipu Golkar putih dan Golkar hitam,kecuali poros tengah. Lalu masalah DPRD Riau, Kasren sebagai Gubernur Sumbar mengundurkan diri sewaktu Kasren membiarkan demokratisasi berjalan dengan tidak mengindahkan arahan dari pusat, tanpa memikirkan bahwa calon dari pusat adalah ABRI (ketika itu Pak Rekto) sehingga Kasren digusur menjadi guru Akmil di Magelang. TNI tidak sama dengan Golkar, karena dalam tubuh TNI ada nilai juang, TNI tidak suka di*blow up*. Ada kekuasaan yang dilakukan baret merah, oleh intelijen dan tempurnya yang lebih menonjol daripada sospol dan teritorial. Ini adalah *uneg-uneg* saya kepada Golkar dan teman-teman yang tidak konsisten terhadap arah reformasi.

Untuk menjawab pertanyaan saudara **Abdul Jalil,** gaji PNS rendah ini adalah pola mobutunisasi yang digunakan Soeharto untuk mempertahankan KKN. Hal ini dapat berhenti jika KKN hilang. Tanpa itu gaji yang besar bukan jaminan untuk tidak adanya KKN. Pemberantasan KKN haruslah lewat sistem dan

tatanan lewat peraturan perundang-undangan dan keppres. KKN dapat dibongkar bila proses pengadilan Soeharto dilakukan sehingga kita dapat mengetahui bagian sistem yang menyebabkan KKN.

Untuk saudara **Akram, P**emimpin di Indonesia tidak didukung rakyat tapi mengangkat dirinya sendiri. Ini merupakan hal yang aneh karena ada pemimpin yang tidak didukung rakyat minta 1 kursi. Ini merupakan sandiwara yang tidak lucu yang menunjukkan betapa menyedihkan karena menganggap diri sebagai pemimpin dan menuntut hak untuk mendapatkan kursi kepemimpinan.

Saya mengusulkan adanya *check and balance*. Saya sepakat dan ini salah satu dari (merupakan) agenda pertama yakni amandemen UD'45 yang akan diperjuangkan oleh PAN. Kita seharusnya tidak setuju dengan pengelabuan lewat pengeluaran TAP MPR karena merupakan pelanggaran undang-undang dasar. Apakah nantinya dalam amandemen dibahas Lembaga Tinggi Negara melakukan *check and balance* ? Untuk itulah sistem harus diperbaiki.

Kapan kita memilih wakil rakyat yang benar ? Kesulitan di Indonesia adalah demokrasi belum berjalan dengan baik sehingga harus lewat turun jalan sebagai pressure. Turun ke jalan seharusnya bukan jalan terakhir yang harus dibudayakan, melainkan cara untuk memilih wakil rakyat yang memperjuangkan aspirasi rakyat. Perbedaan aspirasi politik tidak dengan *tonjok-tonjokan*, apalagi *tonjok-tonjokan* hanya untuk duduk di parlemen. Oleh karena itu pemberdayaan sipil harus ditingkatkan. Dalam

usulan tentang GBHN terdapat memberdayakan upaya wajib bela negara sehingga wajib militer wajib diberdayakan supaya pemerintah tidak sombong. Bukan menwa, hansip, wanra, ratih yang *petenteng* melebihi TNI. Wajib militer berjangka 2 tahun dan setelah itu menjadi sipil kembali. Sehingga nanti bila ada pemilihan Bupati haruslah dijabat orang yang mengetahui masalah keamanan maka sipil pun dapat berkompetisi.

Masalah dwifungsi ABRI, PAN mengusulkan agar tidak wakil ABRI di DPR dan MPR. Tapi untuk menghargai partai lain (PDIP dan PKB) maka ada toleransi dengan syarat kurang dari 20 atau sekitar 15. Tapi yang terjadi adalah wakil ABRI berjumlah 38, yang berkemungkinan untuk menjadi ketua. Kita mengharapkan jangan sampai mereka menjadi pimpinan. Abdurrahman Wachid diterima oleh semua golongan, meskipun beliau masih ragu apakah Amien Rais berbohong. Tapi Amien Rais rela karena urutan kursi PKB lebih tinggi daripada PAN. Amien Rais tidak suka TNI, tidak suka Soeharto, tidak suka PDIP, apalagi Golkar,maka Amien Rais mendukung Abdurrahman Wachid.

Ini akan berdampak positif terhadap umat Islam yang sampai sekarang terpecah antara NU dengan Muhammadiyah. Sejarah telah menunjukkan bahwa Islam sejak Belanda telah dipecah dan sampai Orde Baru pun masih dipecah juga. Ada yang masuk Golkar. Kalau sekarang PKB. Dulu ada PPP dan dalam tubuh PPP terjadi gontok-gontokan. Dwifungsi ABRI akan dihapuskan dan TNI intinya adalah melindungi masyarakat dan tumpah darah. TNI tidak akan mendominasi *poleksosbudhankam*, tapi yang terjadi di Jakarta adalah *non sense* (omong kosong). TNI

yang seharusnya mereformasi diri tapi mengapa memilihnya ? Wakil partai bukan seorang politikus tapi haruslah seorang negarawan.

Tanggapan Khofifah Indar Parawansa:

Check and balance akan terjadi jika terbentuk *strong society and governance*. Jika lemah maka pemerintahan akan sulit memberikan suplai atas apa yang diminta atau dibutuhkan masyarakat sehingga akan terjadi instabilitas. Pengertian stabil tidak harus dikaitkan dengan hankam melainkan kondisi stabil perlu dilakukan untuk suasana yang kondusif. *Strong society* dapat tercipta lewat pemberdayaan masyarakat. Tidak bisa jika yang terjadi elit,ada simbol-simbol yang berpengaruh pada masyarakat untuk menentukan pilihan. Dalam memilih partai bukan menekankan pada masalah kualitas melainkan lebih cenderung karena persoalan personal, seperti kharisma, agama ataupun persoalan emosi masa lalu. Untuk itu perlu adanya proses sosialisasi politik yang lebih matang. Pemilu kemarin sangat singkat untuk melakukan sosialisasi secara baik. Masyarakat yang memiliki informasi dapat mengidentifikasi partai pilihannya berdasarkan informasi tersebut, sedangkan bagi yang tidak memiliki maka pilihan berdasarkan faktor agama atau faktor historis.

Persoalannya adalah apakah Presiden keempat akan sama ? Situasi telah berubah karena *strong society* makin terbentuk. Kontrol masyarakat akan kuat jika DPR kurang mampu memberi perimbangan kepada eksekutif. Dalam beberapa hal *parliament watch* sudah memberikan kontrolnya, begitu pula dengan daerah.

Penguasa tidak akan dapat memonopoli tafsir yang sebelumnya begitu mudah. Dahulu secara *top-down* kebutuhan masyarakat ditentukan dan diindentifikasi oleh pusat sehingga yang terjadi adalah sentralisasi. Kenyataan ini terjadi karena elemen-elemen terkooptasi oleh superpower. Adanya UU No. 22 dan UU No. 25 tahun 1999 meskipun terkesan masih setengah hati namun memberikan kemungkinan adanya ruang gerak bagi daerah untuk berinisiatif. Kreativitas PNS yang selama ini sulit dilakukan karena harus menunggu petunjuk dari atas, ditambah lagi karena persoalan mengenai lemahnya kinerja birokrat sipil, mulai nampak.

Sebagai contoh Komisi II DPR, BAKN belum memiliki daftar susunan mengenai besarnya kebutuhan pegawai di Indonesia. Ada lembaga yang *overload* sedangkan di daerah kekurangan *(lost generation)*. Departemen Keuangan pegawainya berlebih sedangkan di Sulsel terjadi kekosongan. Adanya *zero growth* menyebabkan terjadi 58% kekosongan di Sulawesi Selatan selama 5 tahun, Perencanaan oleh birokrat sangat buruk dan terjadi konflik yang sangat tinggi di kalangan elit. Apabila TNI hanya berfungsi dalam hal pertahanan, maka sipil harus dapat mengkonsolidasi diri supaya TNI tidak muncul lagi sebagai juru damai. Sipil harus menutup rapat-rapat akan kemungkinan tersebut. Peran TNI dalam ekonomi sangatlah luar biasa. Kondisi ini telah dimulai sejak adanya nasionalisasi perusahaan Belanda sehingga sebenarnya cukup banyak keterkaitan antara peran ekonomi dengan politik. Peran ekonomi yang tinggi ini adalah akibat legitimisi dan *priviledge* dari peran politik TNI. Penelitian seorang civitas akademika UGM menunjukkan bahwa aset

kekayaan seorang TNI sangatlah besar karena mereka begitu *powerfull*, sedangkan sipil tidak dapat seperti itu.

Tentang gaji PNS tetap harus ada standar moralitas karena standar kecukupan akan berbeda-beda untuk setiap manusia. Data-data tentang kemiskinan yang selama ini dikeluarkan Bappenas telah banyak dimanipulasi, sehingga kita sepakat untuk menentukan gaji PNS dan TNI secara proporsional.

Tentang Pemilu, sistem pemilu yang bakal digelar adalah *mixing* antara proporsional dengan distrik, sehingga memunculkan pertanggungjawaban publik. Dalam undang-undang sekarang, minimal ada pasal yang memungkinkan rakyat untuk menagih pertanggungjawaban wakilnya, misalnya untuk direcall dan masing-masing wakil rakyat memiliki wilayah *konstituen*. Mekanisme demikian akan berjalan meskipun agak sulit untuk semua wilayah, lebih-lebih daerah yang kurang mendapatkan informasi haruslah dilakukan pendekatan sistemik.

Tanggapan Slamet Effendi Yusuf :

Calon penguasa memiliki ciri-ciri yang buruk makin membenarkan bahwa kepemimpinan janganlah tergantung kepada kebaikan personal melainkan pada sistem yang akan memelihara kebaikan pemimpin tersebut. Filsafat kekuasaan telah menyebutkan bahwa kekuasaan cenderung menyeleweng. Menurut Lord Acton, makin absolut suatu kekuasaan maka makin koruplah kekuasaan tersebut. Demikian juga pendapat Sanghyang Machiavelli, Hobbes. Machiavelli merumuskan tentang tabiat buruk kekuasaan, yakni adanya *temptation* untuk berkuasa. Untuk itu

kita harus membangun pada sistem. Krisis merupakan laknat dan selayaknya kita menjadikan krisis sebagai momentum untuk melahirkan bangsa. Amerika pun pernah mengalami *born* and *reborn*, situasi yang *up-down*, terdapat penguasa yang bersih maupun korup. Ada peristiwa *Clux-clux clan*, ada clash antara demokrasi dengan hierarki, dan lain sebagainya. Membangun sistem yang memungkinkan *check and balance* haruslah dikedepankan karena moralitas nilai agama menunjukkan bahwa yang umroh pun belum tentu tidak berkorupsi.

Golkar mengalami pergulatan yang luar biasa tentang calon presiden. Habibie mendapat dukungan yang sangat besar dari DPD-DPD. Golkar dengan pencalonan Habibie memiliki target kemenangan pemilu sebesar 42% tapi hanya mendapatkan 27 % kursi. Oleh karena itu ada empat alternatif dalam rapim Golkar bulan Oktober, yakni :

1. Presiden dan wakil presiden adalah hasil rapim
2. Presiden dari partai lain,
3. Presiden bukan dari Golkar tapi wakil presiden berasal dari Golkar.
4. Golkar tidak berada dalam pemerintahan melainkan sebagai oposisi

Hal yang signifikan adalah elit politik (sipil dan TNI) harus dapat berpikir jernih dalam Sidang Umum MPR. Ini merupakan liku-liku politik , misalnya PAN mendukung Abdurrachman Wachid.

Ada kesulitan pada orang yang pernah dekat dengan Soeharto. Pendapat Habibie tentang Soeharto dalam wawancara

pada awal '90-an adalah Soeharto merupakan guru besarnya dalam hal politik. Meskipun TAP MPR menugaskan Habibie untuk melakukan sesuatu (pengadilan, red.) namun Habibie masih kebingungan untuk megumumkan. Muladi mengatakan bahwa kabinet akan menentukan status hukum Soeharto. Ini jelas tidak mungkin, karena yang menentukan status hukum seseorang adalah yudikatif. Jadi kita menunggu rapim Oktober. Golkar mencalonkan Habibie karena malu untuk mundur. *Onward, no retread.* Jangan salahkan Golkar. Jika ada situasi seperti itu, dukunglah partai lain, jangan dukung Golkar.

BAB II
LEGISLATIF SEBAGAI CHECK AND BALANCE YANG ASPIRATIF

Pemilu 7 Juni 1999 telah kita lewati bersama, dan telah dapat dikatakan menghasilkan wakil-wakil rakyat yang ***legitimated.*** *Namun itu tidak serta merta menyelesaikan semua permasalahan bangsa ini. Legislatif kita masih jauh dari harapan untuk menjalankan fungsinya sebagai check and balance maupun wakil rakyat yang aspiratif.*

32 tahun adalah waktu yang cukup lama bagi orde baru untuk bisa meninggalkan persoalan-persoalan kronis bagi masa reformasi ini. Kami menengarai 8 masalah legislatif yang perlu segera diselesaikan yakni (1) pemilihan wakil rakyat yang tidak langsung, dan masih tidak bersih, (2)masih adanya wakil eksekutif di legislatif,(3) Posisi militer di legislatif yang tidak mencerminkan demokrasi, (4)Tidak adanya persetujuan dari DPR atas pengangkatan jabatan-jabatan strategis, (5) Wewenang DPR yang terlalu dibatasi dalam UUD'45, (6) Oposisi yang tidak efektif, (7) Kualitas keilmuan anggota legislatif yang relatif masih rendah, (8) Pertanggungjawaban Anggota legislatif kepada publik tidak pernah langsung.

Persoalan tersebut makin kompleks memang, ketika kita , tanpa disadari, masih mempunyai sisa-sisa pemikiran bentukan orde baru. Masih perlu dilihat seberapa banyak anggota legislatif yang benar-benar baru, baik dalam pemikiran maupun dalam menduduki kursi DPR ini. Reformasi yang tengah bergulir ini memang mau tidak mau harus bergantung banyak kepada DPR baru ini.

ELIT POLITIK, KETIDAKPASTIAN POLITIK DAN LOGIKA GERAKAN

Oleh Andre H Pareira,Sekjen Balitbangda PDI-P Jabar

Proses reformasi di Indonesia dalam dua tahun terakhir telah melewati beberapa masa kritis. Masa kritis *pertama* terjadi antara Maret sampai dengan pertengahan Mei 1998 ketika gerakan mahasiswa mendesak Soeharto untuk mundur dan diadili. Meskipun tidak semua tuntutan bisa terpenuhi (karena Soeharto sampai saat ini belum diadili), namun paling tidak sasaran utama gerakan mengganti pemerintahan otoriter Soeharto tercapai. Masa kritis *kedua* berlangsung pada bulan November 1998, ketika muncul pro dan kontra terhadap Sidang Istimewa MPR. Alasan penolakan, MPR hasil pemilu 1997 diragukan legitimasi dan kredibilitasnya untuk menentukan arah proses reformasi. Masa krisis *ketiga* terjadi pada saat persiapan, pelaksanaan, dan penghitungan suara pemilu 1999. Pada tahap ini warna perbedaan pandangan cukup tajam, antara mereka yang melihat pemilu sebagai *alternatif way out* bagi masa transisi dan yang menolak pemilu dengan berbagai alasan.

Kendatipun pada masa pra dan pelaksanaan pemilu ada kubu pro dan kontra terhadap pemilu namun harus dibedakan, karena di dalamnya terdapat sebagian pendukung reformasi yang menolak pemilu karena melihat Pemilu 1999 sebagai produk MPR hasil Pemilu 1997 yang *nota bene* adalah produk rejim Orde Baru.

Sementara yang lain adalah kelompok yang tidak menghendaki pemilu 1999 berlangsung sukses, bahkan berupaya menggagalkan hasil pemilu 1999. Kelompok terakhir, menurut seorang pengamat politik terdiri dari kaum pecundang yang juga pendukung setia rejim Orde Baru pra Mei 1998, sangat khawatir akan munculnya pemerintahan baru hasil pemilu 1999 yang akan menjalankan amanat reformasi rakyat, termasuk tuntutan untuk membawa mantan presiden Soeharto ke meja pengadilan.

Manuver Elit

Setelah melewati tiga tahapan kritis, hari-hari setelah pemilu adalah babak pertarungan antar elit politik. Pada masa ini meskipun elit yang terlibat dalam kancah politik praktis merepresentasikan parpolnya, namun untuk sebagian elit, muatan kepentingan, ambisi dan idealisme individual sebagai politikus menjadi lebih menonjol. Sehingga dalam aksi-aksinya kita menyaksikan ada elit politik yang bergerak melewati batas dan sekat partai politiknya demi membela kepentingan, ambisi, dan idealisme politiknya.

Oleh karena itu bukan hal yang terlalu mengejutkan ketika terjadi kerjasama dan (mungkin) aliansi strategis antar elit politik, yang keluar dari rel opini parpol pro reformasi dan pro status quo. Upaya membangun kerjasama Poros Tengah oleh Amien Rais (PAN) dan Hamzah Haz (PPP) atau kerja sama Marzuki Darusman (Golkar) dan Kwiek Kian Gie (PDI-P) dalam kasus Bank Bali, misalnya, merupakan fenomena menarik yang mencerminkan manuver elit untuk keluar melewati sekat partai. Dua kasus ini

merupakan indikasi awal bahwa peta politik Indonesia menjelang SU MPR yang akan datang akan diwarnai di samping oleh partai politik secara institusi, juga oleh manuver individual elit politik yang bergerak lintas partai politik.

Sehingga perlu diamati perilaku dan pola hubungan antar elit yang bergerak lintas parpol yang (mungkin) potensial menjadi pengelompokan kekuatan elit berdasarkan kepentingan, idealisme dan ambisi. Oleh karena itu mari kita perhatikan peta elit yang terlibat dalam pentas politi Indonesia saat ini. *Pertama,* elit pemerintah pasca 1998. Mereka adalah kelompok yang sedang berupaya mempertahankan kekuasaan saat ini. Kelompok ini neskipun mengaku reformis tetapi perilakunya sangat identik dengan Orde Baru, dan memang kebanyakan mereka adalah elit warisan generasi Orde Baru. *Kedua,* elit oposisi pro reformasi yang menghendaki perubahan elit pemerintahan dan pembaharuan Indonesia, terutama dari praktek-praktek KKN. Mereka terdiri atas politikus-politikus yang tidak terkooptasi baik oleh pemerintahan Soeharto maupun pemerintahan Habibie ditambah elit yang berpandangan reformis tersebar di berbagai partai. *Ketiga,* elit yang sedang mencari peluang untuk berkuasa (atau ikut berkuasa). Kelompok ini terdiri dari elit yang pernah menikmati masa Orde Baru (meskipun selama Orde Baru mereka ada di kelompok pinggiran) ditambah elit pro reformasi yang terpinggirkan karena dukungan yang minim dalam pemilu 1999. Dan *keempat* adalah kelompok elit pendukung rejim pra Mei 1998, yang sedang berusaha untuk bangkit kembali. Elit kelompok ini tidak muncul secara terbuka di pentas politik Indonesia saat ini, namun nafas

dan langkah-langkah politiknya masih sangat kuat mempengaruhi peta politik Indonesia.

Manuver dan *counter manuver* kelompok-kelompok elit tersebut mengakibatkan perpolitikan Indonesia pasca pemilu tetap dalam suasana ketidakpastian, meskipun pemilu 1999 oleh kebanyakan pihak di dalam maupun di luar negeri dianggap berhasil. Masyarakat domestik dan internasional yang berharap pulih kembalinya perpolitikan Indonesia tetap diliputi keraguan. Dalam hal ini penilaian PM Singapura Goh Chok Tong benar, bahwa transisi politik di Indonesia penuh dengan ketidakpastian (Kompas, 10/8/99).

Komposisi Keanggotaan MPR

Manuver dan ketidakpastian politik yang muncul pasca pemilu berhubungan erat dengan langkah-langkah persiapan elit politik menghadapi SU MPR yang akan datang. Dengan struktur keanggotaan MPR yang terdiri dari 500 anggota DPR (38 kursi disediakan untuk TNI) ditambah 135 anggota Utusan daerah dan 65 anggota Utusan Golongan menyebabkan komposisi anggota dipilih dan yang tidak dipilih melalui pemilu menjadi 462 berbanding 238. Sehingga dengan pelaksanaan sistem multipartai dan realita pluralisme politik yang tersebar seperti saat ini, hasil pemilu bukan merupakan jaminan kepastian politik Indonesia. Dari perspektif demokratisasi politik, komposisi 462 berbanding 238 tersebut tidak ideal, karena pemilu yang seharusnya merupakan institusi rekruitment politk massa dan manifestasi keinginan dan harapan masyarakat tidak berfungsi maksimal.

Kendala utama membangun sebuah lembaga MPR yang benar-benar melakukan representasi rakyat terletak pada konstituen UUD1945 Pasal 2 ayat 1 mengenai struktur keanggotaan MPR dan UU nomor 4 1999 yang mengatur Susunan dan Kedudukan MPR. Di samping itu, hasil pemilu 1999 di mana tidak ada partai yang meraih 351 dari 462 kursi yang diperebutkan, juga memperbesar peluang ketidakpastian politik selama masa antara pemilu dan SU MPR, karena 238 anggota yang tidak dipilih melalui pemilu sangat potensial menjadi variabel pengubah untuk hasil pemilu yang merupakan pilihan rakyat. Jelas, jumlah 238 anggota yang tidak dipilih melalui pemilu jauh lebih banyak dari jumlah perolehan kursi lima partai terbesar; PDI-P (153), Partai Golkar (120), PPP (58), PKB (51) dan PAN (34).

Oleh karena itu ketidakpastian politik saat ini disebabkan oleh dua faktor. *Pertama*, oleh konsituensi normatif yang mengatur tentang lembaga tertinggi MPR dan tata cara pengisian lembaga tinggi tersebut. Dan *kedua* realita politik saat ini yang sangat pluralis tersebar tersebar sehingga menghasilkan komposisi kekuatan politik tanpa mayoritas mutlak atau tanpa kecenderungan untuk mayoritas mutlak. Pada masa yang akan datang, untuk lebih menjamin pemilu sebagai lembaga demokratisasi politik, dan kepastian politik pasca pemilu, konstituensi normative terutama mengenai wakil Utusan Golongan dan Utusan Daerah perlu dipertimbangkan kembali. Namun, sebelum melakukan perubahan untuk masa yang akan datang, suka tidak suka realita ketidakpastian politik saat ini harus dihadapi terlebih dahulu. Dan yang penting bagaimana (meskipun

dalam suasana tidak pasti seperti saat ini) proses reformasi tetap bisa dilanjutkan ?

Anggota MPR dan Logika Gerakan

Belum masuk ke SU MPR saja situasi politik kita saat ini sudah hiruk-pikuk dengan manuver-manuver elit, apalagi kalau pada SU nanti. Banyak orang membayangkan kalau manuver-manuver seperti ini berlangsung terus, apalagi kalau berlangsung melalui jalan belakang, termasuk yang paling dikhawatirkan soal *money politics*, maka ketidakpastian politik akan berlarut-larutdan berakibat terjadinya ketidakpastian politik yang semakin panjang.

Oleh karena itu kuncinya ada pada anggota-anggota lembaga tertinggi negara, MPR. Karena kalau kita mengikuti logika perubahan secara konstitusional maka elit-elit politik yang nantinya akan duduk di MPRlah yang akan menentukan ke mana negara ini mau diarahkan. Sehingga sejauh mana komitmen dan kesadaran para anggota MPR akan fungsinya sebagai institusi pemegang kedaulatan rakyat akan menentukan masa depan bangsa ini. Rakyat sudah menentukan pilihannya melalui pemilu, sekarang saatnya anggota-anggota majelis yang terhormat ini merespon dan mewujudkan keinginan rakyat.

Tetapi pertanyaannya, apakah keputusan rakyat yang sudah ditetapkan pada pemilu yang lalu akan sama dengan keputusan MPR yang akan datan ? Di sinilah letak persoalannya. Kalau keputusan itu sama dengan harapan rakyat maka tidak akan ada persoalan, namun yang paling dikhawatirkan apabila MPR membuat keputusan yang tidak sesuai harapan dan

keinginan rakyat. Karena struktur keanggotaan lembaga tertinggi negara tersebut, di mana jumlah tidak dipilih secara langsung – yang oleh karena itu *acceptability* dan akuntabilitas terhadap rakyat dipertanyakan – akan menjadi persoalan tersendiri, kalau misalnya mereka tidak peka terhadap tuntutan masyarakat.

Untuk itu elit politik yang duduk di MPR nanti, terlepas dari parpol dan latarbelakang keberadaannya di MPR, perlu memahami dan peka terhadap kepentingan dan tuntutan masyarakat saat ini. Bahwa sejak awal 1998 rakyat (dipelopori oleh mahasiswa) sudah melakukan gerakan perlawanan secara terbuka untuk mendobrak pemerintahan status quo, Orde Baru. Demikian pula dengan hasil pemilu Juni 1999 telah membuktikan bahwa dukungan suara untuk partai-partai non Orde Baru secara kumulatif jauh di atas parpol pendukung Orde Baru. Oleh karena itu logikanya sederhana : rakyat menghendaki perubahan, dan perubahan dimulai dari perubahan kepemimpinan nasional. Sehingga, anggota MPR harus menyadari posisi mereka sebagai pengemban fungsi kedaulatan rakyat, yang tentunya harus menyampaikan aspirasi , tuntutan, dan harapan masyarakat.

Kalau saja para elit politik yang duduk di MPR berpikir dan bertindak dalam logika gerakan seperti yang dilakukan oleh mahasiswa ketika menumbangkan Soeharto, di mana saat itu yang dihadapi hanya satu; bagaimana menumbangkan penguasa otoriter Soeharto, sehingga tidak ada kepentingan dan isu lain di luar menggulingkan Soeharto. Atau seperti rakyat yang pada pemilu lau sudah secara lugas menentukan pilihannya sehingga partai-partai non Orde Baru mampu menumbangkan hegemoni partai Orde Baru

yang sudah berlangsung selama 32 tahun, maka perubahan pasti akan berlangsung dan rakyat akan sepakat dengan para elit politiknya yang duduk di lembaga MPR, karena mereka sudah memenuhi tuntutan dan harapan rakyat. Kita lihat saja nanti.

Bandung, 18 Sept. 1999

Andre H. Pareira
Sekr. Balitbangda
PDI Perjuangan Jawa Barat

Presentasi dan Diskusi

1.Soedjana Sapi'ie, Direktur Forum Rektor.

Mengenai pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tentang aktivitas parlemen;Menghubungkan kedua aktivitas tersebut tidaklah mudah, tetapi akan saya coba. Melihat keadaan tentang KKN, maka orang –orang seusia saya (usia sekitar 70 tahun), mengalami jaman penjajahan jepang dst. Tapi mari kita mulai pada tahun 50-an. Pada tahun 49, Belanda mengakui kemerdekaan kita, sehingga tahun 50-an mulai fase yang menarik/interesting untuk kehidupan pegawai negeri. Pada waktu itu ada dua kelompok pegawai negeri, yakni pegawai negeri yang Co, dan yang Non. Pegawai negeri yang CO, adalah pegawai negeri yang kerjasama dengan belanda, yaitu menjadi pegawai dari negera federal,pemerintahan Pasundan , Indonesia Timur, Sumatra Timur dsb.adalah pegawai yang Cooperatif dengan Belanda. Disamping itu ada pegawai –pegawai negeri Repunlik Indonesia yang menolak kerjasama dengan yang namanya adalah non.

Tahun 50, kedua grup ini, yang Non dan yang Co ,menjadi satu, di dalam suatu grup pegawai negeri. Dengan demikian maka adanya percampuran antara yang Non dan yang Co dalam satu grup pegawai negeri, maka kita melihat ada dua keadaan. Pertama adalah jumlahnya jauh lebih daripada yang diperlukan. Dan yang kedua, adanya grup yang Co dan yang Non, syukur tidak berlangsung terlalu lama di Indonesia, akan tetapi ini sempat menjadikan keadaan dalam membagi-bagi kedudukan, bagi-bagi kursi dan *problem by itself.* Dan kemudian tahun 50-an konstitutsi

kita betul-betul suatu negara demokrasi liberal, pada waktu itu kita tidak menganut kabinet presidensiil, tapi pada waktu itu kita menganut kabinet parlemen, sehingga suatu pemerintahan itu bisa jatuh dan bisa bangun oleh parlemen. Situasi pada Tahun 50 itu adalah suatu yang *interesting* sekali , kalau saudara pelajari. Pada tahun 50, saya lupa persisnya, bisa 52, bisa 53, mungkin 52, pada waktu pemerintahan PNI, ada suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pak Iskak Cokroadisuryo waktu itu, yang mengatakan memberi kesempatan kepada pribumi untuk maju. Nah, kesempatan itu adalah kesempatan emas di bidang ekonomi yang diberikan, yakni pribumi dikasih kesempatan untuk maju berupa lisensi- lisensi khusus. Apa yang terjadi? Pribumi yang dikasih lisensi ini, jelas yang pertama adalah yang kuasa pada PNI pada waktu itu, atau yang dekat-dekat dengan partai PNI.Kedua, yang terjadi adalah banyak lisensi tersebut tidak dipakai oleh pribumi-pribumi tersebut akan tetapi dijual kepada orang-orang di Glodok kembali.Dan akhirnya siapa yang menguasai, adalah golongan *chinese*. Apa yang terjadi ? Adalah istilah orang-orang Indonesia pribumi memakai kartu nama, businessman, pada waktu itu istilahnya adalah istilah importir, tapi yang dibawa hanya tas. Kiri kanan pakai tas, tapi yang dijual lisensi –lisensi mereka. Itu yang kita sebut istilahnya adalah importir *ugten tas.Ugten tas* itu istilah Belanda, untuk mengatakan tas jinjing.

Poin yang ingin saya sampaikan kepada kalian, tahun 50-an itu, perang korea. Pada waktu perang korea terjadi, negara kita, Indonesia ini , boom, karena apa ? Ekspor-ekspor kita terutama karet, dsb itu maju, jadi sama sekali tidak ada kesulitan ekonomi,

akan tetapi mengapa mentalitas kita pada saat itu tidak bisa pakai kesempatan itu untuk ke sana. Dengan demikian kalau saudara lihat, hal-hal katakanlah, ketidakjujuran, ketidakenakan kita, itu, *rootnya* itu tahun 50. Tahun 52 itu sudah terjadi.Kemudian pegawai negeri, selalu ada argumentasi, pegawai negeri itu gajinya kecil. Unsur-unsur yang pertama pegawai negeri itu adalah dengan berkumpulnya Co dan non terjadi kelebihan pegawai. Sebagian adalah pegawai yang dibesarkan dalam alam revolusi fisik, yaitu 45-50, mereka mengungsi, mereka kerja darurat di Jogja, di magelang, dsb, yang saya alami sendiri. Lalu mereka masuk kepada suatu persyaratan kepegawaian, banyak sekali yang mempergunakan UU, aturan pegawai negeri Belanda. Kemudian edua,pimpinan negara pada waktu itu adalah Bung karno, idakpunya perhatian sama sekali pada ekonomi, maupun administrasi, sehingga keadaan perbaikan administrasi pegawai negeri tidak pernah dipikirkan. Pertama mereka kelebihan, dipikirkanpun tidak sehingga perbaikan tidak perbah diadakan. Dapat saudara bayangkan efisiensi, dari kemudian banyaknya, tidak mungkin ada perbaikan gaji dsb.

Terus pada permulaan - pertengahan 50-an, sudah terasa gaji pegawai negeri itu relatif jelek. Saudara sekalian, hal ini perlu dimengerti Dengan demikian argumentasi yang akan dibawa terus sampai sekarang itu rootnya tahun 50-an. Kalau ini kemudian sudara lihat, pergerakan politik pada permulaan 50-51-an, dalam suatu demokrasi liberal yang luar biasa, yang memberikan kesempatan pada orang indonesia maju juga namun tidak bisa dipakai oleh kita pada saat itu.Lalu dibawa dalam suatu sistem

administrasi yang tidak kunjung kita perbaiki, efek-efek tahun 50-an itu mulai-terasa dan terus terasa, dan diperjelek, atau diperkokoh dengan dalam arti negatif ya, dengan suatu pemerintahan Pak Harto, yang betul-betul mementingkan golongan, mementingan kawan, mementingkan grup sendiri. Sehingga dengan demikian saudara lihat, segala sesuatu itupun terjadi mencapai puncaknya pada sekarang ini. Dus, dengan demikian saudara akan mengatakan, siapa yang bersalah dalam keadaan yang tidak bisa membina sistem mental yang baik, tidak bisa membina sistem kerja yang baik, membina kebiasaan yang baik dsb, haraplah saudara lihat itu dalam konteks sejarahnya.

Sebetulnya pemerintah dulupun sudah mempunyai keinginan memperbai keadaan , memberi kesempatan kepada orang-orang Indonesia pribumi kenapa itu tidak bisa dimanfaatkan. Kemudian saudara lihat praktik-praktik yang terjadi pada jamannya Pak Harto, disini, saudara sendiri yang mengalami, saudara yang lihat sendiri ya to, bagaimana kesenpatan yang diberikan pada saat itu.

Poin yang ingin saya berikan adalah *root* di dalam jiwa kita, apakah kita ini jelek apakah kita ini baik, itulah hal-hal yang *not-so simple* untuk dikatakan. Mengapa negera seperti Singapura, Malaysia, berhasil membangun pegawai negeri yang baik. Pertama mereka tidak pernah mengalami suatu revolusi, itu yang kesatu, sehingga Korps pegawai negeri itu tidak hancur atau rusak. Yang kedua tradisi Inggris, *The British Civil Servant* adalah betul-betul suatu Korps PN(pegwai negeri) yang sangat-sangat baik, Ini baiknya orang Inggris membina koloninya. Satu adalah pegawai negerinya. Pegawai negeri jajahan Inggris itu adalah baik, sampai

saat ini *The Indian Civil Servant* tetap baik, *The S'pore Civil servant* masih tetap baik, lalu juga *Malaysian Civil Servant* masih juga baik. Kita terpuruk di bidang kepegawainegerian saat ini. Haraplah tentang kepegawainegerian ini jangan dianggap enteng, Pengaruhnya itu kemudian kepada praktik-praktik di negara kita dsb-dsb ini, pengarahnya mulai dari sini. Akan tetapi, katakanlah, apakah pada tahun 50 pada saat yang CO dan NON itu berkumpul bersama, itu menjelaskan terjadi suatu mental yang jelek, saya tidak berani mengatakan. Akan tetapi itu mempunyai suatu efek kepadanya adalah ya.

Sekarang kalau saudara lihat kembali, di pendidikan-pendidikan kita, moralitas kita diajarkan di sekolah, moralitas secara agama diajarkan, di pengajaran-pengajaran itu budi pekerti diajarkan di sekolah tapi kemudian apa yang terjadi di kita ini adalah suatu keadaan dimana saya *bilang* dengan kawan-kawan, kita ini orang-orang Indonesia sering pakai topeng, kita katakan A tapi kita lakukan B.Itulah keberatan-keberatan saya secara pribadi kepada P-4, perdebatan kita dulu adalah apa yang kita lakukan di P4, apa yang kita katakan di P4 dan apa yang terjadi di luar adalah 2 hal yang berlainan. Dan itu buat kita adalah suatu yang bisa kita *live with.* Kita hidup dengan *ambiguity*, hidup dengan ketidakjelasan, itu suatu ciri kita, hal tersbut barangkali bagi para ahli antropolog, para ahli sosiologi itu, untuk menjawabnya. Mengapa kita bisa hidup dalam ambiguitas ini, *double standard* ini, ketidakjelasan. Orang barat sulit sekali Pak. Orang barat sangat kaku dalam hal ini, harus jelas, kalo nggak jelas nggak enak.

Kita bisa hidup dalam hal-hal yang tidak jelas, kita pakai topeng, kita katakan A perbuatan adalah B. Contoh kita ingin punya legislasi, semestinya orang-orang yang di sana adalah orang-orang yang terpilih, akan tetapi ABRI masuk masih OK. Nah ABRI itu punya historis tersendiri, bagi mereka generasi muda sudah lupa sejarahnya, tapi saya masih ingat.Waktu kita orang-orang universitas dipanggil, ke pak Harto, kemudian beliau menjelaskan bahwa ABRI masuk ke legislatif itu mengapa, sederhana, alasannya adalah untuk menjaga UUD 45 tidak terlalu gampang diubah. Karena perubahan itu memerlukan 2/3, dan beliau pada waktu itu (tahun 65), melihat dalam konteks sejarah juga, pada waktu itu terjadi suatu konsensus nasional, , pimpinan waktu itu mengatakan berilah sejumlah kursi pada ABRI, untuk menjaga agar UUD 45 tidak terlalu gampang diubah. Itulah seingat saya isi pidato pak Harto pada kita.Dengan demikian jumlah seratus itu adalah suatu analisis sederhana, dari jumlah MPR begini-begini, kemudian kalau 100 ABRI di situ cukuplah untuk bikin perubahan UUD 45 itu lebih sulit. Nah sekarang ini yang sudah 30 tahun dipertahankan, lalu pada saat sekarang Oklah jumlah ABRI dikurangi, OK sekarang berapa tigapuluhan, empat puluhan, *alrightlah, and final end* apa ?

Tidak ada alasan yang kuat, tapi karena kita biasa lagi tidak perlu hidup dalam norma-norma yang tegas, *ambiguities,* akan tetapi kita bisa terima. Ini yang kadang2 membuat saya bingung dalam diri saya sendiri, kenapa bapak-bapak ibu-ibu bisa berpegang teguh pada aturan-aturan agama yang menyatakan hitam putih, hal itu diikuti, tapi kalau hal-hal lain tidak. Itu satu

contoh yang sering saya tanya kepada orang yang beragama. Seolah kehidupan duniawi dan kehidupan agama itu dua hal yang terpisah. Di Islam diajarkan bahwa *islam is a unity*, sehingga ssesuatu yang terjadi itu adalah yang begini.Nah ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak sekalian, kalo kita hendak mengatakan *clean and good governance*, bukanlah masalah yang terlalu sederhana, bukanlah masalah yang yang besok jadi, saya nggak percaya itu. Itu memerlukan langkah-langkah yang jelas.

Kita ini sebetulnya sederhana Pak, kalau kita mempunyai pimpinan yang benar-benar *clean*, yang betul-betul tidak ada perbedaan kata dan perbuatan, kita betul-betul mempunyai tata cara yang dijalankan, yang betul-betul jelas, dan tidak ada keraguan antara kita, saya yakin kita akan ikut. Saya yakin dengan mudah hal itu akan dilakukan. Akan tetapi kalau dari atasnya saja sudah kacau seperti sekarang ini seperti Bank Bali dan yang aneh-aneh terjadi, apa yang saudara harapkan ? Kalau Pak Harto dan keluarganya bisa begitu, seorang menteri dan keluarganya akan bisa mengatakan, saya juga bisa begitu. Kalau menteri bisa begitu, Dirjennya juga bisa begitu, sampai ke lurah Pak. Kalo *It's that happened, what do you think* kita bisa katakan clean governance, tapi sebetulnya buat saya resepnya sederhana. *Get a good president* yang betul-betul bisa kita pakai sebagai panutan. Dan dia bisa menjalankan *Clean Governance*. Sudahlah saya rasa hal itu akan terjadi. Akan tetapi kalau melihat sejarahnya tahun 50 sudah begitu, pegawai negeri gajinya *nggak* bisa baik-baik, saya kira *don't under estimate* ini. Saya yakin kalau gaji pegawai negeri gajinya tidak bisa baik, akan sulit sekali *create a clean government.*

Dengan demikian saya ingin menyampaikan message ke bapak-bapak sekalian kalau kita hendak menjadi bagian legislatif, mencari orang-orang yang memenuhi persyaratan, sebagai anggota parlemen yang baik, *and clean*, seandainya itu ada, maka barangkali parlemen kita akan berfungsi dengan baik. Seandainya tidak *what we have to do* ? Saya menganjurkan kepada kalian mahasiswa membentuk *parliamentary watch*.Itu adalah pemantauan parlemen. Akan tetapi pemantauan parlemen yang betul-betul saudara jalankan, sehingga anggota anggota parlemen merasa dipantau. Itu berarti saudara harus memantau kegiatan dia, sebagai anggota parlemen, kegiatan nya di parlemen, kehidupan pribadinya karena dia adalah *public figure*. Dengan demikian mahasiswa mempunyai suatu jaringan pemantau mula dari DPRD II, DPRD I , dan DPR sehingga saudara bisa paling tidak menjadi semacam kontrol. Buatlah suatu majalah, buatlah suatu *press record*, orang ini di parlemen ini biasanya bersuara begini, dia menyetujui hal yang begini, dia tidak pernah ngomong, dsb, keluarkanlah itu sebagai data-data, saya rasa dengan kegiatan yang kalian lakukan *you can do something*.

Dan kalian adalah grup yang bagi saya mudah-mudahan tidak terlalu salah kalau kalian mengatakan bahwa belum terlalu kena penyakit-penyakit yang menyebabkan clean and good governance tidak mungkin. Kalau ini tidak betul asumsi saya sehingga mahaiswa-mahaiswa juga sudah kena penyakit *kayak* begini, *God for bit*,saya katakan.Maka janganlah kita mengharapkan *good and Clean*, kalau kita dengan sendirinya tidak bisa melaksanakan hal tersebut. Demikianlah message saya.

2.Barita Siregar, Anggota FKP-MPRRI

Saya sebelumnya ingin mengemukakan dua hal, *pertama,* oleh saudara moderator, saya diperkenalkan dengan 3 predikat, anggota FKP, dosen, lalu ketua organisasi profesi. Saya sebetulnya lebih senang yang dua terakhir daripada yang pertama. Tapi saya diminta panitia ini, karena teman saya (Pak Andreas red), supaya ada temannya mewakili partai. Jadi saya terima meski saya akan lebih berbicara dalam konteks yang kedua dan ketiga. Saya juga sangat senang sekali dalam forum ini karena di sini ada Pak John Sapi'ie yang usianya jauh lebih tua dari saya, yang kebetulan bisa disebut angkatan 45, saya bisa disebut angkatan 66, teman saya Pak Parera yang lebih muda dari saya, dan kalian yang bisa disebut angkatan 98 kemarin. Jadi ini pertemuan antar generasi yang sangat baik.

Baiklah saya diminta membahas tentang *Clean and Good Governance* dikaitkan dengan peran legislatif dalam rangka *check and balance.*Saya mulai dari pengertian legislatif. Kita mengenal legislatif sebagai bagian dari trias politika. Secara harfiah sebenarnya, menurut sejarahnya sejak Montesqiu, legislatif adalah lembaga pembuat undang-undang. Hanya dalam perjalanan sejarah, sesuai dengan sejarah parlementarian, munculnya prinsip-prinsip demokrasi, akhirnya lembaga legislatif ini diidentikkan dengan lembaga perwakilan rakyat, sebagai perwujudan demokrasi. Karena kalau tanpa eksekutif, legislatif, yudikatif dimana

demokrasinya; pada awalnya di prancis ini eksekutif, yudikatif ini ditetapkan oleh negara.Nah mulai dari situ muncul ide pemilihan umum, memilih wakil , lalu ada pembentukan partai, sehingga legislatif itu juga sebagai dewan perwakilan rakyat. Jadi kalau kita lihat bahwa lembaga legislatif adalah lembaga pembuat undang-undang yang sekaligus menjadi perwakilan rakyat yang melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Jadi dua cabang ini yang memang penting.Dan memang dalam rangka demokrasi, kita membutuhkan suatu perwakilan rakyat, perwujudan rakyat, yang berdaulat yang melakukan kontrol terhadap pemerintah. Karena saya tahu meskipun kalian sebagian besar dari teknik, Lord Acton mengatakan, kekuasaan cenderung korup, dan makin absolut kekuasaan itu makin korup kekuasaan secara absolut. Nah dari sinilah kita melihat perlunya *check and balance* dari suatu pemerintahan yang diwakili oleh lembaga legislatif sebagai juga lembaga perwakilan rakyat. Karena bisa saja legislatif bukan perwakilan rakyat. Di negara-negara komunis ada legislatif, tetapi bukan perwakilan rakyat.

Nah, dari penjelasan Pak John Sapi'ie jelas betapa kita mengalami kurun waktu baik liberal maupun sesudah liberal, tidak berfungsinya *check and balance* dalam lembaga legislatif kita. Saya ingin memfokuskan dalam orde baru dimana kita punya lembaga-lembaga perwakilan yang secara konstitusional sudah sesuai dengan UUD 45. Dan dari segi pelembagaannya mencerminkan demokrasi. *Check and balance* memang diatur tetapi kenyataannya tidak jalan sama sekali, tidak ada *check and balance.*

Kalau boleh saya ingin mengatakan 3 hal penting yang membuat tidak berfungsinya *check and balance* dalam pemerintahan orde baru. Yang pertama adalah sistem kepartaiannya. Kita tahu partai politik merupakan infrastruktur yang dibangun dari masyarakat/infra sebagai suatu kekuatan yang akan berhadapan dengan suprastruktur yaitu pemerintah dalam siklus kembali kepada rakyat Tetapi sistem kepartaian Indonesia jauh dari sistem kepartaian yang mencerminkan infrastruktur yang benar. Yang terjadi adalah Partai partai politik kita terkooptasi oleh kekuasaan supra struktur.Mengapa ? Kepartaian kita diatur dengan UU kalau tidak salah UU no 33 tahun 75 lalu diubah lagi yang mulanya berawal dari pemilihan umum tahun 71, yang waktu itu ada 10 partai politik, dengan penyederhanaan lalu kemudian dijadikan 3 partai politik.

Meski demikian, terus terang saya juga agak pesimistik dengan sistem multipartai untuk negara republik Indonesia. Tetapi sistem kepartaian yang diatur dengan UU dimana UU itu telah menyatakan, kekuatan sosial politik di Indonesia terdiri satu golongan karya dan dua partai politik, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia. Jadi secara nyata diatur dari atas. Sedangkan partai politik infrastruktur lahir dari rakyat. Jadi dia (Parpol) tidak dibentuk rakyat anggotanya, tetapi oleh penguasa. Itulah partai politik kita dalam orde baru, lalu ada partai ada golkar lagi, sedangkan fungsinya sama-sama. Semestinya setiap kekuatan yang berusaha memperebutkan dan memelihara kekuasaan secara sah, adalah partai politik, tapi di Indonesia ada GOLKAR secara terpisah.

Lalu ada kewenangan dalam UU pemerintah berhak membubarkan partai politik. Apa artinya ? Mestinya tidak ada hak pemerintah untuk membubarkan, misalnya membubarkan PERSIB pun tidak boleh, karena itu rakyat, tetapi UU memberikan kekuasaan pemerintah membubarkan partai politik. Seharusnya kalau pemimpin parpol salah, dia ditangkap, dipenjara , hal itu boleh-boleh saja, tetapi partai politik adalah kedaulatan anggota. Hanya anggotalah yang berhak membubarkan partai politik.

Tetapi dalam sistem kepartaian orde baru, seperti saya katakan tadi partai politik terkooptasi oleh kekuasaan pemerintah. Jadi dia (parpol) di bawah pemerintah, bukan infrastruktur yang setingkat dengan pemerintah, itu kondisi ***yang pertama.*** Jadi memang sistem kepartaiannya sudah *amburadul,* bagaimana bisa benar dia (parpol) mau berfungsi sebagai suatu sistem kapartaian kalau dia (parpol) sudah tidak demokratis. ***Yang kedua*** adalah kondisi obyektif kehadiran golongan karya. Nah Golongan Karya, boleh boleh saja ada satu kekuatan sosial politik yang bernama golongan karya.Tetapi yang terjadi adalah rekayasa kekuasaan untuk menjadikan infrastruktur politik yang menjadi bagian dari kekuasaan.

Tadi Pak John Sapi'ie, itu dibagun demi UUD 45 demi pancasila, Golkarpun dibangun begitu. Dengan asumsi pancasila dan UUD 45 ini hanya bisa selamat kalau ada Golkar dan ABRI; Golkar harus menang pemilu. Sehingga dibangun infrastruktur politik yang menjadi super.Dan dengan *all cost* kekuasaan pemerintah membuat ia (GOLKAR) mesti menang pemilu apapun yang terjadi.Sehingga di sini tidak ada alternatif, sedangkan

pemilu kan alternatif.Pokoknya pemilu harus dimenangkan oleh Golkar, dan diaturlah suatu mekanisme dimana Golkar mengenal yang namanya tiga jalur ada ABRI, birokrasi, baru partai Golkar.Pada akhirnya yang namanya partai itu hanya 1/3 dari mekanisme kekuasaan. 2/3 adalah suprastruktur.Dengan kekuatan itu siapapun tidak bisa mengalahkan Golkar dalam pemilu.Akhirnya Golkar dalam 6 kali pemilu menang.Tetapi bayarannya adalah Golkar tidak menjadi infrastruktur politik atau partai yang berakar dari rakyat, dia adalah bagian dari kekuasaan ,hanya baju kekuasaan untuk memberikan legitimasi demokrasi secara konstitusional. Golkar menang pemilu tapi menangnya nemakai cara kekuasaan.Tidak mungkin *dong* mengontrol kekuasaan kalau dia lahir dari kekuasaan.Manamungkin dia mampu mengontrol kekuasaan dan itulah yang terjadi pemilu demi pemilu. Konsekuensinya sebagai bagian yang terkooptasi kekuasaan,Golkar akhirnya menjadi alat kekuasaan.

Ketua dewan pembina Golkar pada orde baru adalah Soeharto, yang juga jadi presiden.Dan dewan pembina itu punya kewenangan mutlak bahkan bisa membubarkan organisasi. Itu anggaran dasar Golkar.Membubarkan organisasi, kita bisa bayangkan betapa besar kekuasaan Soeharto.Karena itu jangan salahkan Golkar kalau dia enam kali pemilu mencalonkan Soeharto – Soeharto lagi.Dia (Golkar) tidak punya kewenangan melawan Soeharto. Karena secara konstitusi partai dia (Soeharto) adalah penguasa, pemilik tunggal dari Golkar. Apapun yang dia mau pasti jadi, termasuk mengatur siapa gubernur, siapa bupati, siapa menteri.Dengan mudah ia bisa memerintah Golkar. Dewan

Pembina maunya gubernur Jawa barat A, jadilah A. Gubernur Sumatra Utara B, jadilah B. Kekuasaannya demikian, dan itu mekanisme intern partai yang menjadi partai pemenang pemilu.

Yang ketiga adalah budaya oposisi.Kita hidup dalam masyarakat yang memang transisional.Jadi konflik dalam masyarakat kita itu belum menjadi suatu tradisi.Generasi kalian yang sudah lebih banyak kontak dengan ilmu pengetahuan mungkin bisa.Dulu kalau orang berbeda pendapat, itu sudah suatu perlawanan, suatu permusuhan. Kita *nggak* bisa terima seorang anak diprotes anaknya, mungkin saya sedikit-sedikit mulai mencoba, karena anak sudah segede kalian.Disuruh kesini, sekolah kesini, pakai ini, itu, pakai bajupun diatur.Nah, ini tidak ada *conflict resolution*. Dan buktinya kita, dengan demokrasi libera parlementer yang dijelaskan oleh pak John Sapiie tadi, membuka diri dengan oposisi akhirnya berantem, *nggak karu-karuan,* gagal.Jadi memang harus ditumbuhkan suatu budaya oposisi yang kuat untuk membuat *check and balance* pemerintahan.

Masa orde baru, ada orang beda pendapat sedikit menteri itu bisa marah di DPR. Jika anda tidak setuju dengan Golkar, mengkritik soal korupsi, soal bupati yang memenangkan pemborong yang tidak pakai tender, dikatakan melanggar UUD 45 dan pancasila atau subversif, dan itulah yang terjadi selama ini.Dan orang sudah mengalah, karena kita memang belum siap untuk berbeda pendapat.Jadi memang ada kondisi yang tidak kondusif, untuk munculnya *check and balance* dalam kehidupan legislatif kita.

Nah kita telah mengakhiri orde baru, memulai yang baru.Secara sistem kita melihat mulai ada UU kepartaian yang baru yang meskipun belum ideal, tapi sudah kita mulai.Kita mesti rombak terus, pertama dalam rangka akuntabilitas,sistem kepartaian terbuka tapi tetap ada koridornya. Kedua, asas tunggal memang sudah mulai ditinggalkan karena itu memang suatu kesalahan.Saya setuju mempertahankan pancasila, tapi kalau seluruh partai hanya memiliki satu ideologi lalu apa arti perjuangannya. Apa yang harus diperjuangkan selain ideologi dalam bentuk cita-cita, atau cita-cita dalam bentuk ideologi.Jadi harus ada pluralisme ideologi terbuka. Lalu dengan sistem akuntabilitas,bagaimanapun sistem distrik harus kita laksanakan, ini yang menjamin akuntabilitas diri seorang anggota DPR.

Lalu kemudian dengan sistem kepartaian tersebut transformasi sudah kita tahu hasilnya, pemenang pemilu 1999 adalah PDI-P, GOLKAR, PPP dst.Di sini kita melihat fenomena bahwa kekuatan warisan orde baru tetap punya legitimasi, terlepas dari reformasi.Karena memang politik bukan cuma soal ide, tapi juga soal infrastruktur,soal mesin politik, soal kekuatan, disamping ideologi.Inilah, betapapun PKB bersaing dengan PPP, PKB popular votenya menang tapi kursinya kalah dari PPP terlepas dari orde baru yang penuh dengan otoriterisme, yang tidak demokratis.

Ini saya rasa tantangan buat partai-partai pemenang pemilu untuk menciptakan *clean and good governance*. Lepas, bahwa kita memerlukan *clean and good governance* dimana infrastruktur politik yang merupakan aspirasi rakyat mampu berdiri sama tinggi dan mampu mengontrol pemerintah. Golkar dengan segala cacat

celanya sebagai status quo, sekarang ini golkar harus betul- betul membuktikan bahwa dengan paradigma baru sudah menjadi reformis, sudah sadar akan dosanya, menempatkan diri sebagai infrastruktur, menjadi perwakilan rakyat yang kuat dalam suatu sistem politik yang baik dan baru, yaitu dengan antara lain menolak pencalonan Habibie. Itu akan membuktikan Golkar sudah beralih.Dia dulu dikooptasi oleh Soeharto, kalau sekarang masih diatur-atur Habibie, dan apapun salah Habibie tetap didukung, maka *non sense*, tidak ada artinya paradigma baru itu.

Tetap siapapun presiden yang berkuasa, kalau dulu menjadi dewan pembina, sekarang dihapuskan diganti dengan penasehat.Habibie tidak duduk di situ, tapi tangan-tangannya, seperti Baramuli. Nah kalau hal ini masih jalan, tidak akan ada perubahan.Penyakit itu nanti bisa muncul kepada PDI Perjuangan. Kalaupun Mega jadi presiden misalnya, PDI-P terkooptasi oleh kekuasaan.Ini yang harus kita hapuskan.Dia harus menjadi benteng rakyat menghadapi kekuasaan pemerintah.Meskipun pemerintahan dipilih oleh rakyat tapi partai membutuhkan pemimpin baru.

3.Andre H Pareira, Sekjen Balitbang PDI-P Jawa Barat

Semalam saya diminta untuk berbicara tentang *Clean and Good Governance* menyangkut aturan yang baik dan bersih.Nah sedikit *flash back* ke teori tentang *Clean and Good Governance,* kalau kita bicara dalam konteks *clean and good governance* dalam konsep legislatif yang aspiratif, saya ingin melihat kembali sedikit

apa makna dari pembicaraan kita ini.Nah di sini pembicaraan kita menyangkut pada *governance*, pada otoritas.Governance dalam arti luas itu termasuk legislatif, dalam arti sempit hanya eksekutif. Di sini relevansinya kalau kita bicara *good governance*, legislatif adalah satu bagian *how to govern*.

Dalam konteks ini kalau kita bicara soal kehidupan bernegara dalam satu poin yang sangat penting, yaitu orang bicara tentang politik.Politik berbicara tentang kekuasaan.Dan di sini kekuasaan adalah penyerahan kekuasaan dari individu kepada kolektivitas.Kalau di dalam teori sosial kontrak, otoritas itu diatur melalui kesepakatan bersama, melalui UUD. Nah dalam konteks ini kita lihat 3 poin atau 3 fungsi menyangkut *clean governance* dalam arti luas, orang akan selalu mengacu pada trias politika. Di situ ada legislatif, ada eksekutif, dan ada *judiciary* (yudikatif red) yang mempunyai *power* dan *authority*.Berhubungan dengan *check and balance*, maksudnya adalah tadi juga sudah disinggung oleh Pak Barita, bahwa kekuasaan itu cenderung korup, maka ini perlu dibatasi.Dan lagislatif dalam konteks ini adalah suatu organ yang harus membatasi kekuasaan itu.Trias politica berbicara soal *distribution of power, sharing of power*, dan salah satu fungsi dari legislatif yang kita semua sudah tahu adalah untuk membuat undang-undang. Karena apa ? Karena kalau ini hanya diserahkan kepada satu orang atau satu lembaga, dia cenderung makin korup.Harus ada pembagian, harus ada *check dan recheck*.

Persoalan di kita adalah bagaimana membuat suatu legislatif yang berfungsi benar, yang fungsional dan aspiratif.Saya pikir kita sudah terlalu lama mengalami, dan kita kemudian

mentolerir semua yang salah.Atau kita tidak tahu lagi mana yang benar mana yang salah.Sebab kita terlalu lama hidup dalam kesalahan. Kalau orang terlalu lama hidup dalam situasi dimana yang salah itu menjadi benar dia tidak akan tahu,mana yang benar mana yang salah. Dan itu kembali kepada norma-norma ideal.Soal legislatif yang fungsional yang aspiratif, kita nggak tahu harus mulai dari mana. Susah, apakah dengan pembicaran kita hari ini bisa menyelesaikan persoalan. Tapi *okelah*, kita mulai *sharing*, kita mulai dari sistem.

Karena ini menyangkut soal sistem, bagaimana membangun struktur kenegaraan, yang di dalamnya ada legislatif.Di dalam sistem itu orang bisa bicara soal struktur, dan kemudian dalam struktur itu ada institusi – institusi yang mengatur pola hubungan yang mengatur institusi tersebut.Nah di sini kita lihat, ada institusi institusi. Institusi politik yang namanya legislatif dan yudikatif, eksekutif.Nah di Indonesia ini ada institusi lain yang dulu namanya ABRI sekarang TNI. Dan kalau kita lihat dalam trias politika TNI ini apa? Tapi secara nyata kekuasaannya besar sekali.Pengaruhnya besar sekali dalam orde baru.Sementara satu orang –paling kuat- lagi yang namanya Soeharto,kadang-kadang sebagai kepala negara, kadang-kadang sebagai kepala institusi, kadang-kadang lebih sebagai Soehartonya sendiri.Dia bisa berbuat segala macam, dan itu adalah keputusan negara, atau keputusan untuk semua orang.Kalau dikritisi, kita sebagai negara ini benar atau *nggak*.Apakah ini kerajaan atau negara ? Ini 32 tahun kita alami dan kita semua mentolerir itu.Tapi untung ada

anak-anak muda yang nekat, yang berani melawan.Akhirnya Soeharto turun juga.

Selama ini memang yang namanya sistem itu, di Indonesia berlakunya minimal sekali.Ada institusi-institusinya,tapi fungsinya *nggak* berjalan.Apalagi peran, tidak ada peran apa-apa.Akhirnya legislatif yang lalu berfungsi dan berperan apa ? Hanya meligitimasi yang kita semua sudah tahu.Dan seolah olah itu benar begitu,dan selama ini kita berpikir itu yang benar.Akhir-akhir ini ada institusi yakni DPA,kalau saya pikir-pikir kiprahnya besar sekali, bisa masuk ke BPPN, cabut orang sana sini, tarik orang sana sini, ransaksi sana sini, apa memang itu fungsinya.Sementara DPR iau minta laporan dari BPK, kan seharusnya dia bisa nemperolehnya, tapi *nggak* dikasih.Yang mana yang benar.Bingung semua kita, dan itu semua sekarang terjadi.

Nah di sini kemudian orang bicara soal apa, soal kepastian aturan main.Norma yang ada yang mengatur institusi ini dan hubungan antara institusi itu yang berjalan.Salah seorang senior saya mengatakan, pemerintahan sekarang ini kesalahan sejarah.Jadi kita anggap ini kekeliruan sejarah. Karena apa yang diatur nggak ada tujuan.Karena ini hubungan antar institusi *nggak* jelas lagi.Juga misalnya kemarin presiden membuat opsi untuk Timor timur, mau terima atau tidak otonomi ini, sementara pada waktu yang bersamaan dia perintahkan pada menlu-nya untuk menegosiasikan aturan main otonomi tersebut.Dan soal Timtim ini sebenarnya ada ketetapan yang lebih tinggi (MPR) yang mengatur. Dalam hal ini saya bukan bicara bahwa mereka berhak merdeka

atau tidak, tapi mengenai hubungan antar kelembagaan itu, begitu.Di sini sudah rancu.

Kalau di Jerman, saya tahu presiden membuat satu keputusan, dan itu bukan hanya presiden melainkan suatu lembaga tinggi negara membuat suatu keputusan salah, ada yang namanya semacam otoritas tertinggi yang berhak menguji kembali aturan yang dibuat.Kalau itu keputusan salah maka dibatalkan, *judicial review.* Ada suatu lembaga otoritas itu, di kita, saya *nggak* tahu apa MA berfungsi seperti itu atau tidak, tapi ternyata diam-diam saja mereka.Nah di sini kita bicara struktur, di dalamnya ada institusi-institusi, dan tatanan hubungan antar institusi yang diatur melalui aturan –aturan main yang cenderung anarkhis saja, kepastiannya itu tidak ada. Dan di sini juga kalau dulu sebelum Mei itu ada satu orang yang terlalu dominan, sekarang cenderung semua orang mau menjadi dominan,anda lihat saja.Semua orang sekarang bisa membuat pernyataan.

Kemudian soal budaya, waktu – waktu yang lalu, kita ada institusi –institusi modern dalam suatu negara.Tapi kalau kita lihat budaya perilaku dari, pelaku politik karena kita tadi bicara soal politik menyangkut pada kekuasaan, kita masih hidup dalam tradisi kalau boleh saya bilang negara Mataraman.Artinya apa, Sementara Ben Anderson, mengatakan bahwa kalau kekuasaan dalam perspektif barat itu sesuatu yang bisa dibagi-bagi dalam trias politika.Tapi dalam perspektif jawa, Mataraman, kekuasaan itu sesuatu yang beku dan tidak bisa dibagi. Dan itu adalah milik satu orang.Jadi institusinya modern tapi budaya dan perilakunya tradisional.Jadi kita ada dalam dua dimensi, budaya tradisional

dengan institusi modern.Jadi *nggak* klop, termasuk legislatif kita begitu. Karena kita terbiasa dalam budaya Mataram, tidak ada yang namanya legislatif, yang ada itu penasehat – penasehat raja, kalau raja mau dengar, syukur, kalau *nggak* ya jalan sendiri.Dan itu yang berlaku.Ada orang-orang di sekitarnya yang menjadi penasehat raja, punggawa punggawa yang boleh ngomong tapi keputusan ada pada raja.

Dua hal, sistemnya dan budayanya seperti itu yang harus kita ubah kedepan.Kemudian soal legislatif yang aspiratif, ini juga tergantung pada individu legislator. Kalau kita lihat sekarang, anggap saja dulu kekeliruan sejarah, kalau sistemnya benar - upakan dulu soal budaya-, tapi kalau individu-individunya, tadi disinggung oleh Pak John dari segi SDM tidak siap, pemahamannya tidak siap, malah jadi diam saja di lembaga terhormat itu. Ini yang paling saya kuatirkan sekarang, karena ada suatu survey, dengan segala respek, ini termasuk partai saya juga, ini kita bicara demi kepentingan kita semua, ini harus kita akui bahwa sebagian besar, 70 % kalau tidak salah pendidikannya SMA atau ke bawah. Tidak berarti ini satu-satunya ukuran bahwa tidak akan aspiratif dan fungsional, tapi ini bisa jadi masukan.Tapi ini harus kita akui ini adalah pilihan rakyat.Bagaimana mengatasi itu, saya setuju ada *parlemen watch*.Juga kalau di PDI-P kita usahakan bahwa litbang itu fungsional untuk *mensupport* mereka.Jadi saya tidak mau jadi legislatif. Biarlah kawan-kawan, kita support mereka.Ini menyangkut pada apa yang harus mereka bicarakan.

Ini juga suatu hal, saya takut,eksekutif, apalagi mereka sangat menguasai persoalan termasuk seluk-beluk pengaturan anggaran, memanipulasi hal-hal kecil, mereka jeli sekali mengatur hal-hal seperti itu.Nah legislatif yang baru, ini belum terlalu mengerti.Tapi mereka bangga sebagai anggota legislatif, yang dipilih rakyat.Tapi kalau kurang pemahaman hal-hal dan trik-trik semacam itu, ini yang mungkin akan terjadi di daerah tingkat II atau propinsi itu, keputusan menjadi sulit.Dan ini juga didukung oleh perimbangan jumlah kursi Dan masyarakat akan lihat, "ah kalian ini berdebat-berdedat tapi tidak ada hasilnya."

Yang kita tunggu adalah keputusan.Jadi perlu ada *parlemen watch*, perlu ada yang mengontrol.Ini fenomena Indonesia yang menarik. Ini saya dukung, karena ini perlu sekali.Nah ini menyangkut pada kesiapan legislatif, sistem, budaya dan individunya.Di samping itu juga kualitas organisasi. Ini berhubungan dengan partai politik.Karena di dalam parlemen parpol itu jadi fraksi. Legislator di parlemen adalah sebagai individu dan sebagai anggota fraksi.Fraksi mana yang paling *qualified* untuk berbicara sebagai aspirator masyarakat di situ, nah kita nilai di situ. Dan juga ada satu hal yang harus kita perhatikan di situ, yakni mekanisme.Nah saya peringatkan kepada kawan-kawan di dewan, karena kebetulan banyak kawan-kawan yang menjadi anggota dewan, saya ingatkan sejak awal supaya tidak membuat satu tata tertib(tatib), karena ini yang dulu menjadi andalan orde baru, yang mengikat kaki kalian sendiri sehinggamembuat kalian tidak bisa bergerak kemana-mana. Karena apa, sebelum mereka masuk ke DPRD I, DPRD yang

sebelumnya telah menyiapkan suatu tatib untuk mereka, maka kalian mesti hati-hati.

Oleh sebab itu dengan segala daya upaya kita ubah semua, dan DPRD I jawa barat menolak itu. Ada yang lucu memang, karena apa, ada keputusan mendagri untuk mengatur tata tertib dewan.Ini suatu penyimpangan undang-undang. Untung mereka sadar, kalau *nggak* bisa merugikan.Kemudian ada satu institusi, yakni sekretaris dewan, ini urusan administratif sebetulnya, tapi mereka terlalu banyak mengatur soal politik Dan dengan segala macam cara mengatakan seolah-olah dewan ini digaji oleh eksekutif, padahal seharusnya mereka kan pejabat politik negara. Tapi karena budget APBN, APBD itu diatur oleh eksekutif jadi seolah-olah mereka itu pegawai eksekutif.Nah kalau digaji seperti itu kan mentalnya juga seperti itu, bagaimana mau berfungsi aspiratif begitu.Nah hal-hal kecil seperti ini harus dirombak, rombak itu Sekretaris Dewan, dia itu urus administratif saja, jangan sampai ada dimensi dimensi administratif yang bernuansa politis.

Nah situasi sekarang di DPR, apakah DPR nanti akan berfungsi aspiratif, dan ada satu poin juga yakni apakah akan terjadi *deadlock* di SU. Harapan saya tidak kalau anggota MPR ini mengerti aspirasi masyarakat. Masyarakat sudah menunjukkan loyal pada aspirasi negara dalam pemilu, loyalitas terhadap bangsa.Sekitar 80% mendukung perubahan ini. Sehingga ini sebenarnya sudah merupakan suatu indikasi masyarakat menginginkan perubahan.Tapi elite politik sekarang mulai bermain, manuver *counter* manuver, sehingga apa yang diinginkan

masyarakat menjadi tidak jelas lagi dengan adanya manuver – manuver ini. Saya harap kalau MPR ini mengerti dan mereka lihat masyarakat menginginkan apa, maka tidak akan terjadi *dead lock*.Kita menginginkan perubahan yang sederhana saja,masyarakat menginginkan perubahan.Jadi kalau MPR itu benar-benar lembaga legislatif yang menjadi aspirasi, seharusnya dilakukan perubahan.Jangan lagi mendukung pola lama, jadi harus dilakukan perubahan mulai dari perubahan kepemimpinan.Jadi jangan pilih lagi orang yang mendukung pola yang lama. Apalagi orang yang mendukung pola anarkhis seperti ini.

Sesi tanya jawab.

1. **Novi , ITB :** Kalau saya lihat dari diskusi ini terutama sesi kedua Pak, ya, yang saya garis bawahi sebenarnya untuk masalah legislatif, mereka sudah punya potensi internal untuk melakukan *checking* terhadap pemerintah. Artinya, mereka sudah dibekali hak untuk mengkritisi pemerintah.Nah sekarang permasalahannya adalah dari pihak legislatif belum ada kemauan maupun budaya internal yang bisa memaksa mereka secara proaktif untuk melakukan kritisi terhadap kebijaksanaan pemerintah.Kalau saya mencoba tarik lebih panjang lagi sebenarnya ini ada masalah dengan kultur.Jadi budaya kita belum terbiasa dengan budaya mengkritisi.Saya ingin minta pandangan bapak-bapak mengenai masalah ini.

Sebenarnya saya sudah coba berpikir dan saya sudah coba mempoinkan, pertama adanya oposisi ekstra parlementer.Dengan adanya kondisi internal legislatif yang seperti itu, tentunya oposisi yang ekstra parlementer harus dicoba difasilitasi oleh legislatif.Yang kedua adalah masalah kultural, yaitu harus ada gerakan perubahan budaya bangsa Indonesia, entah itu secara revolutif ataupun evolutif,agar budaya bangsa Indonesia ini bisa menuju ke arah yang kita inginkan.

2.**Rafel , FKMB:** Saya melihat semua akar permasalahan adalah dwifungsi ABRI.Saya melihat dwifungsi ABRI adalah dosa besar yang tangannya kemana-mana baik di eksekutif, legislatif maupun di yudikatif. Jangan salahkan Mahkamah Agung tidak bisa *judicial review,* karena apa ? Karena MA yang agung itu dari militer.Pak Sarwata itu dari AU.Pasti minta komandonya ke MABES ABRI.Itu yang pertama. Yang saya lihat dwi fungsi ABRI itu sebuah permasalahan besar, sebuah dosa besar yang merusak struktur negara yang menindas rakyat.Buruh tidak bisa merdeka karena ada ABRI dan pemilik modal.

Dan saya coba ingatkan kepada forum rektor.Pemilu kemarin adalah sebagai kepentingan kapitalisme internasional.Kapitalisme internasional tidak berpikir pemilu yang demokratis, tapi yang mereka pikirkan adalah bagaimana investasi aku, bagaimana investasi internasional sampai di Indonesia.Mereka tidak peduli masyrakat Aceh nestapa mereka tidak perduli, dan mereka ini menyumbang uang ke pemantau pemilu.

Pemantau pemilu itu memoderasikan gerakan mahasiswa.Gerakan mahasiswa mandul karena adanya pemantau pemilu.Bulan november gerakan kita sudah kencang, tapi karena ada propaganda pemerintah menyediakan lembaga formal, yakni pemilu, yang didukung kapitalisme internasional, padahal kita sudah bilang kita tidak percaya pemilu.Kami sendiri FKMB tidak percaya pemilu, bukan secara institusional tapi perangkat pemilu tidak demokratis.Masih ada 38 kursi ABRI *kok*.Kita jangan lagi konsesi dengan militer.Teman-teman sudah sering ingatkan bahwa kalau masih ada militer tidak mungkin demokratis.Jadi tidak usah dipantaupun itu sudah tidak demokratis.Ukuran tidak demokratis bukan teknis, teknis tidak adanya pita.

Hakikat pemilu adalah hak dan kewajiban yang sama.Jadi jangan coba kita bodohi rakyat, jangan.Pemilu kemarin itu jela tidak jurdil, kapitalisme internasional jelas bermain di sana dan itu semakin menjalar.Di irian jaya, freefort kan kapitalisme dan mereka sudah mempermainkan pemilu.

3.**Ahmad Zarkasi, Pasca Sarjana UNPAD**:, kepada Bapak Siregar, tadi dikatakan bahwa bapak lebih senang bicara dalam konteks sebagai dosen dan ketua ISKI Unpad. Padahal bapak juga anggota FKP MPR.Tadi Pak Slamet Effendi Yusuf datang, Pak, dan bercerita panjang lebar tadi sayang saya tidak sempat bertanya Pak, apa yang dinyatakan oleh GOLKAR dengan kenyataan di lapangan dalam orde reformasi, sampai saat ini kami tidak percaya Pak.

Indikator itu bisa kita lihat, pertama, polemik-polemik atau kasus yang muncul belakangan ini itu melibatkan orang GOLKAR

sendiri Pak. Setya Novanto orang Golkar sendiri, Pak Baramuli orang Golkar sendiri, jadi bagaimana kami bisa percaya. Pertanyaannya Pak, apa yang dilakukan oleh Golkar itu untuk membersihkan dirinya, khususnya anggota-anggota mereka yang nakal ini untuk membersihkan dirinya ? misalnya dinonaktifkan atau dipecat.Kami mohon penjelasan dari Pak Siregar karena itu yang berkenaan dengan Golkar Pak.

Kemudian untuk Pak John, tadi Pak John telah menjelaskan panjang lebar tentang sejarah negara ini dan politik legislatif, panjang sekali.Tadi saya menyimpulkan bahwa sampai sekarang penyakit itu belum hilang Pak.Nah persoalan selanjutnya agaimana cara menyembuhkan penyakit ini ? Salah satu cara arangkali menurut saya Pak, indikator yang bisa sebagai obat untuk menyembuhkan adalah UU korupsi tahun 74 itu belum kena koreksi.

Untuk Pak Parera, untuk meningkatkan *check and balance* PDI-P sebagai pemenang terbesar dalam pemilu kemarin, apakah bapak yakin Pak, dengan mayoritas anggota di DPR/MPR dari PDI-P mampu melaksanakan *check and balance* itu, kalau dikaitkan dengan cerita Pak John itu. Indikator keraguan kami itu ada Pak, yakni pada waktu pemilihan ketua DPRD DKI. Yang seharusnya memimpin itu orang PDI-P sendiri sebagai ketua justru dari fraksi ABRI/POLRI yang menang. Ini indikator di PDI-P sendiri terjadi perpecahan.

4. **Martua, Tambang ITB:** Tadi Pak John sudah mengatakan kita ini sebagai masyarakat Indonesia sepertinya biasa menerima

kesalahan sehingga kesalahan itu kita anggap kebenaran.Di sini saya melihat kenapa selama 30 tahun kita sulit sekali berteriak menyatakan mana yang salah dan benar, karena sistem pendidikan kita tidak memungkinkan untuk itu begitu. Kita sudah mendapat yang namanya budi pekerti, saya tidak mendapat itu,tapi saya dapat pelajaran agama, ada PMP yang diganti dengan PPKN.Tetapi tetap begitu saja, yang namanya guru PMP/PPKN terkesan ketika kita mau diskusi ke masalah yang *nyerempet-nyerempet* penyelenggaraan negara yang *nggak* begitu benar, mereka sepertinya takut untuk menggiring siswa-siswanya untuk menjadi kritis, mengkritisi segala bentuk penyelenggaraan negara *entah* itu di eksekutif, legislatif, yudikatif yang sebenarnya salah. Nah saya ingin bertanya ke Pak John Sapiie dan Pak Barita sebagai pakar sosiologi kira-kira solusi apa yang bisa menumbuhkan siswa-siswa di Indonesia ini untuk, seperti Pak Barita bahwa kita ini masyarakat yang sulit menerima perbedaan pendapat. Karena menurut saya tidak mungkin kita *ngomong koar-koar* supaya bangsa Indonesia ini menerima perbedaan pendapat kalau di pendidikannya sendiri nggak ada yang menggiring kita. Karena selama ini pelajaran agama juga tidak menjadi jaminan begitu lho untuk seseorang ketika keluar dari perguruan tinggi untuk tidak korup karena ada moralitas agama, itu nggak menjamin.

Untuk Pak Andreas, tadi bapak katakan sebenarnya inti permasalahan di seluruh penyelenggaraan negara itu adalah sistem. Nah Bapak tadikatakan bahwa sistem ini ahrus dirombak. Nah kalo kita balik ke sistem yang ada di pemerintahan lagi, kita kan kembali ke biangnya yakni UUD 45, sementara PDI-P sendiri

sepertinya untuk amandemen UUD 45 saja agak-agak susah. Nah bagaimana kita mengubah sistem kalau UUD 45 tidak diamandemen.

5. **Hetifah , Ketua Presidium Sawarung warga Bandung:** Pertama saya mengucapkan selamat kepada panitia yang mencoba secara komprehensif dengan memperbincangkan pelibatan aktif 4 kekuatan dalam sistem ketatanegaraan.Hanya sayangnya,kita tidak mendiskusikan pelibatan dari satu kelompok yang menurut saya mempengaruhi bersih tidaknya penyelenggaraan negara. Yaitu *private sector.* Karena peran mereka sekarang ini sangat penting tidak hanya dalam *creating* atau *maintain* atmosfer yang kurang sehat tapi juga kalau mereka punya *political will* juga dalam hal memberantas korupsi dan macam-macam, mereka justru bisa menjadi satu kekuatan, kalau mereka bisa menerapkan *good corporate governance.* Itu menjadi suatu *complementary aspect* yang sangat penting di dalam upaya mencapai penyelenggaraan negara yang bersih.

Nah kita bisa lihat kasus bank Bali atau DPD DPRD, saya yakin dalam legislatif kita sekarangpun masih belum mempan terhadap adanya praktik praktik isnis yang sangat tidak etis. Pertanyaan saya kepada Pak Andreas apakah litbang sendiri sudah mulai memikirkan *anticorruption strategy* baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.Mungkin juga sudahmemikirkan moral dan ethical standard untuk legislatif paling tidak untuk PDI-P sendiri begitu.Nah ini pertanyaan sama saya ajukan ke Pak Barita, selama pihak legislatif sendiri kelihatannya mudah tergoda

terhadap pelaku bisnis yang curang itu saya kira kita tidak punya harapan untuk bersikap *balance* maupun *ngecek* orang lain.

Tanggapan Barita Siregar:

Pertama kepada saudara Novi, saya tetap percaya sistem kepartaian kitalah yang selama ini tidak benar yang menjadi kunci kegagalan dari kehidupan perwakilan rakyat kita , kehidupan parlemen kita.Jadi sistemnya sudah tidak betul, internal partainya pun tidak betul.Ini kebetulan, karena kebetulan saya disebut pelaku, katakanlah pelaku figuran, secara internal infrastruktur kita tidak pernah punya kedaulatan. Anda mesti tahu, saya mengalami sendiri bagaimana tokoh partai itu mesti menghadap Gubernur bahkan setiap saat dipanggil dan kemudian mest berurusan dengan aparat assospol bawahan, atai assospolda.Mereka *ndak* tahu apa-apa karena mereka memang diatur.

Daftar calon juga ditetapkan oleh tingkat pusat.Baik melalui mekanisme formal adanya litsus atau mekanisme *kasak-kusuk*.Dan apakah itu sudah berubah belum seluruhnya? Ini termasuk pemilu kemarin. Saya merasa kecewa bertemu dengan rekan partai peraih suara pemilu, mengeluh saya mau ketemu panglima tetapi tidak bisa. Saya bilang kamu *goblok*, kamu panggil panglima, panglima datang ke kamu.Kamu pemegang hak rakyat, kamu lebih berhak daripada panglima.Panggil di restoran untuk ketemu, itulah kedaulatan rakyat.Tapi inilah kondisi internal baik secara struktural maupun budaya.

Menyangkut budaya oposisi, kita memang sulit berbeda pendapat, jangankan berbeda pendapat, bahkan di kalangan mahasiswa, pemilihan di senat mahasiswa, orang bisa palsu saja.Nah, ini menimbulkan friksi, itu karena kita tidak terbiasa berbeda pendapat. Ini yang oleh Pak Andre sebut sebagai mataraman tadi.Maaf kalau ini tersinggung, karena saya sama dengan Pak Parera yang berasal dari seberang sana, budaya mataraman itu kan begini. Saya perhatikan, kenapa dagelan itu saya perhatikan itu orang jawa.Meskipun sebenarnya orang luar jawa tingkat humornya nggak kalah.Karena memang ada budaya melawak di Jawa.Karena di Jawa orang tidak bisa menggelitik ıngsung. Perlunya lawak, dagelan seperti semar segala, adalah ıekanisme kritik dengan sindir-menyindir, yang sekarang kita lihat dengan kepandaian Miing misalnya .Dan itu lebih enak didengar karena diambil dari institusi yang menggelitik.Memang budaya berbeda pendapat pada waktu itu jalan keluarnya melalui melawak.Tapi di luar jawa, hampir tidak ada, yang ada orang jawa berlagak batak jadi pelawak.Itu yang ada, mana ada batak jadi pelawak.

2. Untuk saudara Rafel,saya setuju soal dwifungsi ABRI salah, tapi bukan ABRI.Bagaimana negara tanpa ABRI, itu jelas *nggak* mungkin. Dwi fungsi ABRI itu memang mekanisme yang diciptakan untuk memberikan kekuasaan ekstra kepada sebagian masyarakat sehingga dia bisa mengontrol dengan dalih fungsi hankam, fungsi sospol. Bagaimana suprastruktur bisa bermain sebagai kekuatan sosial politik, kalau tidak mewakili rakyat.

Kalau saya tetap kesalahannya pada Soeharto. Konsep asli dwifungsi ABRI dari Nasution tidak begitu. ABRI termasuk *civic nation*, pengabdian masyarakat, membantu sekolah, membantu segala macam. Tapi oleh Soeharto , hasil Seminar AD , diselewengkan menjadi suatu mekanisme dimana ada kekuatan politik yang bisa ditungganginya yang punya senapan yang kuat sehingga dia berkuasa. Itu dwi fungsi ABRI.Karena itu saya setuju untuk 'dihabisi', tetapi riil politik yang ada yang memang menuntut itu bertahap.

Tapi perwakilan rakyat itu harus murni dipilih rakyat itulah perjuangan kita, itu wajib, itulah namanya demokrasi.Tapi itu bukan salah ABRI.Suatu sistem dimana Soeharto sebagai *mbahnya* adalah jelas, Jenderal purnawirawan itu memanfaatkan ini.Kita setuju alur ABRI pulang ke barak, tapi kalau ABRI hilang juga kita mau apa.

Lalu saya sangat sependapat dengan saudara tentang kapitalisme internasional.Betul, tapi saya lebih berani lagi.Gembong Kapitalisme internasional ada pada diri Habibie.Anda berani ngomong begitu ? Sebab saya merasa di atas angin.Saya setuju, Habibie,mesti harus 'dihabisi'.Habibie sepenuhnya ditekan sepenuhnya oleh IMF.Dia mengikuti, ditekan oleh PBB,dia ikut.Dia hanya memainkan peranan sebagai boneka imperialisme.Jadi kalau kita melawan imperialisme, Habibie juga dilawan.Itu tantangannya, jangan *separo-separo*. Demonstrasi di kedutaan Australia, PBB, tetapi dengan Habibie setuju. Memaki-maki Portugal, UNAMET tidak lulus, Habibie yang kasih opsi kedua

merdeka, dibiarkan.Jadi betul saya setuju.Habibie harus diakhiri.Itu yang penting, terimakasih.

3. Seterusnya, soal Golkar, mengapa saya katakan kedua dan ketiga, jadi sebetulnya status saya sebetulnya bukan anggota Golkar.Karena PP no 12 menempatkan pegawai negeri sipil harus bebas, dan saya memilih melepaskan keanggotaan Golkar.Hanya pada saat konsultasi dengan ketua Golkar, saya menyatakan mengundurkan diri.Katanya , ini bisa jadi urusan, bisa kosong Golkar karena seluruh anggota FKP DPR/MPR itu adalah pegawai negeri. Saya menolak dicalonkan, saya memilih pegawai negeri, karena paling tidak identitas saya selama itu sebagai dosen, dan saya disekolahkan negara untuk jadi dosen. Kalau dulu boleh itu persoalannya. Saya ini statusnya sudah bukan anggota Golkar tapi masih dipecaya untuk ditugasi.Tapi itu kondisi daruratlah, toh tinggal sebentar lagi, tinggal 3 bulan lagi biarin saja masih ada fasilitas. Tapi kalau disuruh milih anda disuruh berhenti, saya akan berhenti.

Nah sekarang soal kepercayaan kepada Golkar, sekali lagi saya katakan begini, saya tidak mengatakan Golkar itu bersih, dia paling berdosa,tetapi kita kembali bahwa sistem.Kita melihat Golkar dari kacamata, bahwa kita melihat organisasi kan dari struktur, ideologi dsb.Saya berani mengatakan cita-cita awal Golkar itu baik, dia mengintrodusir ideologi pembangunan yang ingin mematahkan pengkotakan ideologi-ideologi, yang bisa diterima. Dalam ektrimisasi ada agama islam, nasionalisme, ada sosialisme, dia muncul tetap sebagai ideologi tapi lebih berorientasi

pada pembangunan.Dan inilah yang membuat kami pada waktu itu angkatan 44 terpesona pada ide Soeharto. Karena pada waktu itu,tahun 66 Soeharto masih baik, lalu kita dukung dia. Kita bangun kekuatan sosial politik baru yang berorientasi pada rakyat, ternyata semuanya hanya musang berbulu ayam.Dia lalu menggunakan Golkar ini sebagai alat dia untuk menghancurkan cita-cita.Jadi kuncinya ideologi yang diselewengkan Soeharto, tapi saya pertanyakan apakah tidak ada perlawanan. Katakanlah lemah namun banyak korban yang terjadi sebetulnya.Saya contohkan saudara Marzuki Darusman, tahun 1991 diperintahkan direcall oleh Soeharto.

Memang mayoritasnya sudah *nggak* benar, kedua keberaniannya kurang.Budaya oposisi tidak ada, ketiga hati nurani ada sambil enak-enak, juga di dalam , enak-enak juga jadi *antek* Soeharto.Jadi saya sangat setuju bahwa Golkar tidak boleh menang.Saya forum di jakarta karena saya sebagai tim ahli, kalau negara ini mau selamat, dan Golkar selamat, pemilu 99 Golkar jangan menang untuk memberi kepercayaan bahwa demokrasi itu ada. Dan untuk memberi pelajaran pada Golkar sehingga kekuatan reformis di Golkar bisa ngomong.Dan yang terjadi sekarang adalah itu.Seandainya Golkar menang kemarin tidak akan ada Bank bali, dan Habibie akan mulus.Kan rakyat percaya, meskipun sudah reformasi.Nah gara-gara mencalonkan Habibie Golkar kalah, komisi 8 berani menghantam skandal BankBali. Saya tidak mengatakan ini sangat baik tapi itulah kondisinya. Bahwa sebetulnya perlawanan itu ada. Jadi kalau tidak percaya pada GOLKAR itu hak semua orang.

4. Saudara Martua, memang budaya itu cipta karya dan karsa manusia. Jadi kalau kita memperbaiki memang yang terbaik adalah pendidikan. Karena itu saya harapkan dari kalian, yakni di samping interaksi budaya kita dengan menyerap yang baik dari luar, ini pengalaman saya karena saya belajarnya komunikasi ya, bahwa iklim perubahan memang sangat kuat terutama oleh media massa. Saya mencontohkan begini dalam hubungan orang tua anak,kita belajar dimana masyarakat Barat, kalau mau masuk kamar, kan May I come in ? Please." Baru dia masuk. Budaya orang tua kita tidak begitu. Ini rumah saya, dan saya pernah mengalami konflik dengan anak saya, hanya karena saya bongkar kamarnya dan saya suruh tukang cat mencat kamarnya. Anak saya protes, apa-apaan nih Pah, ini mau diapain. Kok nggak tanya saya. Di budaya saya *nggak* ada seperti itu, bapak *nanya* ke anak. Saya kira memang perlu pendidikan.

5.Dengan Ibu Hetifah, saya *gini-gini* pernah dua periode di DPRD, pernah tim ahli DPR, lalu anggota MPR, saya kurang setuju bahwa kualitas pendidikan, mutu pengetahuan, untuk mengimbangi eksekutif, rendah. FKP itu pintar sebetulnya. Kenapa ? Di pusat bekas Gubernur, bekas Dirjen, bekas Bupati, bekas Panglima. DI daerah ada bekas bupati, bekas kepala dinas, bekas kanwil, kalau disuruh berdebat dia tahu. Saya mengalami bagaimana berdebat diskusi bagus, tapi begitu di DPR berhadapan eksekutif, bebas, tapi ada mekanisme setengah kamar. Ada jalur khusus FKP, ABRI dengan eksekutif. Hanya dengan satu kata menteri bilang ini sudah

sepengetahuan Bapak. Maka selesai. Suatu argumentasi yang indah betul.

Kalau saya persyaratan utama adalah legitimasi dari rakyat dan itu harus melalui pemilu, yaitu sistem distrik.Sehingga dia betul-betul tidak bisa digoda seperti ibu katakan tadi.Dia betul wakil rakyat. Mudah-mudahan DPR bisa dan harus mengubah UU pemilu yang sekarang.Jadi seorang anggota DPR benar-benar bertanggungjawab kepada rakyat dan dia tidak tidak bisa disogok. Kedua, komitmen, bahwa dia betul-betul mencintai rakyat, yang mampu menyerap aspirasi rakyat.Bukan cuma profesor yang hanya mencari keuntungan. Kalau dia pintar, kepintarannya paling tidak ada standard minimal. Namun di sini yang paling penting adalah otodidak yang mau belajar. Dengan basis IQ yang cukup, karena lebih generalistik, dia bisa menguasai masalah.Itu akan lebih bermanfaat sebagai legislator.Itu bisa tercapai kalau proses politik menghasilkan seorang wakil rakyat benar-benar mencerminkan wakil rakyat, bukan kekuasaan.

Tanggapan Soedjana Sapi'ie:

Pertama-tama saya hanya merangkum secara umum pandangan saya. Ini antara kalian mahasiswa, selalu ada ketidakpuasan terhadap sesuatu. Akan tetapi lalu ada frustasi karena merasa tidak bisa berbuat suatu yang riil.Kita bikin demonstrasi, merombak, tapi pada akhirnya bukan itu yang dicapai. Dan itu seringkali terjadi.Karena apa? Karena kalian berhadapan dengan kekuatan semu, dengan kekuatan politik negara yang eksis. Itu problemnya. Saya menghadapi keadaan begini dengan mahasiswa

ITB yang paling berat adalah 78. Pada tahun 78 mahasiswa ITB sudah mengatakan menolak Soeharto. Dan mereka sudah mengeluarkan buku putih yang berisi semua kelemahan presiden. Itu 20 tahun yang lalu.Pada waktu itu tidak ada orang yang percaya saya, dianggap saya adalah orang pemerintah dsb, dan saya harus mengembalikan status kepercayaan harga diri, dan rasa percaya diri mahasiswa, rasa percaya diri seluruh staf akademis. Saat itu adalah satu-satunya pengalaman di Indonesia ITB dididuki ABRI.Buat mahasiswa sekarang itu adalah 20 tahun yang lalu, yang pada saat itu mungkin baru berusia 4-5 tahunan, atau barangkali juga belum lahir. Pada waktu itu inilah poin-poin yang sama berulang-ulang kita katakan pada mahasiswa, akan tetapi kemudian selalu yang terjadi kembali adalah mengapa universitas kita tidak punya keberanian moral, mengapa universitas kita tidak punya keberanian mengatakan sesuatu sehingga mahasiswa merasa kita ini dididik oleh suatu grup, suatu universitas yang semuanya telah terkooptasi pemerintah.Itulah hal-hal yang saya alami,hal-hal yang saya hadapi.

Satu hal yang harus saudara lihat, kalau kita berani melawan arus pemerintah pada waktu itu, mengingat kekuatan yang demikian kuat, demikian dahsyat, *gampang* Pak, orang–orang di DPR, mengapa mereka senang terkooptasi. Sederhana, apakah anda mau meninggalkan kursi anda di DPR dan di recall.Berapa orang yang berani saya lebih baik diracall, dan meninggalkan fasilitas saya sebagai anggota DPR.Berapa dari rektor-rektor yang mengatakan saya lebih baik menjabat sebagai rektor karena itu memberikan segala kepuasan kepada saya daripada saya tidak

menyuarakan hati saya sendiri.Mengapa universitas-universitas juga terkooptasi oleh pemerintah.Ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Kalau ini hanya terjadi di Indonesia, riwayat 30 tahun yang lalu, Ok, itu fenomena.

Saya secara pribadi termasuk orang yang dipecat.Karena saya yang mengatakan pada Pak Menteri pada waktu itu, *approach* yang dilakukan Pak Menteri tidak terlalu baik, tidak saya setujui, maka saya dipecat.Dimana-mana di dunia itu. Kalau menteri mengatakan A, saya mengatakan B pasti salah ya to. Karena *approach* yang dilakukan menteri pada waktu itu, dengan normalisasi kampus,haraplah saudara ingat,bahwa yang dikatakan tidak normal oleh pemerintah itu adalah dunia mahasiswa yang saudara inginkan. Itu dikatakan tidak normal.Sehingga hal tersebut harus dinormalkan. Itulah konsepnya Pak Ali Murtopo Cs yang digodok di CSIS, yang dikeluarkan Menteri Daud Yusuf pad waktu itu. Sayalah yang secara *open* mengatakan pada pak Menteri itu kurang baiklah. Dengan demikian saya dikeluarkan, otomatis itu. Ini terjadi karena di bawah alam pikiran harus ikut dalam suatu kanalisasi pendapat, *that's exactly the ABRI thinking.*Ikut dalam budaya bersama atau anda ditinggalkan atau di luar. Lebih baik saudara keluar, begitu.Jalan pikirannya kan begitu. Akibat situasi begini dunia pendidikan menjadi repot, *it's very difficult*, jelas tidak akan berkembang.Pikiran-pikiran mahasiswa tidak berkembang.

Kemudian datanglah ide-ide untuk reformasi digelindingkan, dikeluarkan.Sekarang saya tanya pada kalian ide-ide reformasi yang kita gelindingkan tahun 97, apakah ide-ide itu

yang jadi, seperti yang saudara bayangkan saya yakin tidak.Kalau kemudian dipertanyakan mengapa jadi begitu, sedangkan yang kita mau begini, *that is* kekuatan riil yang bermain. Dan kalau kekuatan riil yang bermain, itu sama sekali lain dengan kekuatan ideal yang ada pada pikiran saudara. Kalau kita berada pada pandangan riil kekuatan yang ada di Indonesia pada saat ini, berbeda pada saat reformasi sesuai dengan keinginan saudara. Sekarang siapa yang membawa pikiran-pikiran reformasi ke alam riil *power* dan parlemen itu berada di mana. *This's always the problem.* Tapi tidak berarti mahasiswa jangan bersuara, ingat ya, eformasi terjadi karena mahasiswa bersuara, tapi justru indahnya ekuatan mahasiswa mencetuskan sesuatu, kemudian menggugah pendapat orang, sehingga bergulir dan diambil alih oleh kekuatan politik riil. Dan pada waktu kekuatan politik bermain di arena politik yang riil jelas kekuatan itu adalah antara yang konservatif dan modern, mencari kompromínya, mencari mana yang kuat mana yang lemah, maka selalu hal itu kita bicara dengan para mahasiswa *what is possible* pada satu saat, itulah yang harus saudara lihat dan sadari, bahwa itu tidak memuaskan *I agree with you.* Akan tetapi apa yang bisa dicapai pada satu saat itulah yang bisa dicapai pada saat itu. Misalnya contoh yang saudara kemukakan Dwifungsi ABRI, itu riwayatnya lama.Itulah satu kompromi bentuk yang dicapai oleh RI ini untuk menampung kekuatan riil dari ABRI sebagai satu kesatuan yang dicari inovasinya.Dwifungsi itu mengantarkan Soeharto ke 32 tahun itu, dan dipakai oleh Pak Harto untuk kepentingan beliau sendiri.Sekarang dengan riwayat ini saudara mengatakan dwifungsi

adalah salah, banyak orang mengatakan demikian.Kembali kita hidup dalam Indonesia di mana kekurangjelasan itu kita pakai, lalu dipakailah kompromi tertentu. Pada waktu itu riil di lapangan, lalu ABRI diminta untuk menghilangkan kursi DPR , okelah ABRI terima, tapi apakah sama sekali hilang, belum. Apa yang dilihat ABRI dari status di parlemen, turun menjadi 38. Itu suatu konsesi.Mungkin nanti perubahannya lebih turun lagi.Itu tadi merupakan satu siklus dimana ide-ide suatu perubahan itu menjadi suatu langkah yang riil, dengan kekuatan politik riil, dalam area politik riil, betul-betul bermain.

Inilah para mahasiswa, saya bersama kalian, bersama para mahasiswa tahun 1978 di situ kita mulai, di situ kita berdiri, bahwa apa yang bisa mereka capai pada saat itu ya sampai di situ. 20 tahun kemudian ide ini menjadi suatu perubaha.Apakah perubahan yang kita inginkan pada 97/98 betul-betul diwujudkan sekarang, belum.Apa yang kita teriakkan pada 97 saat reformasi barangkali baru terealisir sekian persen.Apakah ini berarti tidak ada hasilnya. Saya tidak menerima itu Pak.Saya katakan ada hasilnya, tapi sebagai satu kepuasan belum, tapi kita suarakan lagi terus.Saya tidak membela sama sekali mengapa universitas-universitas terkooptasi selama 32 tahun.Minimal kekuatan universitas, secara individu maupun grup mempertahankan jiwa independensinya.Itulah yang membawa universitas pada level dimana mereka itu masih bisa diterima sebagai institusi yang dipercaya. Inilah kekuatan kalian mahasiswa, mendobrak segala sesuatu , melontarkan ide-ide, melontarkan perubahan-

perubahan.Tapi perubahan itu tidak akan cepat saudara bisa saudara lakukan. Ini message saya.

Tanggapan Pak Andre H Pareira:

Soal kultur tadi, kalau Pak barita mengatakan di luar Jawa lawak itu hampir tidak ada lawak, benar juga. Saya ingat tahun 1977, itu pertama kali televisi masuk ke flores, sementera di Jawa mulai tahun 60-an. Dan ketika itu selalu ada lawak-lawakan, dan orang di sana selalu mematikan karena mereka tidak mengerti.Tapi ada proses mereka mulai mengerti, mereka menikmati. Kebetulan stri saya juga orang mataram jadi sedikit paham soal-soal begitu.

Kemudian saudara Rafel, dia mengatakan lebih bodoh dari kami, tapi banyak hal yang dia kemukakan saya pikir saya sendiri belum tahu, yakni soal kepentingan kapitalisme internasional.Kita masih mempertanyakan itu, tapi dia sudah bisa men*judge*. Kalau saya lihat pasca perang dingin ini, saya melihat ada kekosongan ideologis, berkebalikan kalau dahulu ada hegemoni ideologis.Kalau kapitalisme erat kaitannya dengan liberalisme, neoliberalisme, neomerchantilisme, lalu ada environtalisme terus ada juga humanisme yang semuanya berkembang, dan kita adalah satu kelompok yang harus menerimanya, suka atau tidak suka. Saya ragu kalau ada dominasi ideologis sekarang mengutip Anthony Hidden yang mengatakan sekarang, dari pendekatannya pada negara, yang dominan sekarang justru *the third way* yang kita lihat di Eropa mulai mucul di Inggris, Tony Blair. DI Jerman, Schoeder, yang arahnya lebih sosialisme demokrat.Indonesia mau jadi apa? Suka tidak suka kita dalam pengaruh ini semua.Apakah

kapitalisme, mungkin ada indikasi ke sana juga, tapi kalau kita tidak pernah merumuskan kepentingan kita apa ya seperti ini. Dalam situasi yang anarkhi semua kepentingan ya akan masuk, kapitalisme ya masuk, apalagi kalau kita punya pemimpin, yang payah.Kalau Habibie ini memimpin terus saya hanya bisa berdoa Tuhan jangan sampai munculkan pemimpin seperti Habibie karena pasti porak-poranda.

Kemudian soal PDI-P bisa melakukan *check and balance*, saya pikir, saya harapkan sekali PDI-P dapat melakukan *check and balance*. Dan potensi itu ada. Dan kalau anda katakan *simple majority* tadi, bahwa ini perlu kerjasama aliansi-aliansi strategis yang bisa mengimbangi. Tapi potensi itu ada.

Soal saudara Martua, tentang sistem yang harus dirombak dan PDI-P mau melakukan amandemen terhadap UUD 45 , agenda PDI P tidak skeptis dengan amandemen UUD 45 itu sendiri seperti yang dikemukakan Ketua Umum Megawati, bahwa amandemen terhadap UUD kita lakukan kalau rakyat memang menghendaki itu. Yang saya maksudkan adalah hal –hal semacam itu, bukan sesuatu yang istimewa sekali begitu. Tapi bagaimana kita melihat bagaimana kepentingan kita kalau kita mau hidup sebagai suatu bangsa, ini jauh lebih penting.Sehingga UUD 45 kita kalau kita mau ubah, saya pikir seharusnya dilakukan perubahan soal presiden, pembatasan masa presiden, dan poin-poin yang lain, dan kita lakukan dalam situasi yang setenang mungkin, dalam kondisi yang *adem ayem*. Karena produk reformasi itu ada perubahan konstitusional yang demokratis.

Dalam negara yang baru muncul, apalagi negara baru dibentuk dalam situasi mendesak, biasanya UUDnya represif. Kemudian proses perubahan itu juga harus mengubah UUD menjadi lebih demokratis kemudian yang akomodatif. Ini tahap tertinggi kalau kita lihat proses perkembangan UUD. Nah kita ini masih mempunyai UUD yang represif.Nah ini yang harus diubah terlebih dahulu, untuk sementara kita masih punya banyak tugas kepemimpinan lain.

Yang terakhir, soal *anti corruption strategy*, PDI-P masih sibuk dengan soal caleg, soal presiden, harus saya akui saja, kita masih sibuk dengan ketua dewan masih sibuk dengan banyak hal.Tapi saya ingin melihat, menghadapi korupsi, saya setuju dengan Pak Bambang Wijojanto, bahwa kita menghadapi hama tikus, yang dalam segala aspek harus kita kerubuti. Satu hal dengan PDI-P itu, kita kerubuti itu.Dan anda punya hak untuk mengontrol PDI-P jangan sampai PDI-P melakukan korupsi. Dan ini yang penting.Dan kesalahan orde baru di situ, ketika orde baru terbentuk, semua orang kemudian terlena tertidur.Saya pikir mulai sekarang teman-teman di PDI P, saya juga menjadi seorang kritikus untuk anda, dan anda harus siap menerima kritik.Biasa saja, bahwa kehidupan bernergara adalah suatu kehidupan yang sangat wajar. Proses kalah menang, itu wajar. Seperti kasus di DPRD DKI, terimalah itu sebagai suatu proses wajar dalam berpolitik.Dan ajarilah masyarakat, bahwa politikus itu melihat kemungkinan terbaik yang bisa dilakukan.Para intelektual melakukan yang ideal, tapi politikus melakukan sesuatu yang

paling mungkin dilakukan ketika ia berhadapan dengan situasi. Dan itulah, *that's politic*.

BAB III

TERCIPTANYA SUATU SISTEM HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MAMPU MENDUKUNG JALANNYA KETATANEGARAAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA

Hukum di Indonesia memang sangat jauh dari adil. Kita tentu galau akan hal ini, bahkan menjadi malu karenanya. Kita tidak perlu memungkiri hal tersebut. Mengutip perkataan orang bijak, untuk menjadi bijak kita mesti bisa mengakui hal-hal pahit, bahkan kalau perlu mentertawakan diri sendiri.

Akan halnya sekarang, bagaimana kita melihat dengan sedih jungkir baliknya hukum kita. Persoalan kasus korupsi kolusi nepotisme mantan presiden Soeharto, dualisme jalur pengaturan aparat hukum oleh Departemen Kehakiman dan Mahkamah Agung, persoalan mafia peradilan, tidak adanya peninjauan produk hukum, peran militer yang besar dalam jabatan-jabatan strategis disini, UUD45 yang mengatur sedikit tentang kekuasaan kehakiman, dan pada akhirnya kita tidak memperoleh jaminan kepastian hukum. Setidaknya 8 masalah tersebut mewakili gambaran betapa coreng morengnya wajah hukum kita.

Hal ini tentu membutuhkan penanganan yang serius. Kita tentu menginginkan kepastian hukum, persamaan hukum, serta hukum yang tidak memihak ke penguasa. Dalam konteks lebih khusus lagi, kita membutuhkan hukum untuk memberi koridor agar

pemerintah berjalan dengan bersih dan baik. Kita pantas bertanya bagaimanakah keseriusan ahli hukum kita mempersiapkan hal di atas ? Apakah dukungan kekuatan reformasi cukup untuk menegakkan hukum kembali ke rel sebenarnya ? Apakah keinginan menciptakan ***clean and good governance*** *harus pincang akibat terkooptasinya elemen yudikatif oleh kekuasaan eksekutif dan militer masa lalu ?*

KPA Konsorsium Pembaruan Agraria

TERCIPTANYA SUATU SISTEM HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MAMPU MENDUKUNG JALANNYA KETATANEGARAAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA

Oleh Prof. Dr. Ismail Sunny

Guru Besar Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum dan Pasca Sarjana

Universitas Indonesia

Dengan bergulirnya reformasi terhadap segala aspek kehidupan bangsa yang dimotori mahasiswa dan perguruan tinggi, Indonesia telah membuka lembaran baru perjuangan untuk mencapai cita-cita menciptakan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sidang Istimewa MPR tahun 1998 telah meletakkan Ketetapan tentang menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Di bidang politik, Ketetapan MPR itu menjelaskan agenda pembuatan undang-undang politik yang sesuai dengan dan mendukung proses demokratisasi, melaksanakan pemilihan umum yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia pada tanggal 7 Juni 1999.

Di bidang ekonomi, menetapkan Demokrasi Ekonomi yang mengutamakan kepentingan rakyat banyak untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat.

Pelaksanaan Pemilu 7 Juni 1999 telah terlaksana dalam kondisi aman, damai, dan tertib. Detik–detik penentuan siapa yang kelak menjadi suara mayoritas dan oposan. Siapapun nantinya yang menang dan kalah harus bisa diterima oleh bangsa kita karena demikian itu merupakan representasi tingkat kedewasaan sosial politik masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sebagaimana yang telah disebut oleh pemrakarsa simposium ini, sudah selayaknya pula bangsa ini mempunyai harapan akan pemerintahan ke depan yang memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat dan dapat memerankan perannya sebagai eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta didukung oleh posisi pers dan NGO (*Non Governmental Organization*) secara proporsional menuju terciptanya *clean and good governance* dalam Indonesia baru yang demokratis.

Kepada saya diminta untuk membicarakan topik: "Terciptany suatu sistem hukum dan perundang-undangan yang mampu mendukung jalannya ketatanegaraan yang bersih dan berwibawa."

Dengan Keputusan Presiden telah dibentuk Tim Terpadu untuk pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif. Diperkirakan diperlukan perubahan Undang–Undang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14/ 1974), perubahan Undang-Undang Mahkamah Agung dan sebagainya. Pemerintah dan DPR yang sedang berfungsi sekarang ini telah memulai perubahan pasal 11 dan 22 UU No. 14 /1974 di mana pengorganisasian, administrasi, personalia hakim telah mulai dipisahkan dari Departeman Kehakiman. Ini memerlukan waktu 5 (lima) tahun

untuk menuntaskan pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif.

Dalam kedudukan sebagai anggota Kelompok Reformasi Hukum dan Perundang-undangan Keputusan Presiden tentang Tugas Pokok dan Susunan Anggota Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani telah dibicarakan hal–hal di bawah ini:

1. Urutan hierarki Perundang-undangan
2. Pertanggungan jawab Presiden
3. Pemilihan Presiden secara langsung
4. Perubahan / Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

Bandung, 18 September 1999

SISTEM HUKUM DAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH*)

*Oleh Suryadi Radjab**)*

Menggantungkan harapan untuk sebuah masa depan yang hendak diraih - pemerintahan yang bersih (*clean government*) - jelaslah mengandung pengandaian sebagai berikut. Pertama, sekarang ini kondisi pemerintahan tidak bersih dan kebobrokan masih sebagai realitas yang tak terbantahkan. Kedua, merajalelanya KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dianggap sebagai persoalan yang harus dibereskan, sahingga harapan tentang pemerintahan yang bersih hendak diraih. Ketiga, pemerintahan yang bobrok ditempatkan sebagai musuh, karena pemerintahan yang bersih pasti bertentangan dengan pemerintah yang bobrok. Keempat, pemerintahan yang bersih tidak bakal terwujud tanpa kemenangan kekuatan-kekuatan yang menjadi pilarnya.

Namun demikian, penting dicamkan bahwa persoalan KKN tidak hanya berdasar pada sistem pemerintahan, melainkan yang terpenting dan pertama-tama adalah pola ekonomi-politik yang dibangun, berkembang dan bertahan selama Orde Baru menguasai Indonesia. Menuju pemerintahan yang bersih berarti ada sejumlah kepentingan ekonomi dan politik lama yang harus dikorbankan oleh kekuatan-kekuatan pro *clean government*. Dan jangan lupa, kepentingan-kepentingan mereka yang menikmati kebobrokan lama, tidak begitu saja menyerahkan kepentingannya untuk

dikorbankan. Perlawanan mereka atas kekuatan pro *clean government* pasti berlangsung. Demikianlah dinamikanya bila ada upaya keras dan konsekuen menuju sebuah harapan bagi lahirnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa pasca- Soeharto.

Tidak mudah mewujudkan harapan sebuah pemerintahan yang bersih, mengingat kekuatan-kekuatan yang diperlukan untuk tujuan ini belumlah cukup memadai, bahkan tidak juga oleh kekuatan hukum yang ada. Kekuatan pilar anti-KKN ada dalam kelompok-kelompok masyarakat, bukan pada aparat pembuat UU. Sehingga penting membahas persoalan ini dengan jelas dan terarah - tidak normatif melainkan secara obyektif - bila hendak menjadi bekal dalam pemberangusan regim KKN.

Mengapa KKN merajalela?

Pemerintahan Presiden BJ Habibie sudah mengajukan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada DPR yang akhirnya disetujui menjadi UU No. 31/1999. Dengan itu, berarti UU No. 3/1971 tidak berlaku lagi. Namun, UU yang baru ini pada dasarnya tidak berbeda dengan UU yang dibuat pada masa regim Soeharto. Kengawurannya kelihatan ketika seseorang diketahui sebagai korban korupsi, dia juga dapat dipidana. Ini bukan saja ngawur, tapi kejam dan sadis. UU ini mengesahkan tindakan negara yang kejam terhadap orang-orang yang justru sudah diketahui sebagai korban. Karena negara (state) tidak bertugas dan tidak berkewajiban melindungi korban, melainkan justru menyelewengkan tugas dan kewajibannya untuk menindas korban.

Sebelum RUU ini disetujui, mungkin ada sebagian kita yang terperanjat "mengapa diajukan RUU itu di mana regim Habibie justru digoncang oleh skandal Bank Bali?" Skandal ini jelas memerosotkan kredibilitas BJ Habibie, karena skandal ini diduga keras ada hubungannya dengan Tim Sukses Golkar untuk pencalonan Habibie sebagai presiden dalam Sidang Umum MPR. Persoalan ini berusaha keras ditutup-tutupi oleh tokoh-tokoh penting yang dituduh terlibat. Perkembangan ini jelas mempersulit terciptanya harapan tentang sebuah sistem hukum dan perundang-undangan yang mampu mendukung ke tujuan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Namun, sebelum menggunakan hukum sebagai perangkat yang mendukung terbentuknya pemerintahan yang bersih, pertama-tama kita harus terlebih dulu memahami secara mendasar, mengapa korupsi merajalela di Indonesia. Lebih tajam lagi, dari hubungan macam apakah korupsi itu bersumber?

Ada yang bilang bahwa korupsi sudah menjadi budaya di Indonesia. Namun, yang tidak dijelaskan adalah mengapa korupsi bisa sampai menjadi budaya? Dengan pertanyaan ini, jelas bahwa korupsi bukan semata-mata persoalan budaya. Akar persoalan korupsi tidaklah di tingkat budaya, melainkan yang paling pokok adalah ekonomi di mana sebuah tindakan korupsi bisa dibuktikan

---

*) Makalah ini disampaikan daiam Simposium Nasional *Clean and Good Governance*, dengan tema "Mencari Arah-arah Menuju Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa", pada 18 September 1999, yang diselenggarakan *Center for Information and Development Analysis* (CIDA), Hotel Jayakarta, Bandung.

**) Sekretaris Badan Pengurus PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia) Jawa Barat, Bandung.

secara material atau kongkret. Dengan demikian, budaya korupsi berakar pada ekonomi KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

Bagaimana akar-akar korupsi bisa dilacak? Perlu dicamkan bahwa kekuatan koruptif tidaklah tumbuh dalam tempo satu malam, melainkan mempunyai perjalanan yang panjang. Asal-usulnya dimulai pada permulaan dekade 1950-an yang meletakkan perencanaan ekonomi Program Benteng, berkembang sejak "nasionalisasi" perusahaan asing pada 1957, mencapai puncaknya pada 1975 ketika oil boom yang menjadikan Pertamina sebagai pusat keuangan negara, serta merajalela sampai sekarang.
Sebenarnya saya sudah membahas persoalan itu dalam buku erbitan Grasindo, berjudul Praktik Culas Bisnis Gaya Orde Baru. Jamun, untuk kepentingan diskusi ini, saya hanya membahasnya secara sangat ringkas saja.

Program Benteng diselenggarakan di atas kondisi ketiadaan pengusaha domestik-pribumi yang bisa menggantikan posisi para pengusaha domestik-Cina dan yang terpenting menggantikan pengusaha asing. Sehingga yang berkembang adalah perencanaan ekonomi negara. Dalam arti ini, negara (state) - melalui pemerintah - berperan dominan dalam perekonomian nasional. Inilah yang menandai ide nasionalisme ekonomi, betapapun hipokritnya sebagian pemimpin opurtunis yang memanfaatkan sentimen nasionalisme itu.[1] Dalam nasionalisme ini para pengusaha pribumi dimanjakan, tapi tetap gagal menjadi tulang punggung kekuatan ekonomi nasional. Karena banyak di antara mereka yang menjual lisensi impor dan ekspor ke pengusaha Cina dan asing.

Pada 1957 terjadi "nasionalisasi" psrusahaan Belanda dan asing lainnya. Perusahaan-perusahaan ini kemudian jatuh ke tangan para perwira militer AD. Pada 1958 dibentuk Kementerian Stabilisasi Ekonomi yang dipimpin oleh Kolonel Suprajogi serta di daerah dikuasai Badan Pengurusan Perusahaan Daerah (Bappeda) yang dikepalai Jenderal Baramuli. Para perwira itu juga membentuk Finek (Finansial dan Ekonomi) di tiap Kodam (Komando Daerah Militer) untuk membangun dan mengembangkan jaringan bisnisnya yang hernama PT Tri Usaha Bhakti. Kebanyakan usaha mereka termasuk cepat menghasilkan keuntungan.[2] "Nasionalisasi" ini merupakan momentum terpenting bagi pembentukan kepentingan bisnis para perwira militer yang justru dibangun dalam tubuh negara – sama sekali tidak mandiri.

Kekuasaan negara yang mencampuri dan mengatu perekonomian memang telah menjadi rebutan para birokrat politi bukan saja untuk kepentingan membentuk pola investasi negara, melainkan juga untuk mengendalikan alokasi konsesi negara terhadap sektor swasta. Berdasarkan kepentingan inilah para birokrat-politik mengalokasikan lisensi-lisensi impor dan ekspor, pengeboran minyak, hak penebangan hutan, kontrak atas proyek-proyek teknik sipil, bahkan izin penanaman modal. Dengan menggunakan posisinya, para birokrat-politik berkesempatan untuk mempengaruhi posisi perusahaan swasta dalam struktur pasar. Kendali politik seperti ini jelas menyediakan sumber-penghasilan, patronase dan kekuasaan politik untuk menunjang penguasaan ekonomi maupun politik pada para pejabat negara.[3]

Ketika Jenderal Besar Haji Mohammad Soeharto mengambil alih kekuasaan politik dengan merubuhkan regim Soekarno pada 1965-1966, maka sejak itu jelas secara politik, Indonesia dipanglimai oleh jenderal-jenderal. Memang, tamengnya "ekonomi adalah panglima", tapi sebenarnya yang menjadi panglima adalah para jenderal. Daiam tangan para jenderal inilah hampir seluruh kekayaan Indonesia - kekayaan alam dan tenaga kerja - dijual atau diperdagangkan ke pihak asing, dengan mengundang modal asing beroperasi dan ketergantungan pada utang luar negeri.[4]

Pasti, modal asing tidak menyia-nyiakan dan kepentingannya untuk mengeksploitasi kekayaan alam dan kaum pekerja Indonesia. Sampai pertengahan 1970-an, modal asing mencapai 57 persen dari seluruh investasi non-migas. Inilah semua kebijakan para panglima Indonesia - jenderal-jenderal itu - melalui tangan-tangan ekonom. Kekuasaan para jenderal dalam politik dan bisnis memperoleh dukungan modal asing dan pemerintah asing yang tergabung dalam IGGI (Inter-Governmental Group on

---

[1] Lihat Richard Robison, *Indonesia: The Rise of Capital*, Sydney, Allen & Unwin, 1986.

[2] Harold Crouch, "General and Business in Indonesia", Pacific Affairs, Vol. 48, No. 4, 1975/76.

[3] Richard Robison, Op.cit.

[4] Sampai sekarang Indonesia gagal melunasi utang luar negeri maupun membebaskan diri dari modal asing. Bahkan utang luar negerinya sekarang ini diperkirakan sekitar 200 milyar dolar AS. Sehingga ada guyon yang mengatakan bahwa setiap orang Indonesia - dengan jumlah penduduk 210 juta jiwa - berutang hampir 1.000 dolar/jiwa. Seakan-akan bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjerat lehernya dengan utang luar negeri.

[5] Richard Robison, "Politik Restrukturisasi Ekonomi di Indonesia Pertengahan 1980-an", *Tanah Air*, No. 4, September 1991.

Indonesia) yang berganti baju menjadi CGI (Consultative Group for Indonesia).

Pada pertengahan 1970-an, penguasa Orde Baru memperoleh "rejeki nomplok" karena melonjaknya harga migas secara drastis. Pertamina secara mendadak kebanjiran petrodollar. Dengan petrodollar, para jenderal mulai menunjukkan keperkasaannya baik dalam investasi domestik maupun terhadap modal asing. Dengan kebijakan yang bertameng nasionalis itu, para jenderal dan pengusaha utama mulai mengkonsentrasikan kekuasaan ekonomi maupun pemilikan modal domestik di tangan mereka. Ini berarti bergabung ke dalam struktur monopoli dan oligopoli ciptaan negara, demi menjamin posisi maupun kepentingan mereka.[5] Pada titik ini Jenderal Ibnu Sutowo yang memimpin Pertamina berbentrokan dengan para ekonom Bappenas yang pro pasar bebas. Kekuatan kubu Ibnu Sutowo lebih besar, karena memang didukung oleh sejumlah jenderal yang menjadi panglima-panglima "pembangunan".

Itulah dasar-dasar terbentuknya patronase bisnis (business patronage) yang menempati posisi dominan dalam perekonomian. Patronase bisnis ini disebut juga "ekonomi KKN", karena kekayaan negara menjadi "sapi perah" untuk kepentingan memupuk kekayaan maupun bisnis keluarga para pejabat tinggi. Tanpa modal, mereka bisa memupuk modal, melalui kekayaan negara yang mereka korup dan kebijakan negara yang diselewengkan. Maka, tidaklah mengherankan bila terjadi skandal Taman Mini, Pertamina, Bulog, Bapindo, Bank Indonesia, perkreditan raksasa, skandal penggundulan hutan, pengurasan kekayaan

alam, skandal pembelian kapal perang bekas Jerman Timur, dan terakhir skandal Bank Bali.

Patronase bisnis membutuhkan dukungan, tidak berasal dari rakyat melainkan dari birokrasi. Dukungan birokrasi ini bersifat permakluman atas beroperasinya patronase bisnis. Permakluman ini jelas membutuhkan imbalan. Apa imbalan yang bisa dipetik para pegawai birokrasi? Imbalannya adalah mengoperasikan aparat birokrasi yang korup dan pada tahap perkembangan mutakhir terbentuk "birokrasi pungutan". Dengan imbalan ini sebagian pegawai birokrasi tumbuh menjadi lapisan OKB (orang kaya baru). Ini bisa dibuktikan dengan sangat mudah berdasarkan "pembuktian terbalik."

Dukungan aparat birokrasi yang korup tetap belum cukup. Patronase bisnis memerlukan sebuah dukungan regim politik yang otoriter. Dengan retorika "pembangunan membutuhkan stabilitas politik dan keamanan", berarti kelompok-kelompok yang mempersoalkan KKN akan berhadapan dengan kekuatan regim otoriter, terutama aparat militer. Orde Baru jelas-jelas mengesahkan beroperasinya Dwifungsi ABRI/TNI untuk tujuan mendukung karakter pemerintahan yang bobrok serta mendukung kepentingan keamanan patronase bisnis itu.

Apa fungsi hukum?

Singkat namun cukup jelas, mengapa KKN merajalela. Selanjutnya, kita perlu mengupas, di manakah letak kekuatan hukum untuk menyeret gembong-gembong utama KKN ke pengadilan?

Benar bahwa korupsi adalah perbuatan melawan hukum, namun persoalannya mengapa gembong-gembong koruptor tidak dapat diseret ke muka hukum? Memang ada UU Anti Korupsi, namun para penegak hukum tidak mampu menegakkan UU bagi para pelaku tindak korupsi, terutama gembong-gembongnya. Maka, bisa dikatakan bahwa UU Anti Korupsi itu hanyalah koleksi, 'bukan digunakan untuk mengadili dan menghukum para pelaku tindak pidana korupsi. Seakan-akan ada dasar hukumnya untuk memberantas korupsi, karena kenyataannya UU ini memang tidak berdaya.

Siapa yang menyebabkan UU Anti Korupsi tidak berdaya? Siapa lagi kalau bukan pemerintahan yang bobrok bersama-sama kekuatan ekonomi KKN yang dilindunginya. Bahkan melalu Dwifungsi militer, aparat ini menjadi alat regim KKN. Sehing ekonomi KKN atau patronase bisnis bisa dipertahankan. Itu berarti UU Anti Korupsi yang dikeluarkannya tidak lebih sebagai dalih untuk mengelabui rakyat bahwa pemerintahan yang bobrok itu tidak membenarkan korupsi.

Keberhasilan untuk menciptakan dalih atas nama UU Anti Korupsi untuk mengelabui rakyat, maka Orde Baru dapat melanggengkan sistem ekonomi, pemerintahan dan birokrasi KKN. Ke-kuatan-kekuatan ekonomi KKN sangat terjamin dan terlindungi atas fungsi regim politik, birokrasi dan aparat penegak hukumnya yang korup, serta UU Anti Korupsi sebagai alat untuk target mengelabui rakyat.

Apa yang bisa kita petik dari mandulnya perangkat hukum untuk menyeret para pelaku tindak pidana korupsi secara konsekuen? Bahwa penegakan hukum tidak bisa berjalan sesuai harapan tanpa kekuatan politik yang menopang. Artinya, basis hukum adalah politik, serta basis politik adalah ekonomi. Lihat saja, produk-produk hukum di bawah Orde Baru adalah sesuai dengan kepentingan regim KKN. Tidak pernah ada produk hukum yang keras terhadap regim KKN. Logisnya, tidak ada regim yang mau menghukum atau mengadili kejahatannya.

Untuk membereskan sistem KKN, Orde Baru harus dirombak total. Artinya, harus ada reformasi total daiam sistem ekonomi, pemerintahan dan birokrasi yang dibangun, diperkuat dan lipertahankan oleh Orde Baru selama ini. Kebobrokan Orde Baru tidak mungkin dibereskan dengan cara mencicil, misalnya, dibuat UU terlebih dulu, kemudian dibuat kebijakan yang tepat. Ini bukanlah persoalan matematika, melainkan dinamika sistem ekonomi, pemerintahan dan birokrasi yang berwata KKN, yang satu sama lain saling tumpang tindih. Karena, realitas sistem sangat rumit dan tidak mudah ditangkap atau dibaca bagaimana dinamikanya berlangsung di masyarakat.

Bila kita tidak punya paradigma yang bertentangan dengan kebobrokan Orde Baru, maka seluruh cita-cita dan harapan akan pemerintahan yang bersih, hanyalah mimpi di siang bolong. Karena, mereka yang berharap-harap atas pemerintahan yang bersih tidak berbeda dengan Orde Baru. Bila tidak berbeda, bagaimana mungkin mereka bisa menghasilkan sebuah

pemerintahan yang bersih yang berdiri di bawah Orde Reformasi Total?

Apa yang dibutuhkan untuk tujuan mendirikan pemerintahan yang bersih? Pertama, paradigma yang bertolak belakang dengan Orde Baru, persis seperti Orde Baru yang mengubur Orde Lama. Seluruh sendi-sendi sistem Orde Baru harus dianggap bobrok, sehingga ada dasar logis untuk kepentingan merombak total atas sistem yang sudah dibangun dan dipertahankannya selama ini. Paradigma reformasi total dapat dijadikan pegangan untuk menyikapi dan mengakhiri riwayat Orde Baru.

Kedua, paradigma reformasi total tidak akan berarti bila tidak ada penggalangan kekuatan politik pro reformasi total secara tegas dan terarah. Karena, setiap perubahan senantiasa memerlukan kekuatan perubahan tersebut. Kekuatan pro reformasi total harus dihimpun, diorganisasikan dan dipertentangkan dengan kekuatan pro KKN. Kekuatan pro KKN harus dilucuti, sehingga kekuatan pro reformasi total dapat mengambil tempat daiam sejarah perubahan politik.

Ketiga, bila kekuatan pro reformasi total memenangkan pertarungan politiknya, maka dapatlah disusun dan diarahkan bagi pembentukan sistem hukum dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan sistem ekonomi, pemerintahan dan birokrasi KKN. Kekuatan pro reformasi total bisa mengusulkan perubahan mendasar atas UUD dan memastikan pengesahannya melalui referendum, menghasilkan UU Reformasi Total, UU Pemerintahan Bersih, UU Kekayaan Pejabat, UU Anti Patronase Bisnis, UU Kemandirian MA, UU Kemandirian DPR, UU

Kemandirian MPR, UU Pemilihan Presiden Secara Langsung, UU Kebebasan Serikat Buruh, UU Otonomi Kampus dan Kebebasan Gerakan Mahasiswa, UU Kebebasan Politik, UU Penegak Hukum, serta UU Anti KKN.

Dengan pengandaian menangnya kekuatan pro reformasi total dan terarahnya serangan yang dilancarkan, fungsi hukum dalam era ini akan mengikuti Gerak reformasi total yang dicanangkan. Dengan pengandaian ini pula sistem hukum dan perundang-undangan menjadi lebih kuat untuk membongkar dan menyeret para pelaku tindak pidana korupsi. Dan akhirnya, pemerintahan yang bersih adalah buah yang kelak dipetik.

Presentasi dan Diskusi

Ismail Sunni, Guru Besar Fak. Hukum UI:

(TERCIPTANYA SUATU SISTEM HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MAMPU MENDUKUNG JALANNYA KETATANEGARAAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA)

Dengan bergulirnya reformasi terhadap segala aspek kehidupan bangsa yang dimotori oleh mahasiswa dan perguruan tinggi, Indonsia telah membuka lembaran baru perjuangan untuk mencapai cita-cita memantapkan kesejahteraan rakyat Indonesia, dalam kegiatan berbangsa, lahir dan batin.

Sidang Umum MPR tahun 1998 telah meletakkan ketetapan tentang penegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, selama 32 tahun kita telah perjuangkan supremasi hukum yang tertera didalam UUD 1945, dengan mengharapkan suatu tatanan yang disebut dengan negara hukum dan demokratis, upaya pengembalian supremasi hukum baru dapat kita perjuangkan pada kesempatan kali ini. Kondisi ini merupakan kesempatan karena yang ada pada jaman soekarno, kekuasaan itu berkiblat pada supremasi politik dan dalam masa soeharto kekuasaan berada ditangan supremasi ekonomi.

Dibidang politik, ketetapan MPR menjelaskan agenda pembuatan Undang-Undang politik yang sesuai dengan dan mendukung proses demokratisasi, melaksanakan pemilu yang

jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia pada bulan Juni dan iu sudah terlaksana.

Di bidang ekonomi, Ketetapan ini menetapkan demokrasi ekonomi yang mencantumkan dan mengutamakan kepentingan rakyat banyak, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat banyak.

Pelaksanaan pemilu 7 Juni telah terlaksana dengan aman, tertib dan damai, detik-detik penentuan siapa yang kelak menjadi suara mayoritas dan oposan, dan siapapun yang nantiya akan menang dan kalah kelak akan bisa diterima dan harus bisa diterima oleh bangsa Indonesia, karena hal yang demikian ini mencerminkan tingkat kedewasaan sosial politik masyarakat Indonesia. Oleh karena itu seperti yang telah disebut oleh pemrakarsa simposium ini, sudah selayaknya bangsa ini mempunyai harapan akan pemerintahan kedepan yang memiliki egitimasi yang kuat dari rakyat dan dapat memerankan perannya sebagai eksekutif, legislatif dan yudikatif serta didukung oleh oposisi pers dan NGO's (*Non Governance Organization*) secara proporsional menuju terciptanya Clean & Good Governance dalam Indonesia baru yang demokratis.

Membicarakan topik terciptanya sistem hukum dan perundang-undangan yang mampu mendukung jalannya ketatanegaraan yang bersih dan berwibawa, perlu diuraikan proses berikut dalam membangun kerangka hukum yang diinginkan.

Melalui keputusan presiden Republik Indonesia, dengan dibentuknya Tim Terpadu untuk pemisahan secara tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif, sesuai dengan ketetapan MPR Tap No. 10 tahun 1994, telah dilaksanakan dengan

mengangkat ahli untuk menegakkan supremasi hukum, penegakkan supremasi hukum ini diperkirakan perlu untuk mengadakan perubahan undang-undang kekuasaan kehakiman (UU no 14/1994), termasuk didalam kerangka kerja turut meninjau upaya perubahan undang-undang untuk kekuasaan mahkamah agung, dan juga kekuasasn hukum lainnya. Pemerintahan dan DPR yag sedang berfungsi sekarang telah memulai perubahan pasal 11 dan 22 UU no. 14/1974 dimana pengorganisasian, administrasi, dan masalah kepersonaliaan hakim telah mulai dipisahkan dari departemen kehakiman yang biasanya/sebelumnya dikenal satu atap. Pelaksanaan kerja ini diperkirakan memerlukan waktu selama lima tahun untuk menuntaskan proses pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi kekuasaan yudikatif dan kekuasaan eksekutif, untuk menuntaskan proses pemisahan ini secara tegas yang kemudian dilaksanakan oleh pemerintah dan DPR dengan merubah bab 1 (satu) merubah undang-undang no 14/1974.

Didalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia pada jaman pemerintahan Soekarno, undang-undang kehakiman yang ada memberikan hak kepada presiden untuk ikut campur tangan dalam pelaksanaan pemerintahan, hal ini terbukti ketika presiden mempunyai hak untuk mengirimkan surat kecil atau katabelece kepada hakim dalam menangani kasus terdakwa sipil (putusan yang dilakukan melalui wewenang presiden), apak sang terdakwa akan dihukum ataukah dibebaskan. Sementara dalam permulaan orde baru sudah diupayakan untuk diubah, dengan menginterpretasikan apa yang disebut oleh UUD, bahwa

kekuasaan departemen kehakiman mepunyai kekuasaan yang merdeka dan independen. Ternyata pengakuannya terbalik dimana Mahkamah Agung masih mengakui adanya campur tangan presiden selama ini tidak dapat dihentikan, untuk itulah diperlukan dalam pemerintahan sekarang dibentuk tim untuk pelaksanaan pemisahan kekusaan, pada pemerintahan habibie tim ini dibentuk yang secara langsung di pilih oleh menkowasbang Hartarto, yang selanjutnya menunjuk pakar hukum untuk duduk dalam tim pelaksana, hal ini di lakukan karena dia (Hartarto) bukan ahli.

Pada kondisi sekarang yang belum dilakukan dalam negeri ini adalah mencontoh Amerika Serikat dalam pelaksanaa pemerintahan dengan model pembagian kekuasaan secara *separation of power* bukan lagi menggunakan model *division of power* dalam pembagian kekuasaannya. Kondisi itu menginformasikan dimana dipisahkan betul model kekuasaan yang ada dalam negara, karena kita tidak bisa memisahkan kekuasaan legislatif dan eksekutif di negara ini sementara yang membuat undang-undang adalah pemerintah dan DPR, kecuali jika kita mengamandemen UUD yang ada, karena penting dalam suatu negara adanya pemisahan kekuasaan bukan seperti yang diangkat oleh montesque (semua harus dipisah), karena dia dianggap salah dalam menerjemahkan pemerintahan di Inggris karena dia merupakan orang Perancis yang pergi ke Inggris dan mengarang buku tentang teori pembagian kekuasaan.

Inggris tidak melakukan pemisahan kekuasaan seperti halnya di Indonesia, dalam pembuatan undang-undang di Inggris

dilakukan oleh raja, pemerintah, dan parlemen sebagai bagian dari elemen kekuasaan di Inggris. Dan yang betul-betul ada pemisahan kekuasaan adalah Amerika sehingga bisa dianggap bahwa Amerikalah negara hukum meski bisa dibilang tidaklah seperti itu, bisa jadi Inggrislah negara hukum walaupun pada kenyataannya tidak dilaksanakan proses pemerintahan secara terpisah.

Yang terpenting dari teori pemisahan kekuasaan adalah pemisahan kekuasaan dari kekuatan kehakiman dan ini merupakan suatu hal yang mendasar untuk ditindaklanjuti, karena kekuatan di Amerika Serikat, dimana kekuasaan yudikatif benar-benar terpisah, hal ini dibuktikan dengan keberadaan Hakim Agung di Amerika Serikat bisa meng-*impeach* terhadap presiden dan dituduh di muka kongres yang dimulai prosesnya pada *house of representatif* secara terbuka yang selanjutnya keputusan senat akan memberikan andil dalam keputusan akhir, didalam prosedur *impeachment* ini di Amerika belum pernah sampai menjatuhkan seorang Presiden, dimasa *Edward Johnson* belum terealisasi proses *impeachment* karena kurang satu suara, sementara pada masa Clinton, seperti yang kita saksikan proses ini terhenti karena tidak cukup suara untuk merealisasikan proses tersebut. Namun ironisnya anggota-anggota Mahkamah Agung Amerika Serikat banyak yang diberhentikan dan juga dihukum karena menerima suap atau melakukan tindakan mal-praktek dalam wilayah hukum, hal ini menyimpulkan bahwa Amerika Serikat membangun argumentasi *impeachment*-nya lebih banyak diperlukan pada hakim atau wilayah departemen kehakiman, realitas ini yang mungkin belum dicoba di Indonesia, dan ini diharapkan menjadi

keinginan masyarakat dan akan dilaksanakan oleh pemerintahan yang akan datang.

Pembagian kekuasaan dengan *judicial review* yang diinginkan oleh masayarakat, seperti yang dilaksanakan oleh John Marceel (debator kekuasaan kehakiman), Hakim Agung hanya bisa berpendapat dengan membawa ketentuan nilai yang dibawa undang-undang dan sekarang kita coba untuk melihat kembali kebijakan yang ada atas undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945.

Kemudian dengan batas umur pengangkatan Hakim Agung yang akan dilakukan seumur hidup, karena hal ini memungkinkan, namun jika melakukan pelanggaran, secara personal hakim agung oleh dewan kehormatan agung akan di-*impeach* di MPR, dan diberi kesempatan yang baik dan diperlakukan sesuai aturan hukum.

Pertangungjawaban Habibie atas perintah MPR (mandataris) untuk mengesahkan kekuasaan eksekutif dan yudikatif, namun begitu akan lebih detail dalam batas-batas hukum. Jadi jika kita sudah mencoba memperbaiki kekuasaan kehakiman termasuk upaya moderator (sebagai penulis) merupakan individu yang pernah mengkritisi kebobrokan di dalam kehakiman, dimana telah terjadi proses penyuapan dan kolusi. Sebenarnya, ada baiknya jika korupsi dihilangkan dengan melakukan dengan kompensasi pada gaji dan insentif bagi pegawai negeri yang berani menyuarakan *clean and good governance* ke masyarakat karena jika gaji kecil, suatu hal yang mustahil mungkin akan terjadi kewibawaan hukum di Indonesia.

Mahasiswa harus mempelopori, dengan melakukan ketentuan yang baik dengan pelaksanaan *good governance*. Dalam kedudukannya sebagai anggota kelompok reformasi hukum dan perundang-undangan, keputusan presiden tentang tugas pokok dan susunan anggota tim nasional refomasi menuju masyarakat madani telah membicarakan hal-hal berikut:

1. Urutan hierarki perundang-undangan dengan mengubah tap MPR no 62
2. Pertanggungjawaban presiden
3. Pemilihan presiden secara langsung
4. Perubahan/amandemen UUD 1945

Yang ditangani oleh Bagir Mannan dari Unpad. Bidang ini menjadi ketentuan perundangan untuk menertibkan aturan hukum di Indonesia, dalam membangun *Clean and Good Governance* di wilayah departemen kehakiman. Dan dalam penciptaan undang-undang tidak bisa dipercepat dan pelaksanaan *separation of power* bukan *division of power*, serta upaya membangun ide pelaksanaan *impeachment*.

Dalam pemisahan wilayah kekuasaaan di pemerintahan tidak perlu dan tim ini tidak ada maksud untuk mengubah UUD 1945, karena wilayah kekuasaan kehakiman adalah merdeka, dan tidak diperlukan mengubah legislatif karena hal ini telah menjadi wewenang pemerintah dan DPR, dan yang kita pisahkan adalah kekuasaan eksekutif dan yudikatif maka model *separation of power* ini yang akan kita pisahkan, dan kekuasaan yudikatif tidak bisa dicampuri oleh pihak lain selanjutnya undang-undang yang akan diubah adalah undang-udang No. 14/1974.

sekarang dalam politik, ada partai yang kuat belum menyetujui perubahan UUD maka proses pembentukan tim ini hanya dilakukan sebagai persiapan pembentukan komisi perubahan UUD dalam kurun waktu satu tahun dan bisa di perpanjang jika diperlukan.

Sesi Tanya Jawab

1. **Panji Wibisono, STPDN:** Ini pembicaraan tentang usulan *separation*, apakah hal ini siap dilaksanakan sementara UUD belum dirombak, dimana tugas kepala negara masih memegang hak di wilayah eksekutif, lagislatif, dan yudikatif ?
2. **Endang Swandi, Planologi ITB** : Pemisahan eksekutif dan yudikatif tidak perlu diubah dalam UUD, sementara kita melihat UUD dibuat dengan keterburuan, dan adanya anggapan, Apa dan bagaimana prospek yang bisa ditawarkan dengan adanya pemisahan yang akan dilaksanakan tersebut untuk membangun kemandirian kehakiman tanpa ada campur tangan pihak lain ?

Tanggapan Ismail Sunni :

1. Jika hanya pemisahan wilayah tidak perlu/tidak bermaksud mengubah UUD, karena wilayah kekuasaan kehakiman adalah merdeka, dan tidak ada maksud mengubah legislatif dan ini menjadi wewenang pemerintah dan DPR, dan yang kita pisahkan adalah kekuasaan eksekutif dengan yudikatif. *Separation of power* ini yang akan kita pisahkan, dan kekuasaan yudikatif tidak bisa

dicampurtangani oleh pihak lain dan UU yang akan diubah adalah UU no14/1974.

Sekarang dalam peta politik kita, ada partai yang kuat belum menyetujui perubahan UUD dan ini hanya dilakukan sebagai persiapan pembentukan komisi perubahan UUD dalam kurun waktu satu tahun dan bisa di perpanjang.

2.Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 25 dan 26 menegaskan dengan memberi ketentuan yang kuat atas wewenang kehakiman, sementara di satu pihak pengorganisasian, administratif dan personalia dipegang Dewan kehormatan kehakiman. Selanjutnya Dewan kehormatan kehakiman membangun kontrol atas kekuasaaan kehakiman, dan ini berkaitan dengan prose pertanggugjawaban untuk memberi wewenang lebih terhadap kekuatan kehakiman, dan jika kita lihat menteri kehakiman nantinya harus diupayakan terlepas dari kekuasaan pemerintahan.

Suryadi Radjab, Sekjen PBHI BANDUNG:

(SISTEM HUKUM DAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH*)

Persoalan *Clean & Good governance* menjadi menarik manakala pemerintah habibie diguncang kasus Bank Bali, dan ini cukup menggegerkan percaturan politik menjelang Sidang Umum, dan dalam topik ini dan kita mencoba berangkat dari asumsi pemerintah yang bersih dan berwibawa itu seperti apa sih bendanya, karena selama ini seakan-akan kita hanya terbang

diatas awan atau langit dan kita belum muncul dari bumi kita sendiri, dan dalam topik ini pendekatan hukum tidak secara langsung bisa menyelesaikan masalah atau tidak memenuhi, akan tetapi juga dibutuhkan pendekatan ekonomi politik artinya satu pandangan yang kita punya merupakan harapan aka munculnya pemerintahan bersih, dengan asumsi terbalik pemerintahan yang ada sekarang adalah pemerintahan yang bobrok.

Merajalelanya KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme) merupakan realitas yang tak terbantahkan, masalah ini yang diungkit-ungkit oleh gerakan-gerakan yang terjadi di masyarakat, dan saya juga mencoba meyakinkan bahwa pemerintahan yang bersih merupakan musuh dari pemerintahan yang bobrok dan itu merupakan realitas atas kondisi bahwa kita selayaknya siap untuk melawan kondisi, dan jika kita berharap membangun pemerintahan yang bersih yang berwibawa asumsi pertentangan ini yang harus dikukuhkan. jika tidak berangkat dari asumsi ini, maka kita tidak akan pernah jelas posisinya, kita akan terombang-ambing dari satu asumsi ke asumsi yang lain, dan kita terombang-ambing dari satu posisi ke posisi yang lain.

Pemerintahan yang bersih itu bisa ada dan real ada jika ada yang memperjuangkannya dengan mensyaratkan bahwa kekuatan pro-pemerintahan yang bersih, harus memenangkan pertarungan politiknya, terhadap perintahan yang bobrok begitu adat dari satu harapan yang diupayakan, cita-cita yang akan diwujudkan tidak sekedar bahwa kita berbicara pada ide-ide tertentu atau suatu ideal tertentu sementara kita gagal memandang realitas yang sebenarnya berkembang, bahwa kondisinya lebih rumit dan itu pasti akan

menyangkut kekuatan yang berkepentingan dengan pemerintahan yang bersih.

Persoalan pokok yang akan kita hadapi sekarang ini adalah bermula dari pertanyaan, mengapa korupsi dan kebobrokan pemerintahan merajalela?, ada satu hal yang harus diperhatikan adalah patronasi bisnis telah menjadi pendekatan bukan pendekatan hukum ataupun budaya melainkan berawal dari pendekatan ekonomi politik, patronasi bisnis ini terbentuk ketika tidak ada pengusaha domestik atau nasional baik cina ataupun pribumi yang tangguh dan mampu mengambil alih kekuatan modal asing yang dulu berada di tangan Belanda.

Proses ini terlihat dan dimulai dari program benteng (awal tahun 50-an) yang kemudian terjadi nasionalisai perusahaan asing dan ini tidak berhasil melahirkan pengusaha nasional yang ada perusahaan negara yang dipimpin oleh jendral-jendral militer dari sini kepentingan bisnis militer mulai tertanam disini, ii merupakan satu bentuk praktek korupsi yang berkembang ditubuh negara muai nasonalisasi perusahaan meski sebelumnya juga terjadi kolusi antara pengusaha pribumi dengan birokrat partai politik yang berkuasa, juga terjadinya kolusi yang membuat kondisi pengusaha Indonesia tidak mandiri, dan terkahir yag bersumber dari boom minyak yang menjadi tulang punggung kejayaan patronasi bisnis di Indonesia, pelimpahan petro dollar yang diciptakan untuk kepentingan para birokrat maupun jendral-jendral militer dan pengusaha domestik.

Kondisi ini bisa diperhatikan, jika dulu Pertamina dikuasai oleh Jendaral Ibnu Sutowo dan kemudian dari situ dia bisa

membagi rejeki uang dollar dan kemudian menghimpun kekuatan dana dan finasial dari Pertamina untuk pengembangan industrialisasi substitusi import, sehingga jaringan patronasinya berkembang sangat pesat, dan itu menjadi basis kekuatan KKN permulaan di Indonesia.

KKN dari ekonomi patronasi bisnis hanya mungkin di pertahankan oleh rezim otoriter, orde baru yang kita kenal sebagai rezim otoriter membuktika sebagai pemerintah yang penuh pelarangan, yang tidak mengijinkan atau melarang partai partai politik yang berideologi lain dari pancasila dan kemudian juga melarang dewan mahasiswa sejak 78 dan melarang serikat-serikat buruh indepeden, jadi banyak sekali pelarangan yang dilakukan oleh rezim orba dan menangkap aktivis-aktivis oposisi politik dan aktivis mahasiswa dan itu merupakan watak represif dari ORBA untuk mempertahankan kepentingan para jendral dan pegusaha domestik, bahkan fungsi hukum yang diletakkan dalam reim orbalebih berfungsi melegalkan kepentingan mereka, meskipun ada undang-undang anti korupsi, karena undang-undang itu hanya menjadi koleksi bahwa undang-undang itu ada dan seolah ada pertikaian korupsi dan pemberantasan korupsi padahal yang terjadi hanyalah koleksi semata.

Apa yang dibutuhkan untuk Tujuan pendirian pemerintahan yang bersih: pertama paradigma yang bertolak belakang dengan rezim orba tidak akan bisa berbeda dengannya (rezim ORBA), dan kita anggap seluruh sendinya telah bobrok, kedua kita gunakan paradigma reformasi total, rezim dari sisa kekuatan orba harus dirombak total, tidak bisa dicicil, tidak hanya

dalam bidang hukum atau satu hal, tapi semua karena jika tidak maka tidak akan ada perubahan, ketiga adalah kekuatan pro-reformasi total harus memenangkan pertarungan politiknya menentang kekuatan orde baru, kalau ini terjadi hukum-hukum yang berpihak pada reformasi total atau perombakan yang ada pada pemerintahan sekarang bisa ditegakkan

Ada dua hal penting yang menarik untuk didiskusikan, pertama bahwa hukum tidak bisa dilepaskan dari ekonomi politik bahkan ekonomi politik nanti akan menentukan hukum, kedua perubahan hukum harus total dilakukan tidak gradual lagi (moderator).

Sesi tanya jawab

1. **Dewi, Humas Fikom Unpad: P**emerintahan yang bersih berhubungan dengan kontrol dari masyarakatnya sendiri kepada pihak yang berkuasa yang ada, sementara masyarakat sekarang telah apatis dengan kebobrokan di bidang hukum ataupun bidang-bidang lain yang menentukan bersihnya suatu kekuasaan, sementara kontrol sosial itu kurang karena kurang pahamnya masyarakat bagaimana proses penyaluran yang benar dari kontrol yang ada, dan ini harus dilakukan pendidikan politik serta sosialisasi politik harus dilakukan tidak hanya peran media massa tapi seluruh elemen untuk menginformasikannya ke masyarakat ?

2. **Hendi, Planologi ITB**:Apa perbedaan sistem peradilan sipil dan militer, hal ini berkaitan dengan peran militer yang melebar dan terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh proses peradilan sipil dan militer.

Tanggapan Suryadi Radjab:

1. Kontrol sangat penting, ORBA harus dirombak total tidak hanya DPRnya yang dianggap kekuatan kontrol pada pemerintah dan perombakan harus dilaksanakan didalam masyarakat supaya bisa menggalang kekuatan pro-reforamasi total, tanpa kekuatan masyarakat tak akan ada perubahan dalam struktur pemerintahan. Karena menyangkut persoalan kepentingan yang berkuasa yang tidak pernah mempertanggungkawabkan pada kepentingan yang tertib dan bersih, karena tanpa paksaan tidak mugkin terjadi pemindahan kekuasaan dan inipun masih terlihat pemindahan kekusaaan diletakkan tanpa tanggungjawab.

Perubahan bisa terjadi dalam ORBA dengan paksaaan. Habibie masih menjadi bagian dari ORBA dan tuntutan masyarakat harus diekspresikan, itu mungkin telah menjadi baktinya kepada masyarakat, kalau itu dilecehkan tidak akan ada kekuatan lain yang mampu bergerak dan keharusan lain adalah koalisi mahasiswa dengan elemen lain untuk membongkar kepentingan-kepentingan yang disembunyikan.

Karena adanya indikasi ORBA tidak pernah memberikan pendidikan politik dan yang terjadi malah sebaliknya bahwa pemerintah tidak pernah mendengar keluhan dan suara rakyat sementara yang dilakukan bertahun-tahun adalah penipuan dalam

pelaksanaan pemilu dan ini merupakan kemauan politik yang harus diubah dan cara pengorganisiran kekuatan akan dilakukan untuk pemaksaaan agar pemerintah tunduk pada rakyat, dan pendidikan harus dilaksanakan lebih luas.

2. Peradilan sipil merupakan peradilan terhadap individu dari rakyat yang melakukan kesalahan hukum, sementara peradilan milter untuk kepentingan atas kejahatan militer, dan yang lebih bagus diupayakan kembali ke dalam peradilan sipil karena kejahatan militer sangat berbahaya terhadap warga sipil sehigga bisa dilaksakan sanksi administratif berupa sangksi pidana maupun perdata, sebagaimana kejadian yang terjadi di Tim-tim Aceh dan ambon.

Perombakan hukum tidak hanya perombakan terhadap pemerintal tapi juga perombakan yang harus dilakukan pada masyarakat, dar. penciptaaan hukum tidak hanya terhenti pada penciptaan itu sendiri tetapi di perlukan adanya empowerment untuk pelaksanaan dari hukum ini.

BAB IV

PERS DAN NGO SEBAGAI KEKUATAN KEEMPAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN

Pers dan NGO secara nyata memiliki peran yang sangat besar dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya kontrol terhadap penguasa.

Ini menunjukkan kepada kita ada kekuatan atau power yang dimiliki keduanya. Satu sisi Power tersebut akan berarti banyak dalam konteks mengamati, mengontrol jalannya pemeritahanan atau penyelenggaraan negara, di sisi lain ia berpotensi besar juga untuk korup dan memperdaya masyarakat. Hal ini seolah tidak pernah lepas dari dalil Lord acton tentang kekuasaan yang cenderung korup.

Ini menjadi suatu topik yang menarik karena dengan demikian pada elemen yang kita harapkan untuk mengontrol jalannya penyelenggaraan negara supaya tidak korup dan berwibawa, pada gilirannya membutuhkan ***watch*** *juga.Siapalagi kalau bukan masyarakat. Persoalannya,apakah masyarakat kita sudah menyadari itu ?*

Presentasi dan Diskusi

PERS DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Farid Gaban, Redaktur pelaksana majalah TEMPO

Kalau kita berbicara peran pers dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa tentu pertam-tama kita harus catat bahwa pers itu sendiri haruslah bersih dan berwibawa. Sebagian dari peran pers ini sebenranya mitos, tapi sudah lama menjadi aksioma dalam kehidupan sosial dan politik, bahwa pers selalu punya peran dalam perubahan, dalam demokratisasi, dalam mendorong akuntabilitas, dan proses transparansi dalam pemerintahan. Saya sedikit ingin mengawali dengan melihat bagaimana situasi pers di Indonesia, kalau kita ingin membuat pers lebih berperan. Dalam satu terakhir dalam proses reformasi sebenarnya terjadi proses liberalisasi yang sangat maju di Indonesia, kita bisamelihat Pak Yunus Yosfiah melakukan pembebasan pers secar radikal, yang pertama membuka kran penerbitan baru yang dulu dimonopoli oleh orang-orang itu saja, kemudian dalam satu tahun terakhir hampir ada seribu media baru yang muncul. Bahkan dalam UU yang baru diundangkan pekan lalu, di situ terjadi liberalisasi yang lebih jauh lagi, kita bisa menerbitkan koran atau majlah tanpa lagi perlu mengurus SIUPP. Menurut saya ini perkembangan yang revolusioner dalam satu tahun terakhir.

Kalau tadi asumsinya pers punya peran yang penting sebagai kontrol terhadap eksekutif dan lembaga-lembaga lain, kebebasan pers adalah salah satu prasyarat.Kita bisa melihat kebebasan pers sudah kita dapatkan walaupun umurnya baru beberapa bulan dan tahun. Banyak sekali media dengan segmentasi yang sangat spesifik, sangat beragam, penerbitannya juga makin luas, semakin masuk ke tahap community, kalau dulu kita mengenal koran-koran besar di Jakarta, sekarang kita bisa melihat koran-koran kecil di daerh kecil. Bahkan di Jkarta ada trend yang disebut community newspaper. Di level yang sangat lokal, di Jakarta ada majalah yang namanya Kelapa Gading, itu sebuah kompleks perumahan, mereka hanya meliput apa yan gterjadi di lingkungannya, dan majalah itu termasuk cukup bagus. Di masa depan ini akan menjadi trend besar dalam dunia media.

Juga di banding masa lalu, kepemilikan pers lebih beragam. Ini perkembangan yang positif, kalau kita percaya, demokrasi, kalau kita percaya pluralisme. Dahulu kita melihat segalanya monopolistik, oligopoli. Kalau kit amelihat SPS sebagai asosiasi pers Indonesia, adalah bentuk oligopoli. Salah satu cirinya adalah tidak memungkinkan ada pemain pers yang bisa masuk dan mereka memblok pesaing. Padahal pesaing menjadi penting karena di situ terjadi discourse, tukar pendapat. Jadi saya melihat satu tahun ini, isu menghadapkan pers dengan negara sudah kurang nilainya. Di masa lalu karena represi pemerintahan, kita banyak dan capek memperjuangkan kebebasan dan sekarang itu sudah tercapai. Terus apa yang akan terjadi ? Beberapa perkembangan pers terbaru dalam jangka panjang menurut saya hampir

semuanya menggembirakan. Artinya dari kompetisi, keterbukaan ijin akan meningkatkan profesionalisme pers. Kita mengenal pers sebagai lembaga swasta tetapi tetap mempunyai kewajiban terhadap masyarakatnya itulah yang disebut semi publik. Tapi dalam jangka pendek, kita juga mesti membenahi problem dalam pers sendiri, kalu kita ingin mengontrol pemerintah. Salah satu adalah, pers akan makin banyak berhadapan pemilik modal. Kita tahu pers adalah lembaga bisnis, ia mengacu ke profit, dan ia tergantung pada pemilik modal, sehingga kadang-kadang banyak intervensi pemilik modal. Inilah tantangan pers untuk independen. Kemudian permasalahan pers dengan pers senidri. Boom media yang terjadi satu tahun terakhir, sebenarnya tidak dibarengi SDM kalangan wartawan, itu sebabnya banyak media diterbitkan asal-asalan. Sehingga akih0alih itu menyehatkan wacana masyarakat, itu malah bisa menjadi bumerang, karena persaingan, ketidakprofesionalan, media akan terjebak pada sensasi, hal-hal yang remeh-remeh, dan tidak mengajak masyarakat pada problem yang substansial. Media massa harus banyak berkaca untuk meningkatkan profesionalisme, juga dalam kacamata berfikir. Di masa lalu, 30 tahun lebih, pers menjadi alat yang sangat ampuh bagi penguasa. Sekarang, walau lebih bebas, pers masih terbelenggu pada cara berpikir lama. Saya ambil contoh pers punya peran besar pada eufimisme, menyelewengkan makna, sehingga masyarakat tidak mengenal arti sebenarnya. Kita sering mendengar, bahkan sampai sekarang, bahwa orang ditahan itu diamankan. Itu plesetan yang membuat makna sebenarnya hilang, itu membuat masyarakat tersesat dan tidak punya daya kritis.

Contoh lain adalah GPK (Gerakan Pengacau Keamanan) yang diterapkan pada setiap gerakan yang menentang pemerintah. Itu disebarkan oleh wartawan, padahal kata itu punya tujuan tertentu. Tanpa disadari wartawan terjebak pada kata yang disiapkan penguasa. Banyak juga wartawan yang menerima amplop, karena ia tidak dibayar secaralayak oleh pemilik modal.

Ini menjadi penting di dalam proses menuju pers yang lebih bagus. Pers ibarat senjata, dia adalah power sedangkan power itu cenderung korup. Itu sebabnya di masa datang perlu adanya Media watch, NGO, di satu sisi sebagai mitra pers, di sisi lain sebagai pengontrol pers. Itu di masa datang akan menjadi penting. Juga munculnya civic journalism. Dasanrnya berasal dari community, sesuai dengan trend pers yang makin kecil dan community base, dimana kita bisa memantau di level kota, balai kota, tentang perdebatan pajak di kantor DPRD, ini akan menjadi aspek penting. DI sinilah civic journalism, dan ada hubungan pers dan NGO di sini.

PERAN MEDIA MASSA DAN LSM DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI

Oleh Erry Riyana Hardjapamekas, Sekjen MTI
(MASYARAKAT TRANSPARANSI INDONESIA)

Bapak, Ibu dan rekan-rekan yang kami hormati...

Jika kita bicara tentang peran Media Massa, LSM dan masyarakat dalam upaya penanggulangan korupsi contoh kongkritnya adalah apa yang tengah kita jalani bersama saat ini. Kegiatan yang sangat baik ini setidak-tidaknya menunjukkan bahwa masih banyak dar rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan kepada kehidupar yang lebih baik. Kegiatan ini juga setidak-tidaknya bagi saya menunjukkan bahwa kita telah muak terhadap upaya-upaya pembodohan masyarakat, dan praktek-praktek ketidakadilan oleh sebagian kecil saja orang/kelompok.

Korupsi dengan segala bentuk implementasinya telah menimbulkan dampak yang sedemikian buruk di seluruh lapisan masyarakat. Korupsi di Indonesia oleh berbagai kalangan baik dalam dan luar negeri dinilai sebagai endemik yang sudah sedemikian kronis dan sulit disembuhkan.

Praktek korupsi tidak semata-mata menimbulkan dampak pada terkurasnya uang negara. Lebih dari itu, korupsi telah merusak

seluruh tatanan kehidupan. Korupsi telah menimbulkan demoralisasi keresahan dan gejolak sosial distorsi dalam alokasi sumber daya publik, turunnya daya saing ekonomi, serta keterasingan politik.

Kita semua sadar bahwa dampak buruk terbesar yang ditimbulkan korupsi terutama diderita oleh kaum miskin, yang paling tergantung pada pelayanan publik, dan yang paling tidak mampu membayar biaya ekstra yang timbul akibat praktek suap, sogok, pungutan liar dan berbagai penyalahgunaan kekuasaan lainnya.

Penyebab Korupsi

Sejak tahun 1967, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi. Namun hingga kini praktek korupsi tidak mengalami pengurangan bahkan cenderung semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Bahkan semakin terang-terangan dan berani.

Banyak analisis yang telah mengungkapkan penyebab dari timbulnya praktek korupsi. Berikut beberapa penyebab timbulnya korupsi ditinjau dari berbagai aspek:

- Aspek Individu Pelaku Korupsi
- Aspek Organisasi
- Aspek Lingkungan
- Aspek Hukum

Aspek Individu Pelaku Korupsi

· Sifat Tamak Manusia
· Penghasilan kurang mencukupi kebutuhan hidup wajar
· Konsumtif
· Malas berusaha
· Ajaran agama tidak diterapkan

PENGABAIAN ETIKA & MORAL

Berbagai penyebab terjadinya praktek korupsi antara lain lahir dari individu.

Itu dapat berasal dari sikap keserakahan, keangkuhan dan kesewenang-wenangan yang semua mengalahkan akal sehat, nurani, kesungguhan serta Etika dan Moral.

Aspek Organisasi

Diabaikannya:

- Transparansi (Transparency)
- Akuntabilitas (Accountability)
- Keadilan (Fairness)
- Pertanggungjawaban (Responsibility)

KETIADAAN *GOOD GOVERNANCE* DAN *CORPORATE GOVERNANCE*

Dari aspek organisasi, baik itu swasta (perusahaan) maupun pemerintah, korupsi timbul karena telah dihilangkannya keadilan, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dalam praktek-praktek usaha serta pengelolaaan sumber daya publik.

Krisis yang saat ini tengah dialami Indonesia begitu dahsyat menghantam, bermula dari krisis ekonomi, berkembang menjadi krisis kepercayaan dan berlanjut hingga krisis multi dimensi. Sektor keuangan yang ambruk, perbankan yang morat-marit, serta sektor riil yang mandeg, seluruhnya mengarah pada menurunnya volume usaha, yang berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran dan meluluhlantahkan kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

Jika ingin berapoloji, dapat saja dikatakan bahwa krisis ekonomi ini terjadi semata-mata karena gejolak nilai tukar uang antar negara yang tidak stabil, yang berdampak pada menurunnya daya saing negara-negara yang terkena krisis. Namun jika ingin jujur diungkap, ada hal utama yang telah teriupakan, yakni pengabaian keadilan, transparansi, akuntabilitas dan pertanggungjawaban serta etika dan moral dalam menjalankan roda ekonomi dan pemerintahan. Badai krisis ini menunjukkan kepada kita tentang apa yang akan terjadi jika pembangunan sektor swasta dikelola dengan mengabaikan meritokrasi. Krisis ini mempertontonkan tentang apa yang akan dihadapi ketika sektor publik dikelola dengan kesewenang-wewenangan dan pengabaian supremasi hukum.

Aspek Lingkungan

Nilai-nilai yang berlaku: Kondusif untuk terjadinya korupsi.
Masyarakat tidak dilibatkan langsung dalam pengambilan keputusan yang menyangut sumber daya publik.
Negara enggan melibatkan masyarakat sebagai mitra, bahkan tidak jarang masyarakat ditempatkan sebagai 'pesaing'.
Tidak disadari bahwa praktek korupsi pada akhimya merugikan masyarakat sendiri.
Dari aspek lingkungan, korupsi dapat timbul karena: masyarakat tidak diikutsertakan dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sumber daya publik.

Untuk itu perlu ditingkatkan peranan masyarakat dalam memantau bahkan menuntut pertanggungjawaban pengelola sumber dava publik (baik pemerintah maupun swasta). Di sini, Pers dan LSM dapat mengambil peran strategis untuk menumbuhkan Masyarakat Madani dimana masyarakat harus diposisikan sebagai mitra dalam pembangunan bukan sebaliknya masyarakat sipil dianggap sebagai "competitor".

Aspek Hukum

Adanya produk hukum yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kelompok
tertentu.
Peraturan tidak disosialisasikan (tidak transparan).
Sanksi terlalu ringan.
Penegak hukum yang pandang bulu.
Tidak adanya sistem evaluasi dan revisi Undang-undang.

PELECEHAN SUPREMASI HUKUM

Berikutnya dari aspek hukum, korupsi menjadi menjamur karena kewibawaan hukum telah dilecehkan. Produk hukum mementingkan segelintir orang/kelompok tertentu, penegakkan hukum yang pandang bulu - sampai ada istilah "maju tak gentar membela yang bayar", serta sanksi hukum yang ringan membuat praktek korupsi menjadi sesuatu yang berisiko kecil dengan keuntungan yang luar biasa.

Masih hangat dan tengah berlangsung di hadapan kita tentang penyelesaian skandal bank bali.

Upaya Pemberantasan Korupsi

Komitmen yang kuat dari pimpinan
Konsep dan strategi yang jelas
Langkah Kongkrit (*Call for action*)

Komitmen Kuat Dari Pemimpin

· Disampaikan kepada seluruh masyarakat baik lisan maupun tertulis.

· Memberikan teladan dan bukti kongkrit.

· Mendorong upaya pemberantasan korupsi dengan membangun infrastruktur yang mengarah pada pemberantasan korupsi.

Menurut informasi dari panitia, kegiatan ini juga dihadiri oleh wakil partai-partai.

Terbukti dari pemilu yang berlangsung relatif damai, masyarakat menaruh harapan besar pada pemerintahan yang akan datang.

Harapan ini jangan lagi dikecewakan. Ada baiknya kita meminta kepada parpol pemenang pemilu untuk sejak dini mengeluarkan komitmennya untuk berupaya melakukan langkah kongkrit penanggulangan korupsi. Serta meminta atau merekomendasikan langkah-langkah nyata yang akan diambil.

Langkah Kongkrit:

Pembentukan Badan Independen Anti Korupsi

Lembaga yang sekarang ditugaskan untuk menangani korupsi telah kehilangan kredibilitasnya.

Permasalahan Korupsi adalah permasalahan multi disiplin.

Perlu ada badan khusus yang independen yang mampu menyusun strategi pemberantasan korupsi dan mengontrol upaya pemerintah dalam memberantas korupsi.

MTI memandang, salah satu langkah nyata yang mendesak untuk dilakukan adalah membentuk Badan Independen Anti Korupsi. Sebagaimana badan serupa di berbagai negara terbukti efektif dalam menanggulangi korupsi.

Peran Media Massa dan LSM

Turut membantu mendeteksi dan mengungkapkan praktek-praktek korupsi secara obyektif.
Menganalisis dampak korupsi dan membantu merumuskan solusinya.
Mengkomunikasikan laporan kemajuan pemberantasan korupsi ke masyarakat.
Fasilitator diskusi dan kritik pemberantasan korupsi di masyarakat.
Mendorong masyarakat untuk senantiasa menjunjung tinggi etika dan moral.
Media Massa, LSM dan masyarakat luas sangat berperan penting dalam upaya penanggulangan korupsi.

Gencarnya elemen-elemen tersebut dalam menyuarakan kebenaran dan menegur setiap tindak kesalahan dalam tingkatan manapun merupakan pondasi tegaknya *good governance.*

Sekilas MTI

· Dirintis sejak bulan MEI 1998

· Berdiri secara resmi 10 AGUSTUS 1998

· Menitik-beratkan pada kegiatan studi dan kajian, dengan tidak mengabaikan kondisi yang tengah berkembang di masyarakat

· MTI juga menerbitkan jurnal bulanan

· Website MTI: http ://www.transparansi.or. id

Sejak berdirinya MTI telah mengadakan kajian sebanyak 10 buah, dua yang baru saja rampung dan segera diluncurkan adalah:

1. Kajian Tentang Amandemen UUD 45
2. Rambu-Rambu atas Hak prerogatif Presiden

PERAN NGO DALAM PROSES PEMBENTUKAN GOOD GOVERNANCE

Oleh Tubagus Furqon Sofhani

Latar belakang: Perubahan Relasi Negara dan Masyarakat

Perubahan-perubahan yang cukup fundamental dalam wacana pembangunan di dunia serta perubahan politik dalam negeri dewasa ini telah melahirkan tuntutan pendefinisian ulang hubungan antara masyarakat dan negara (*state-society relation*). Apa yang telah diungkapkan oleh Francis Fukuyama dalam *The End of History* - dalam batas tertentu - cukup terbukti bahwa peran negara dalam jangka panjang makin berkurang seiring dengan lahirnya kekuatan-kekuatan alternatif yang cukup signifikan dalam mempengaruhi keputusan politik dan wacana publik. Istilah-istilah yang cenderung bersifat dikotomi yang melukiskan hubungan antara negara dan masyarakat seperti kuasa-tuna kuasa (*power-powerless*) telah memposisikan pemerintah seolah-olah sebagai institusi tunggal dan *provider* dalam seluruh proses pembangunan. Kemunculan kekuatan-kekuatan alternatif pembangunan (LSM, partai politik, pers) yang berkembang pesat dewasa ini harus dilihat dalam konteks keterbatasan pendekatan pembangunan masa lalu yang bertumpu pada relasi negara-masyarakat yang bersifat kuasa-tuna kuasa tersebut. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah semakin tidak memungkinkan untuk memenuhi perkembangan tuntutan

masyarakat yang makin luas. Pada sisi lain, pendekatan kuasa-tuna kuasa yang dilakukan selama ini mengalami keterbatasan untuk melakukan mobilisasi sumber daya yang berada di masyarakat.

Good governance adalah salah satu implikasi dari perubahan paradigma pembangunan di dunia dewasa ini. Paradigma pembangunan klasik sarat akan muatan-muatan ekonomi dan target keberhasilan pembangunan yang diukur berdasarkan output/hasil dengan menggunakan besaran-besaran atau indikator-indikator ekonomi seperti angka Produk Domestik Bruto (PDB). Dimensi politik hampir luput dalam formulasi kebijakan publik dan penggunaan indikator yang diturunkan dari dimensi politik hampir tidak pernah dipertimbangkan dalam wacana pembangunan klasik. Baru sekitar tahun 1994, lembaga Amnesti Internasional telah mencoba untuk memasukkan dimensi politik ke dalam target keberhasilan pembagunan. Dimensi politik tersebut diukur dalam empat indikator, yaitu: *political participation*, *rule of law*, *freedom of expression*, dan *non-discrimination* (Haq, 1995, 70). Berdasarkan keempat indikator tersebut Amnesti Internasional melakukan pengamatan ke 100 negara dan membuat urutan berdasarkan kinerja pembangunan politik negara yang bersangkutan. Hasil pengamatan memperlihatkan bahwa Indonesia berada dalam urutan ke-80 atau masuk ke dalam kategori yang memiliki kinerja pembangunan politik yang relatif rendah. Terlepas dari perbedaan konsep dan indikator pembangunan politik yang digunakan, tetapi upaya untuk memasukkan dimensi politik ke

dalam pengukuran kinerja pembangunan semakin mendapat perhatian yang luas karena ketidakcukupan penjelasan faktor-faktor ekonomi untuk menerangkan fenomena pembangunan secara lebih luas. *Good governance* merupakan istilah yang cenderung terkait dengan dimensi politik yang saat ini semakin populer sebagai konsekuensi dari pergeseran paradigma pembangunan menuju ke arah pemahaman yang lebih komprehensif.

Peran NGO

Istilah *good governance* cenderung lebih merujuk pads proses pembangunan yang memperlihatkan kinerja politik institusi pemerintah dalam mengelola sektor publik. Untuk negara yang memiliki kinerja politik yang rendah seperti Indonesia, maka kelahiran *good governance* sangat bergantung pada proses pemberdayaan dan independensi institusi-institusi di luar pemerintah, seperti NGO dan pers. Walaupun telah terjadi perubahan politik dalam negeri dalam satu tahun terakhir ini, namun yang terjadi masih bersifat struktural (perubahan kekuasaan elit politik). Budaya politik dalam masyarakat luas termasuk para elit politik belum menunjukkan perubahan yang cukup mendasar. Kasus-kasus yang muncul belakangan ini, seperti Bank Bali, masih memperlihatkan intervensi dan penyalahgunaan kekuasaan politik dalam kebijakan ekonomi. Dalam konteks ini, peran sentral NGO dan pers dalam jangka panjang adalah melakukan secara terus menerus transisi budaya politik ke arah pencapaian *good governance*. Peran institusi-

institusi alternatif dalam proses pembangunan sebenarnya makin mendapat tempat dalam paradigma pembangunan saat ini bahkan mendapat sokongan yang semakin luas dari lembaga-lembaga internasional. Beberapa istilah kemudian muncul yang sesungguhnya merupakan legitimasi terhadap institusi-institusi altematif tersebut, seperti: *public-private partnership, private sector participation*, dan sebagainya. Sebagaimana telah dikenal luas, peran pemerintah juga mengalami pergeseran dari *provider* menjadi *enabler* yang berfungsi untuk mendorong partisipasi yang semakin luas dari sektor swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Dukungan internasional terhadap peran LSM ditunjukkan dengan makin banyaknya lembaga donor intemasional memberikan bantuan dana terhadap beberapa aktivitas LSM. Tetapi istilah-istilah tersebut muncul cenderung merupakan refleksi keterbatasan sumber daya ekonomi pemerintah dan keterbatasan program-program pemerintah untuk mencapai kelompok atau kawasan tertentu ketimbang perubahan persepsi pemerintah terhadap potensi NGO untuk bersama-sama melakukan perubahan struktur politik. Bentuk-bentuk kerjasama yang ditawarkan masih tetap menempatkan NGO sebagai pelaksana atau perpanjangan tangan pemerintah ketimbang institusi yang juga berperan merumuskan agenda-agenda pembangunan.

Setidak-tidaknya terdapat tiga peran pokok NGO dalam proses pembentukan *good governance*: Pertama, berperan sebagai *partner* bagi pemerintah dalam membentuk arah agenda pembangunan. Peran ini hanya mungkin dilakukan bila terjadi perubahan *image*

pada kedua belah pihak dan melakukan perubahan relasi yang selama ini terbentuk. Bentuk-bentuk kooptasi dan pengendalian terhadap NGO oleh pemerintah selama masa yang lalu perlu diubah ke dalam bentuk kolaborasi. Pemerintah dan NGO perlu mengubah relasi yang saat ini cenderung menempatkan NGO sebagai sesuatu institusi yang berada di "seberang " proses pengambilan keputusan sektor publik atau terkadang ditempatkan sebagai suplemen/komplemen pelaksanaan program-program pemerintah. Kolaborasi strategis pemerintah - NGO perlu dilembagakan untuk melahirkan sinergi yang makin kuat terhadap proses pembangunan politik. Oleh karena itu, perlu dirumuskan semacam *commond ground* sebagai dasar bagi kolaborasi antara pemerintah dan NGO tersebut. Melalui kolaborasi ini NGO akan makin berperan secara lebih konstruktif untuk memformulasikan agenda strategis pembangunan serta mengurangi konflik antara berbagai kepentingan masyarakat dan antara masyarakat dan negara. Peran pertama ini lebih bersifat internal karena proses interaksinya terjalin melalui kolaborasi antara pemerintah dan NGO.

Kedua, dalam konteks pembentukan *good governance* NGO harus semakin memperkuat pengaruh politik melalui pembentukan kerjasama dan jaringan kerja yang semakin luas, baik dengan lembaga-lembaga di dalam negeri maupun di luar negeri. Proses pembentukan *good governance*, terutama pada negara yang baru mulai belajar demokrasi, membutuhkan *external pressure* yang secara kolektif akan memberikan pengaruh kebijakan ekonomi dan politik yang lebih besar. Kerjasama bisa dilakukan dengan NGO

lainnya, perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga advokasi, lembaga-lembaga internasional, serta lembaga donor. Jaringan kerja yang makin luas ini akan mengurangi ketergantungan NGO terhadap pemerintah dan akan menjadi *pressure group* yang cukup efektif dalam proses pencapaian *good governance*. Peran yang kedua ini lebih bersifat eksternal karena NGO berada di luar lingkaran institusi formal pengambil keputusan.

Ketiga, proses pembentukan *good governance* juga dipengaruhi oleh kecepatan transisi budaya politik masyarakat, sehingga masyarakat secara keseluruhan memiliki sensitivitas yang cukup tinggi terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut sektor publik. Dalam konteks ini, NGO dapat berperan langsung melakukan pendampingan dan *empowerment* terhadap masyarakat dan institusi-institusi masyarakat lokal.

Titik paling kritis terhadap peran NGO dalam proses pembentukan *good governance* adalah terletak pada perubahan relasi antara pemerintah dan NGO. Titik kritis ini bisa dilewati apabila kedua belah pihak melakukan perubahan yang substansial terhadap kinerja dan perilaku politik masing-masing. Pemerintah yang *legitimate* adalah syarat pertama terjadi perubahan *image* NGO terhadap pemerintah, sebaliknya NGO yang profesional dan konstruktif merupakan pertimbangan pokok bagi pemerintah untuk melakukan perubahan citra terhadap NGO.

BIO DATA

PEMBICARA I

SESI I

Nama : Khofifah Indar Parawansa
Alamat : Jl. Bina Harapan no. 38 C Jakarta
Tmp/Tgl lahir : Surabaya, 19 Mei 1965
Pendidikan :

- Univ. Islam Taruna Surabaya tahun 1984-1989
- Univ. Airlangga Surabaya tahun 1984-1990
- Univ. Indonesia Jakarta tahun 1993-1998

Organisasi Politik yang pernah diikuti :

- PPP bagian Diklat (Surabaya) tahun 1990-1995
- Ketua DPP PKB 1998-...

PEMBICARA II

Nama : Suwarno Adi Wijoyo
Alamat : Jl. Bulak Rantai G-85
KPAD Jakarta Timur
Tmp/Tgl lahir : 21 April 1942
Pendidikan :

- Akademi Militer (Magelang) tahun 1966
- Sesko AD (Bandung) tahun 1982
- Lemhanas (Jakarta) tahun 1986

Organisasi Keprofesian :

- TNI di Kodam III/Siliwangi

- Assospol ABRI (Jakarta)

Organisasi Politik yang pernah diikuti :

- Anggota MPP PAN (Jakarta)

PEMBICARA III

Nama : Slamet Effendy Yusuf

Alamat : Wisma DPR-RI Blok E2 No. 375
Kalibata, Jakarta

Tmp/Tgl lahir : - (50 tahun)

Pendidikan :

- IAIN Yogyakarta (S1) tahun 1976
- Universitas Indonesia (S2) tahun 1994

Organisasi Keprofesian :

- Ketua Dewan Mahasiswa 1973-1975
- Ketua PMII 1972-1975
- Ketua Umum GP-Ansor (Pimpinan Pusat) 1985-1995

Organisasi Politik yang pernah diikuti :

- Ketua Pemenangan Pemilu Golkar 1998-2003



PEMBICARA I

Nama : Sudjana Sapi'ie

Alamat : Jl. Sumber Asih no. 32/11
Bandung

Tmp/Tgl lahir : -

Pendidikan :

- ITB

Organisasi Keprofesian

- Senat Guru Besar ITB

Organisasi politik/lain:

- Direktur Forum Rektor

PEMBICARA II

Nama : Barita E. Siregar

Alamat : Jl. Kinanti 21 Bandung

Tmp/Tgl lahir : 4 Agustus 1945

Pendidikan :

- S1 Administrasi Negara UNPAD 1977
- S2 Komunikasi UNPAD 1980
- S3 Komunikasi UNPAD 1993

Organisasi Keprofesian :

- Ketua ISI (Ikatan Sosiologi Indonesia) Jabar.
- Wakil Ketua ISKI (Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia) Bandung

Organisasi Politik yang pernah diikuti :

- Anggota MPR-RI dari fraksi GOLKAR

PEMBICARA III

Nama : Andre H. Pareira Drs.,MA.

Alamat : Jl. Pratista Timur II/22
Antapani - Bandung

Tmp/Tgl lahir : Flores, 31 Mei 1964

Pendidikan :

- S1 FISIP UNPAR Bandung Jurusan Hubungan Internasional tahun 1982-1986
- S2 Studi Asia Tenggara- Politik-Sosiologi (Jerman) tahun 1992-1995

Organisasi Keprofesian :

- Anggota GMNI Bandung tahun 1984-1986
- Anggota Forum Alumni Bandung tahun 1996-...

Organisasi Politik yang pernah diikuti :

- Sekretaris Balitbangda PDI-P Jabar tahun 1998-...

PEMBICARA I

Nama : Ismail Sunni

Alamat : Jl. Jenggala II no. 12, Jakarta

Tmp/Tal lahir : Labuan Haji, Aceh, 7 Agustus 1931

Pendidikan :

- Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masy. UI 1957

- Fac of Graduates Studies and Research McHill Univ. 1960
- Pasca Sarjana UI, Doktor Ilmu Hukum 1963

Pengalaman :

- Academic Career, F Hukum UI 1955,
- Guru Besar UI 1965,Mc Hill University Alumni 1960 –
- Wakil Ketua Pembinaan Hukum Nasional Depkeh,
- Guru besar Lemhanas,
- Anggota DPRGR 67-69,
- Duta Besar RI Saudi Arabia dan Kesultanan Oman.

PEMBICARA II

Nama : Suryadi Radjab

Alamat : Jl. Burangrang Dalam 98 Bandung 40262

Tmp/Tgl lahir : Meulaboh,29 November 1961

Pendidikan :

- Teknik Geologi ITB tahun 1980-1986
- Administrasi Negara Fisip UNPAD 1981-1985

Organisasi Keprofesian :

- Kepala Litbang LBH Bandung 1997
- Sekretaris PBHI Jabar 1999

SESI IV

PEMBICARA I

Nama : Farid Gaban
Alamat :Jl. Proklamasi 72, Jakarta
Tmp/Tgl lahir : 12 Juli 1961
Pekerjaan :Wartawan (Redaktur Pelaksana) MajalahTempo
Pendidikan :

- Teknik Planologi ITB (tidak lulus) angkatan 1979
- Short-course on Center of Foreign Journalist, Reston, Virginia USA 1998

PEMBICARA II

Nama : Erry Riyana Hardjapamekas
Alamat : Jl. Buni 36 Utan Kayu, Jakarta 13120
Tmp/Tgl lahir : Bandung, 5 September 1949
Pekerjaan : Karyawan BUMN / Sekjen MTI
Pendidikan :

- Fakultas Ekonomi UNPAD tahun 1978

Organisasi Keprofesian :

- Ikatan sarjana Ekonomi Indonesia tahun 1978
- Ketua Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia tahun 1998
- Anggota pengurus Indonesian Mining Association tahun 1991

PEMBICARA III

Nama : Tubagus Furqon Sofhani

Alamat : Bumi Prima K-6 Cimahi

Tmp/Tgl lahir : Serang, 21 Oktober 1966

Pekerjaan : Dosen Jurusan Teknik Plonologi ITB

Pendidikan :

- Teknik Planologi ITB tahun 1991
- Institute of Social Studies Deen Haag tahun 1996

Organisasi Keprofesian :

- Anggota Ikatan Ahli Perencanaan

CENTER FOR INFORMATION AND DEVELOPMENT ANALYSIS

PRESS RELEASE

Pemilu 7 Juni 1999 telah berjalan dengan lancer dan menunjukkan tingkat partisipasi rakyat yang cukup tinggi. Hasil pemilu menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Indonesia mempercayakan masa depan negara ini kepada tokoh - tokoh lima partai besar yaitu PDIP, Golkar, PPP, PKB dan PAN.

Kelima partai inilah yang paling berkepentingan untuk mewujudkan aspirasi rakyat ke dalam kehidupan negara sehari - hari. Realitas rakyat, khususnya rakyat marginal sudah bosan dengan pertarungan elit politik yang lebih cenderung kepada debat kusir dan permainan semantik, kc~timbang dialetika politik yang berguna bagi pendidikan politik rakyat. Karena itulah diperlukan sebuah wacana dan diskursus yang dapat mendorong elit politik untuk kembali membuka komitmen - komitmen lama untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang sering disampaikan menjelang pemilu yang lalu.

Secara umum tuntutan rakyat yang paling dominan dengan adanya era reformasi ini adalah terciptanya pemerintahan yang bersih dan betwibawa (clean and good governance). Siapapun yang berkuasa

harus benar - benar serius mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Center for Information and Development Analysis (CIDA) sebagai sebuah lembaga kajian yang dimotori oleh aktivis dan intelektual muda dari kampus ITB mencoba mengambil prakarsa dengan meyelenggarakan Simposium Nasional "Clean and Good Governance" pada tanggal 18 September 1999, dengan tujuan :

1. Memberi pendidikan politik kepada rakyat.
2. Membahas format pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Indonesia.
3. Elaborasi konsep dan komitmen dan setiap elemen bangsa (eksekutif, legislatif, Yudikatif dan LSM) dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Dalam kesempatan ini CIDA juga menyampaikan beberapa pokok pikiran berkaitan dengan pennrujudan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di indonesia, antara lain :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa harus menjadi program prioritas pemerintah baru Indonesia. Hal ini harus dipertegas dengan langkah konkret
   yakni :
   a. Transparansil Audit terbuka Harta kekayaan Pejabat sebelum dan sesudah menjabat
   b. Transparansi dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang menyangkut kepentingan publik.

2. Mendorong dilaksanakannya pemilihan Presiden dan wakil - wakil rakyat secara langsung oleh rakyat sebagai prasyarat demokratisasi.
3. Supremasi hukum di Indonesia harus ditegakkan tanpa pandang bulu, termasuk dalam hal penanganan kasus mantan presiden Suharto.
4. Menghapuskan Dwi Fungsi ABRI (TNI dan Polri) secara total dan membatasi peran militer di dalam kehidupan masyarakat sipil.
5. Pemberdayakan fungsi - fungsi lembaga yudikatif, legislatif dan LSM sebagai lembaga di luar eksekutif harus segera dilakukan sebagai prasyarat terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
6. Membangun kebebasan pers secara sungguh - sungguh sebagai wahana dialog dan kontrol antara rakyat dan pelaksana negara.

Semoga Simposium Nasional ini dapat memberi arti positif bagi proses pembentukan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Indonesia. Amien.

Bandung, 18 September 1999

CENTER FOR INFORMATION DAN DEVELOPMENT ANALYSIS

MOCH. NUNUNG KURNIAWAN
DIREKTUR

GUIDE LINE

SIMPOSIUM CLEAN AND GOOD GOVERNANCE

18 SEPTEMBER 1999

8 Masalah EKSEKUTIF :

1. Langkah penyelesaian kasus Soeharto
2. Tidak adanya transparansi /audit terbuka harta pejabat
3. Tidak adanya transparansi kebijaksanaan-kebijaksanaan yang menyangkut kepentingan publik
4. Lemahnya tim/badan pengawas korupsi yang dibentuk oleh pemerintah
5. Standar gaji pegawai negeri yang rendah
6. Peran militer dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sangat besar pengaruhnya
7. Hubungan Pemerintah Pusat- Daerah yang terkonsentrasi di Pusat terutama pembagian Keuangan
8. Banyaknya Pasal UUD'45 yang memberi kewenangan terlalu besar pada Eks ekuti /Presiden

8 Masalah LEGISLA TIF:

1. Pemilihan Caleg yang tidak langsung dan tidak bersih, berkaitan dengan politik uang
2. Masih adanya wakil eksekutifdi Legislatif
3. Posisi Militer yang berakar kuat di Legislatif
4. Tidak adanya persetujuan DPR atas pengangkatan jabatan-jabatan kenegaraan yang strategis

5. Wewenang DPR terlalu dibatasi dalam UUD 45
6. Oposisi yang belum/tidak efektif
7. Kualitas keilmuan Anggota Legislatif yang masih relatif kalah dibandingkan Eksekutif, membuka peluang terciptanya peraturan hukum & perundangan serta kebijakan yang merugikan kepentingan publik
8. Pertanggungjawaban anggwota Legislatif kepada publik tidak secara langsung.

8 Masalah YUDIKATIF:

1. Penyelesaian kasus mantan presiden Soeharto yang tidak tegas
2. Dualisme Jalur pengaturan aparat hukum yakni Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman
3. Pemberantasan mafia peradilan
4. Tidak adanya peninjau produk hukum di Indonesia (judicial review
5. Peran Militer yang masih sangat besar, terutama untuk menduduki jabatan-jabatan strategis
6. UUD 45 yang sedikit mengatur kekuasaan Rehaldman
7. Tidak adanya Kepastian Hukum

5 Masalah Pers & NGO:

1. Pers & NGO yang tidak terkooptasi oleh kekuasaan
2. Membangun Pers &NGO sebagai media kepentingan rakyat
3. Kebebasan Pers yangmenjunjung tinggi etika dan moral

4. Membangun NGO yang tidak bergantung pada dana luar negeri
5. Pers & NGO yang terus mendukung transparansi dan penghapusan KKN dalam pemerintahan

SEKILAS CIDA
(Center for Information and Development Analysis)

Masa depan masyarakat dunia digambarkan menuju masyarakat pengetahuan. Manusia sedang menuju peradaban era informasi, syarat terciptanya masyarakat pengetahuan. Toffler mengklasifikasikan peradaban ini sebagai gelombang ketiga dalam era peradaban manusia. Pada peradaban gelombang pertama, tanah dan kerja fisik adalah faktor-faktor utama dalam produksi. Peradaban gelombang berikutnya adalah era industri. Tanah masih dibutuhkan, tetapi kerja fisik diperbanyak secara massal dengan menggunakan mesin-mesin. Pada gelombang ketiga yang merupakan era informasi, sumber daya utama adalah semua bentuk pengetahuan yang dapat didayagunakan, yang mencakup data, informasi, gambar, simbol, budaya, ideologi, dan nilai.

Di manakah posisi Indonesia ? Indonesia ditengarai berada dalam tiga gelombang Toffler sekaligus. Kompleksitas ini merupakan awal pijakan melangkah yang sehat. Yang menjadi persoalan selama ini adalah pengingkaran terhadap kompleksitas tersebut sehingga jurang antar gelombang makin lebar. Pada konteks ini, terlihat bahwa masyarakat Indonesia tidak mempunyai kemerdekaan untuk memajukan diri dan daerahnya serta hanya menjadi obyek, dan boleh jadi 'budak' pembangunan.

Dalam hal ini banyak sekali faktor yang berperan besar, terutama adalah berkenaan dengan edukasi atau pendidikan. Edukasi yang meluas memerlukan wahana alternatif yang terbuka, lentur dalam gerakannya, cepat menangkap dan menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, memunculkan gagasan bagi perubahan masyarakat. Oleh sebab itulah CIDA didirikan dalam fungsinya sebagai wahana edukasi alternatif untuk mewujudkan masyarakat yang kritis, konstruktif, kreatif, dan dewasa dalam pragmatisme pembangunan.

Tujuan dan Sasaran

CIDA bertujuan melakukan kajian pembangunan dan pencerahan masyarakat luas, dengan sasaran yaitu mendapatkan hasil pemikiran sehingga dapat ditransformasikan untuk pencerahan.

Tanggal Berdiri

CIDA didirikan pada tanggal 2 Mei 1998, di Jl. Ganesha Bandung, berada di bawah Yayasan Fajar.

Bidang-bidang Kajian

Bidang-bidang kajian CIDA meliputi ekonomi, politik dan hukum, sosial-budaya, industri dan aplikasi teknologi, moral dan religi.

Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan secara periodik adalah diskusi internal dan eksternal, kajian buku, penelitan dan studi kasus, seminar-seminar, dan pengumpulan informasi.

Keanggotaan

Bersifat inklusif dan egaliter. Lintas SARA, lintas kampus, lintas profesi. Keanggotaan berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya yang berminat pada kajian pembangunan dan pencerahan.

Struktur Organisasi

Direktur Utama : Moch. Nunung Kurniawan
Direktur Kajian : Sidik Setiyadi
Koordinator Politik dan Hukum : Amiruddin
Koordinator Ekonomi : Lukman S
Koordinator Sosial – Budaya : Setyo Hartanto
Kordinator Moral dan Religi: M. Ainul Yaqin
Koordinator Industri dan Aplikasi Teknologi : Turino Yulianto
Koordinator Pusat Data dan Dokumentasi : Jose Charosta
Koordinator Dana dan Keuangan : Riril M

Apa yang telah dan akan CIDA lakukan ?

1. Kajian intensif mingguan, masuk tahun ke -2
2. Diskusi Terbuka Ekonomi Kerakyatan bulan Oktober 1998, di Jl Ganesha 10 BAndung
3. Simposium Nasional "Clean and Good Governance" , September 1999
4. Penerbitan buku "Clean and Good Governance"
5. Penerbitan Jurnal, Januari 2000

Alamat :

Sekretariat : Jl. Sekeloa Utara no 59A Bandung, 40134

Ph. 022-2513803, fax. 022-2505442, email :

plato123@cyberlib.itb.ac.id

c.p: Turino Yulianto , ph.021-7802113, HP:0816-1338132

KPA Konsorsium Pembaharuan Agraria